MAJOR JENDERAL Anumerta D.I. PANJAITAN

Oleh: Drs. MARDANAS SAFWAN

400/1983

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1981/1982

MAYOR JENDERAL ANUMERTA D.I. PANJAITAN

OLEH :
Drs. MARDANAS SAFWAN

PROYEK PELITA
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1982-83

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL
1981/1982

PENYUNTING

1. **DRS. Soewadji Sjafei**
2. **Drs. Soetopo Soetanto**
3. **Sutrisno Kutoyo**

Gambar muka
oleh Hafid Alibasyah

PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL
Nomor Induk : 400/83
Tanggal terima : 24-3-83
~~Beli~~/hadiah dari : Proyek IDSN
Nomor buku : 92 Saf m
Kopi ke : 1 II

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI 2
SAMBUTAN 3
KATA PENGANTAR 5
PENDAHULUAN 7
BAB I. **RIWAYAT HIDUP D.I. PANJAITAN** . 9
BAB II. **PERJUANGAN D.I. PANJAITAN PADA ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG** 17
BAB III. **PERJUANGAN D.I. PANJAITAN PADA ZAMAN KEMERDEKAAN** 27
2. PENGABDIAN DIRI DALAM ANGKATAN BERSENJATA .....
2. SITUASI POLITIK PADA ZAMAN DEMOKRASI TERPIMPIN 45
BAB IV. **PEMBERONTAKAN G 30 S/PKI DAN GUGURNYA D.I. PANJAITAN** 59
1. RENCANA PEMBERONTAKAN ..
2. PELAKSANAAN G 30 S/PKI DAN GUGURNYA D.I. PANJAITAN 76
PENUTUP 85
DAFTAR SUMBER 89

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Agustus 1981.
Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengkhususkan pada penulisan biografi Pahlawan Nasional, yang sudah memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Adapun ketentuan umum bagi Pahlawan Nasional, ialah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri atau pun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Tujuan utama dari penulisan biografi Pahlawan Nasional ini ialah membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, dan melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Di samping itu penulisan biografi Pahlawan Nasional juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para Pahlawan Nasional yang berguna sebagai suri-tauladan bagi generasi penerus dan masyarakat pada umumnya. Penulisan itu sendiri merupakan kegiatan memelihara kenangan tentang para Pahlawan Nasional yang telah memberikan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa. Sekaligus juga bermakna sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran dan minat akan sejarah bangsa dan tanah air.

Selanjutnya penulisan biografi Pahlawan Nasional merupakan usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pribadi warga negara, serta bermanfaat bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Agustus 1981
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengangkat 87 orang pahlawan dengan gelar yang bervariasi; Pahlawan Nasional, Pahlawan Pembela Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Pergerakan Nasional dan Pahlawan Revolusi. Dari 87 orang yang memperoleh predikat Pahlawan itu, 22 orang di antaranya berasal dari lingkungan ABRI, yaitu kurang lebih 25%. Hal itu menunjukkan tempat dan peranan ABRI dalam kehidupan bangsa dan negara, dan salah seorang di antaranya adalah D.I. Panjaitan.

Seorang Pahlawan biasanya semasa hidupnya telah melakukan tindak perbuatan yang melebihi tugas yang dibebankan kepadanya. Ia telah memberikan pengabdian yang besar dan terpuji untuk kepentingan umum, untuk membela dan meningkatkan martabat bangsa dan negara. Tindak perbuatan dan pengabdian yang demikian disebut tindak — kepahlawanan. Hakekat Kepahlawanan adalah suri teladan yang diharapkan kepada generasi mendatang untuk dijadikan pegangan dan sumber inspirasi. Agar generasi mendatang dapat mencontoh tindak perbuatan dari tokoh pahlawan itu, kepada generasi mendatang itu perlu diberikan informasi mengapa tokoh-tokoh tersebut telah diangkat menjadi Pahlawan. Apa jasa mereka dan apa kebajikan yang telah mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Salah satu sarana untuk menyampaikan informasi itu ialah dengan cara menulis biografi mereka.

Dalam rangka menulis biografi perjuangan D.I. Panjaitan, maka dicoba membagi dalam beberapa bahagian atau bab.

Perjuangan D.I. Panjaitan tentu tidak dapat dilepaskan dari keadaan lingkungan pada waktu beliau hidup, terutama pemberontakan G 30 S/PKI.

Pemberontakan G 30 S/PKI merupakan tragedi nasional yang telah menyebabkan gugurnya Pahlawan Revolusi, di antaranya D.I. Panjaitan. Mengingat eratnya hubungan antara Pemberontakan G 30 S/PKI dan perjuangan D.I. Panjaitan, maka di dalam uraian ini akan dipaparkan secara panjang lebar mengenai persiapan dan pelaksanaan pemberontakan G 30 S/PKI.

Dalam uraian mengenai riwayat hidup dan perjuangan D.I. Panjaitan dimulai dengan masa kecil di kampung halamannya Balige — Tapanuli. Sesudah menyelesaikan MULO, yaitu SMP pada zaman penjajahan Belanda, D.I. Panjaitan pada masa pendudukan Jepang memasuki pendidikan *Giyugun*. Sesudah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, D.I. Panjaitan ikut berjuang dengan para pemuda lainnya di daerah Riau. Sesudah pengakuan kedaulatan D.I. Panjaitan tetap melanjutkan pengabdiannya di dalam ABRI sampai akhir hayatnya gugur akibat pemberontakan G 30 S/PKI.

Selanjutnya diuraikan perjuangan D.I. Panjaitan pada masa pendudukan Jepang. Dalam uraian ini juga disinggung mengenai pendudukan Jepang pada umumnya dan perjuangan D.I. Panjaitan dalam bidang kemiliteran di daerah Riau dalam kesatuan Giyugun, setelah ia menamatkan pendidikan Giyugun di Bukittinggi.

Dalam bahagian selanjutnya diuraikan perjuangan D.I. Panjaitan pada masa kemerdekaan. Sesudah pengakuan kedaulatan D.I. Panjaitan terus mengabdikan dirinya di dalam ABRI kesatuan Teritorium I Sumatera Utara. Kemudian dipindahkan ke dalam kesatuan Teritorium II Sumatera Selatan, dan pada tahun 1956 dipindahkan ke Jakarta (MABAD). Kemudian diangkat menjadi Atase Militer di Jerman Barat dan akhirnya dipindahkan lagi di Jakarta sebagai Asisten IV/Men. Pangad. dengan pangkat Brigadir Jenderal. Kemudian juga diuraikan situasi umum politik di Indonesia zaman demokrasi terpimpin yang mencapai puncaknya dalam pemberontakan G 30 S/PKI.

Dalam uraian selanjutnya diuraikan mengenai pemberontakan G 30 S/PKI. Pada bagian ini diuraikan persiapan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang telah dapat menyusup ke dalam tubuh ABRI. Selanjutnya diuraikan timbulnya pemberontakan yang dimulai dengan pembunuhan para Jenderal. Selanjutnya diuraikan penumpasan pemberontakan oleh ABRI beserta rakyat Indonesia yang menyebabkan gagalnya pemberontakan itu.

Pada bahagian terakhir yang merupakan penutup diuraikan mengenai kesimpulan dari seluruh uraian dan hikmah serta nilai pelajaran yang dapat diambil oleh bangsa Indonesia dengan adanya pemberontakan G 30 S/PKI.

BAB I
RIWAYAT HIDUP D.I. PANJAITAN

Nama lengkap D.I. Panjaitan adalah Donald Izacus Panjaitan. Ia dilahirkan pada tanggal 10 Juni 1925 di desa Sitorang, Balige, Tapanuli. Ayahnya seorang pengusaha kecil bernama Herman Panjaitan dan ibunya Dina Pohan. Keluarga ini hidup dengan serba sederhana. Mereka penganut agama Kristen Protestan yang saleh dan taat, karena itu tabah menghadapi segala kesulitan. Di dalam situasi rumah tangga demikian, D.I. Panjaitan dididik dan dibesarkan.

Sejak kecil D.I. Panjaitan sudah memperlihatkan ciri kepintaran yang menonjol. Dalam kehidupan serba sederhana, D.I. Panjaitan dimasukkan orang tuanya ke Sekolah Dasar. (H.I.S.). Karena kecerdasannya Donald yang sederhana ini seringkali mendapat pujian dari kawan-kawannya dan guru-gurunya. Bahkan pada waktu masih duduk di kelas tujuh ia telah diangkat Kepala Sekolah G. De Jong menjadi mentornya (pembantu). Berkat kepandaiannya itu ia diterima masuk di *MULO* (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs,* setingkat SMP) tanpa melalui ujian[1].

Sebenarnya Donald ingin masuk ke H.B.S. (*Hogere Burger School,* sejenis SMP dan SMA, dengan lama pendidikan lima tahun). Murid *H.I.S.* diperbolehkan masuk H.B.S. dan sudah barang tentu melalui ujian yang berat. Donald diizinkan untuk mengikuti ujian. Hasil ujiannya tidak mengecewakan. Ia lulus dengan angka yang memuaskan, tetapi karena keadaan keuangan orang tuanya, dengan rasa berat diurungkannya niatnya masuk H.B.S. tersebut. Ia kemudian masuk M.U.L.O. sesuai dengan kemampuan keuangan orang tuanya.

Tetapi apa yang hendak dikata; mujur tidak dapat diraih dan malang pun tidak dapat dielak. Selama mengikuti pendidikan M.U.L.O. ini, ia ditimpa musibah. Berturut-turut kedua orang tuanya meninggal dunia dan tinggallah ia sebatang kara. Pemuda yang cerdas itu ditakdirkan hidup tanpa kasih sayang yang cukup lama dari orang tuanya. Masa remajanya ditempa di atas penderitaan lahir dan batin. Latar belakang hidupnya membuat ia ulet, tabah, dan percaya pada diri sendiri. Tekun memperjuangkan cita-citanya dengan menuntut ilmu pengetahuan dan dengan tekadnya itu akhirnya ia berhasil mengatasi rintangan dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah.

Setelah D.I. Panjaitan menyelesaikan pendidikannya di M.U.L.O., tentara Jepang mendarat di Indonesia. Pemerintah Pendudukan Balatentara Jepang di Sumatera membentuk suatu pasukan lokal yang terkenal dengan nama *Giyugun* dan pembentukan itu dimulai pada akhir tahun 1944[2].

---

2. "Pahlawan Revolusi Donald Isak Panjaitan, *Jawanenra terakhir sebelum gugur.*" Majalah *Ragi Buana* No. 21 Oktober 1965, hal. 4.

Sebagai seorang pemuda yang dijiwai oleh patriotisme, D.I. Panjaitan memasuki pendidikan militer *Giyugun*. Setelah beberapa bulan dilatih sebagai prajurit ia ditempatkan di Pekanbaru. Jabatannya adalah Perwira Staf berpangkat *Syodanco* (Letnan Dua).

Ketika Jepang menyerah *Giyugun* dibubarkan. D.I. Panjaitan segera menghubungi pemuda bekas *Giyugun* dan pemuda-pemuda lainnya yang pernah mendapat pendidikan militer. Mereka mendirikan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Pada bulan Nopember 1945 PRI di Riau dijelmakan menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR di Riau dibagi atas 3 batalion masing-masing di Pekanbaru, Bengkalis, dan Indragiri. D.I. Panjaitan ditunjuk sebagai Komandan Batalyon Pekanbaru. Sesuai dengan perkembangan perjuangan, BKR diubah menjadi TKR dan kemudian menjadi TNI. Di Riau dibentuk Resimen IV, di bawah Hasan Basri. Dalam organisasi baru ini D.I. Panjaitan pada tanggal 31 Maret 1946, diangkat oleh Panglima Komandemen Tentara Sumatera menjadi Komandan Batalyon Resimen IV Riau dengan Pangkat Mayor[3].

D.I. Panjaitan sebagai putera daerah Batak tidak hanya terkenal sebagai seorang pemberani, melainkan juga seorang yang ulet, taat menjalankan ibadah kepada Tuhan, dan mempunyai kemauan yang amat keras. Segala pahit getirnya kehidupan selalu dihadapinya dengan ketabahan hati. Dari sini muncul bakat-bakat kepemimpinan, dan ketrampilannya sebagai seorang prajurit. Hal ini diketahui oleh Panglima Divisi IX Sumatera, yang kemudian mengangkat Mayor D.I. Panjaitan menjadi Wakil Komandan Resimen IV Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Panglima Divisi IX Sumatera tanggal 25 Maret 1948, Mayor D.I. Panjaitan ditugasi sebagai Komandan Organisasi/Pendidikan Divisi IX Sumatera, dan berkedudukan di Bukittinggi[4].

Ketika Angkatan Perang melaksanakan kebijaksanaan rekonstruksi dan rasionalisasi (Rera), maka pelaksanaan pada tingkat pasukan dilaksanakan pada bulan Maret 1948. Salah satu kebijaksanaan yang digariskan oleh pimpinan adalah, semua pangkat militer efektif diturunkan setingkat. Akibat dari pelaksanaan itu pangkat D.I. Panjaitan juga diturunkan dari Mayor menjadi Kapten.

Sementara itu oleh Panglima Komando Sumatera, Kapten D.I. Panjaitan ditugaskan menjadi Kepala Staf Umum IV (*Supply*) Komando Sumatera. Jabatan tersebut sejak tanggal 15 Januari 1949 dirangkap dengan jabatan Pimpinan Pusat Perbekalan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)[5].

3. *Wawancara dengan Bapak Hasan Basri*, Jakarta 15 April 1978.

4. Pramono et al, *Biografi Pahlawan Nasional dan Lingkungan ABRI*, Dep. Hankam, Presejarah ABRI, 1979.

5. *Wawancara dengan Bapak Subrantas*, Pekanbaru 10 Oktober 1979.

Meskipun pangkat diturunkan setingkat, tetapi tugas dan tanggung jawabnya semakin berat. Kemampuan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sangat mengesankan dan meyakinkan Pimpinan. Berdasarkan kenyataan itu, ia sering dibebani berbagai tugas penting. Pada tanggal 19 Desember 1949 Panglima Tentara dan Teritorial Sumatera menugaskan Kapten Panjaitan sebagai Kepala Staf Divisi Sumatera dan berkedudukan di Medan.

Sesudah pengakuan kedaulatan tepatnya pada tanggal 2 Januari 1950, Kapten Panjaitan ditunjuk sebagai Kepala Operasi di Medan. Kemudian ia mengalami pergantian dan perubahan jabatan. Yang berlangsung dengan cepat.

Pada tanggal 23 Januari 1952, ia diangkat menjadi Kepala Sie II Staf Teritorium I. Pada tanggal 23 Oktober 1952, Teritorium I (Sumatera utara) ia dipindahkan ke Teritorium II (Sumatera Selatan) dan pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor (sementara). Dalam penugasan itu ia diserahi jabatan sebagai wakil Kepala Staf Teritorium II (Sumatera Selatan). Empat tahun kemudian dengan Surat Keputusan Presiden RI tanggal 1 Januari 1956 pangkatnya ditetapkan menjadi Mayor efektif.

Mayor Panjaitan adalah seorang militer yang selalu haus terhadap ilmu pengetahuan, terutama mengenai ilmu pengetahuan militer. Dengan ketekunan dan usaha sendiri ia melakukan studi berbagai ilmu yang berhubungan erat dengan pengetahuan militer. Setiap waktu yang terluang tidak dilewatkan begitu saja, tetapi dipergunakan untuk memperdalam pengetahuan.

Karena kemampuan dan ketekunannya, pada tanggal 3 April 1956 Mayor Panjaitan ditunjuk untuk mengikuti kursus Milat (Militer Atase) Gelombang pertama. Di tengah kesibukan mengikuti pendidikan itu, yaitu tanggal 1 Juni 1956 pangkatnya dinaikkan setingkat menjadi Letnan Kolonel.

Setelah selesai mengikuti pendidikan, pada tanggal 10 Oktober 1956 Letkol Panjaitan diangkat menjadi Atase Militer untuk menduduki posnya di Bonn, Jerman Barat. Di tempat baru itu ia bertugas selama setahun, kemudian dipanggil kembali ke tanah air pada tanggal 1 Juli 1957. Setibanya di Indonesia ia diserahi tugas baru selaku Perwira Menengah diperbantukan pada Deputy-I KSAD. Dengan jabatan baru itu pangkatnya dinaikkan lagi dari Letkol menjadi Kolonel mulai tanggal 1 Juli 1960[6].

Dua tahun kemudian, yaitu tanggal 1 Juli 1962, Kolonel D.I. Panjaitan ditunjuk untuk menjabat Asisten IV/Men Pangad. Dan semenjak kembali dari Bonn berbagai jabatan penting silih berganti dipegangnya. Pangkat Kolonel hanya berlangsung satu tahun, dan sejak tanggal 1 Juli 1963 pangkat tersebut telah dinaikkan lagi menjadi

---

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, *Pahlawan Revolusi Mayjen TNI Anumerta D.I. Panjaitan*, hal. 103.

Brigadir Jenderal. Ketika menjabat Asisten IV/Men. Pangad itu, Brigjen D.I. Panjaitan mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan *Associate Command and General Staff College* di Fort Leavenworth, Kansas Amerika Serikat dari bulan Desember 1963 sampai dengan Juni 1964[7].

Selesai mengikuti pendidikan di Amerika Serikat pada bulan Juni 1964, ia kembali ke tanah air dan beberapa saat sesudah berada di Indonesia, Brigadir D.I. Panjaitan diserahi kembali memegang jabatannya yang lama sebagai Assisten IV/Men. Pangad.

Ia tetap tenang menjalankan tugasnya dengan baik. Sudah menjadi pembawaannya, ia tidak suka menonjolkan diri. Dalam melaksanakan tugas ia tetap bersemboyan *sepi ing pamrih rame ing gawe*. Ketika masih menjabat pimpinan tingkat Territorium TNI-AD namanya kurang dikenal di luar kalangan ABRI, amanya hampir tidak pernah dimuat oleh pers, atau siaran-siaran resmi, karena ia tidak begitu senang publisitas, tetapi di kalangan ABRI khususnya TNI-AD, namanya cukup populer. Ia dikenal sebagai seorang perwira tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan militer secara luas. Perwira-perwira TNI-AD yang menjadi siswanya di Seskoad Bandung, tidak ada yang mengabaikan kuliah-kuliahnya, karena tinggi mutu ilmiahnya. Juga cara ia memberikan kuliahnya sangat menarik, dengan metode didaktis yang effisien[8].

Sebagai manusia, pemuda Panjaitan tidak luput dari romantika kehidupan anak muda. Merasa romantika adalah bagian dari pada kehidupan manusia secara universal. Pada tanggal 3 September 1946, merupakan hari bersejarah dan mempunyai arti tersendiri dalam kehidupannya dengan gadis pilihannya dari Balige bernama Marike Anie Holomoan. Pemberkatan pernikahan dilangsungkan di hadapan pendeta di suatu gereja di Balige.

Dari pernikahan tersebut ia dianugerahi tiga orang anak, yakni dua orang putri dan seorang putra, yaitu Khaterine Panjaitan, Masye Panjaitan dan Sopar Panjaitan[9].

Dalam kehidupan sehari-hari, Brigjen Panjaitan yang selalu sibuk dengan tugas-tugasnya di kantor, sebagai seorang bapak, ia senantiasa menyediakan waktunya untuk keluarganya di rumah. Sekalipun selalu dalam kesibukan, tetapi pendidikan putra-putrinya tidak lepas dari pengawasannya.

Brigjen D.I. Panjaitan mempunyai seni tersendiri dalam mengatur pribadinya, untuk menghindarkan campur aduknya antara tugas negara dan urusan keluarga. Dengan motto yang dipegang teguh: "Di rumah milik anak-anak, di kantor milik negara" membuat keseimbangan dan keselarasan selaku bapak dan selaku pejabat negara.

7. Pramono et al, *op. cit.*, hal. 76.

8. *Ibid.*, hal. 76.

9. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, *op. cit.*, hal. 109.

Dalam lingkungan keluarga, Brigjen Panjaitan ingin menurunkan bakat dan kesenangannya kepada anak-anaknya. Ia ingin ketiga putra-putrinya bisa mewarisi bakatnya untuk memainkan alat-alat musik seperti piano dan biola. Ia membayangkan anak-anaknya dapat memainkan lagu-lagu klasik yang akan dinikmatinya, karena lagu-lagu tersebut merupakan kegemarannya. Dan sebagai orang terpelajar, kepada anak-anaknya selalu dianjurkan untuk rajin membaca. Dengan rajin dan banyak membaca akan banyak menentukan jalan kehidupan seseorang.

Pada saat-saat terakhir hidupnya, Brigjen Panjaitan mencurahkan perhatiannya pada buku-buku keagamaan. Dari 12 jilid seri buku *Church Dogmatiss* karya Karel Barth, 6 jilid di antaranya telah selesai dibacanya. Hasratnya untuk mendalami dogma-dogma tersebut bukan karena ia memang seorang yang taat beragama, tetapi juga karena keinginannya untuk membantu para pendeta memberi khotbah-khotbah di derah gerilya, selama masa perang kemerdekaan.[10].

Hari itu, 1 Oktober 1965 dinihari rumah Brigjen Panjaitan di Jalan Sultan Hasanuddin Blok M No. 35 Kebayoran Baru didatangi oleh kurang lebih 50 orang bersenjata lengkap dari pasukan Cakrabirawa. Kedatangan mereka ke rumah tersebut adalah atas perintah "Komando G 30 S/PKI" di Lubang Buaya untuk menculik Brigjen Panjaitan hidup atau mati. kira-kira 100 meter dari rumah yang dituju, iring-iringan kendaraan yang terdiri dari 3 truk dan 2 bis dihentikan. Pasukan lalu memblokir Jalan Pattimura dan Iskandarsyah, yakni jalan di sekitar tempat kediaman D.I. Panjaitan.

Kelompok penculikan dipimpin oleh Serda Soekarjo dan mereka langsung menuju rumah Brigjen Panjaitan. Tiga orang masuk melalui pagar halaman sebelah kiri, disusul oleh teman-temannya yang lain. Bunyi langkah-langkah sepatu yang beradu dengan benda-benda keras menimbulkan kegaduhan. Ibu Panjaitan terbangun dan melihat dari jendela kamarnya di tingkat atas, serdadu berpakaian hijau itu berkeliaran di rumahnya dan kemudian Ibu Panjaitan membangunkan suaminya. Selang beberapa saat, gerombolan itu telah menembaki paviliun, sehingga pintunya terbuka. Bunyi tembakan itu membangunkan ketiga orang kemenakan Brigjen Panjaitan yang tidur bersama dalam satu kamar.

Albert Naiborhu yang tertua, segera mengambil pistolnya dan menembak gerombolan itu, tapi malang baginya gerombolan membalas hingga ia roboh seketika. Melihat Albert terkapar, Victor segera mengambil pistol dari tangan kakaknya dan berusaha membalas ke arah gerombolan itu. Tembakan ini mendapat balasan sebanyak tiga kali dan mengenai Victor di bagian limpa dan punggungnya. Victor kemudian roboh ke lantai. Melihat kedua kakaknya sudah roboh dan keadaan kamar gelap akibat matinya lampu, Liling merapatkan dirinya ke lantai, mendekam sambil menahan nafasnya.

10. *Ibid*, hal. 105.

Putra-putra Panjaitan juga terbangun mendengar tembakan-tembakan itu. Mereka berlari ke kamar orang tuanya sambil bertanya dengan suara ketakutan. Brigjen Panjaitan menyuruh putra-putrinya tiarap di lantai, karena diperkirakan adanya bahaya. Karena itu ia mengambil sten dan membuka jendela hendak menembak gerombolan yang ada di bawah, tetapi sten tersebut macet. Tembakan ke arah Brigjen Panjaitan bertubi-tubi datangnya. Sten yang di tangan Panjaitan direbut isterinya dan menutup jendela kembali.

Dengan kekerasan gerombolan itu berhasil masuk paviliun, dan memaksa pembantu rumah tangga untuk menunjukkan letak kamar Brigjen Panjaitan. Pembantu itu dipaksa dan diancam akan dicincang bila tidak menuruti keinginan mereka. Di bawah todongan sangkur pembantu yang sudah ketakutan itu berjalan menuju kamar D.I. Panjaitan melalui serambi rumah.

Sesampainya di anak tangga, salah seorang di antaranya berteriak memerintahkan Brigjen Panjaitan cepat turun, dengan alasan Presiden memanggilnya. Pembantu rumah tersebut kemudian mereka paksa kembali naik ke atas untuk memanggil Brigjen Panjaitan. Pada waktu pembantu menaiki tangga menuju ke atas mereka diiringi dengan tembakan di kiri-kanan kaki pembantu itu, sehingga makin bertambah ketakutannya.

Begitu sampai di dalam kamar, pembantu itu segera merangkul lutut Pak Panjaitan dan meratap agar ia mau turun ke bawah. Jika tidak seisi rumah akan dicincang. Sesaat ia berpikir, karena ragu-ragu. Tapi seketika itu kedengaran teriakan dari bawah dari kemenakannya Victor yang walaupun dalam keadaan luka parah masih berusaha mengingatkan pamannya agar jangan menuruti perintah gerombolan itu.

Victor masih sadar jika pamannya Brigjen Panjaitan akan ditembak pula oleh gerombolan itu. Suatu perjuangan batin berkecamuk dalam pikiran D.I. Panjaitan. Tidak turun mungkin ia selamat tetapi keluarnya sudah dihadang gerombolan yang sudah menunggu di bawah anak tangga kamarnya sambil berteriak-teriak dan melepaskan tembakan yang membabi buta.

Sebagai seorang penganut agama Kristen yang saleh dan taat, ia mempunyai keyakinan bahwa hidup atau matinya manusia ada di tangan Tuhan. D.I. Panjaitan segera mengambil keputusan, apa pun yang terjadi akan dihadapi dengan segala ketabahan. Dikenakan pakaian seragamnya lengkap dengan tanda-tanda jasa yang dipasangkan oleh isterinya. Turunlah Brigjen Panjaitan meninggalkan isteri dan anak-anaknya, memenuhi keinginan buas gerombolan-gerombolan itu. Di pertengahan tangga tiba-tiba ia berhenti dan berpaling ke atas dan melihat kembali kepada keluarganya, seakan-akan mengucapkan "selamat tinggal" kepada anak isteri yang dikasihinya.

Keluarga yang ditinggalkan yang melepaskan kepergiannya dengan pandangan sayup pilu, seolah-olah mereka sendiri sudah merasa, kepergian orang yang mereka cintai itu tidak pernah akan kembali untuk selama-lamanya. Setelah itu dengan langkah yang tetap dan tegap mencerminkan seorang prajurit sejati, Brigjen Panjaitan berjalan menuju pintu dan keluar[11].

Suasana di luar sangat seram dan liar. Brigjen Panjaitan berhenti sejenak di samping mobil dinasnya. Kedua tangannya dirapatkan serta kedua matanya dipejamkan, sambil berdoa memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di saat ia sedang memanjatkan doa itu, gerombolan biadab itu menembaknya. Tembakan pertama diarahkan dan tepat mengenai kepalanya. Topi yang sedang dipakainya dan ia sendiri roboh seketika itu juga ke tanah. Brigjen D.I. Panjaitan gugur sebagai Pahlawan. Peristiwa itu berlangsung dengan cepat, namun sulit dilupakan. Pihak gerombolan rupanya masih belum puas dengan perbuatannya. Mereka kembali menghamburkan pelurunya ke tubuh Brigjen Panjaitan, puluhan peluru menembus tubuhnya.

Jenazah Brigjen Pajaitan mereka seret dan kemudian dilemparkan ke atas truk lewat pintu gerbang. Keperihan dan kesedihan mereka ditinggalkan dengan sangat mendalam. Anak dan isterinya dengan mata kepala sendiri menyaksikan perbuatan yang merenggut nyawa suami dan ayah mereka. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, selain menahan perasaan dan menahan kesedihan melihat perbuatan keji. Kendaraan gerombolan itu telah berlalu, putra-putri Pak Panjaitan turun ke bawah memungut topi pet peninggalan terakhir ayah tercinta mereka.

Jenazah almarhum Brigjen Panjatan beserta kelima Perwira Tinggi dan seorang Perwira Pertama lainnya baru diketemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 sore dalam sebuah sumur tua kecil yang dalam di Lubang Buaya. Jenazah mereka diketemukan dalam keadaan yang rusak[12].

Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang telah rela berkorban untuk membela cita-cita Pancasila, Pemerintah telah memberikan penghormatan dengan kenaikan pangkat satu tingkat, yakni dari Brigjen menjadi Mayor Jenderal Anumerta. Penghargaan tertinggi diberikan pemerintah kepadanya berupa gelar Pahlawan Revolusi[13].

---

11. Pramono et al, *op. cit.*, hal. 79.
12. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, *op. cit.*, hal. 108.
13. Pramono et al. *op. cit.*, hal. 80.

BAB II
PERJUANGAN D.I. PANJAITAN PADA ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG

Jepang merupakan negara di benua Asia yang tidak mengalami penjajahan oleh bangsa Barat. Sebenarnya bangsa Jepang sudah berhubungan dengan bangsa-bangsa Barat pada zaman Syogun Tokugawa dan dengan Commodore Perry (1853). Tetapi hubungan yang intensif barulah dilakukan sesudah Restorasi Meiji. Pada waktu itu bangsa-bangsa Barat telah memasuki zaman modern. Akibat perhubungan dengan bangsa-bangsa Barat itu bangsa Jepang juga berkenalan dengan peradaban modern.

Dalam waktu yang pendek sejak Restorasi Meiji 1968, bangsa Jepang yang terkenal rajin, tekun bekerja dan kuat menderita telah dapat mengoper peradaban modern dari dunia Barat. Mereka mendatangkan ahli-ahli teknik dari Barat dan mengirim mahasiswanya untuk belajar di luar negeri. Dalam waktu yang pendek bangsa Jepang telah dapat menyamai bangsa-bangsa Barat dalam bidang teknik.

Dalam bidang material (teknologi) bangsa Jepang mencontoh bangsa Barat, tetapi dalam bidang spiritual (kerokhanian) mereka tetap orang Jepang. Budaya rohaniah Jepang tetap tidak berobah. Jepang berhasil mengawinkan budaya warisan nenek moyang dengan teknologi Barat. Pada lahirnya mereka mencontoh tata hidup dan tata karya Barat, tetapi pada batinnya mereka tetap orang Jepang yang memegang teguh adat istiadat lama.[1].

Setelah berhasil menjadi negara industri modern, maka Jepang membutuhkan daerah untuk memperoleh bahan-bahan mentahnya maupun untuk menjual hasil barangnya. Daerah yang diinginkan oleh Jepang adalah negara-negara Asia, yang pada waktu itu telah dijajah atau setidak-tidaknya dikuasai ekonominya oleh bangsa-bangsa Barat. Untuk mendapatkan daerah Asia yang kaya dan padat penduduknya itu, maka Jepang harus merebutnya dengan kekerasan dari bangsa-bangsa Barat.

Perang perebutan jajahan antara Jepang dengan negara-negara Barat di Asia yang berlangsung selama kurang lebih 3½ tahun (1941 — 1945) dinamai Perang Pasifik sedangkan orang Jepang menyebutnya Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbor yakni pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan perang dengan Jepang. Kemudian Jepang mulai bergerak ke Selatan dengan taktik gerak cepat. Dalam jangka waktu kurang lebih 100 hari

---

1. M.D. Mansoer et al, *Sejarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta 1970, hal. 20.

Jepang berhasil menumbangkan kekuasaan kolonial Inggris di Malaya dan Birma, Amerika Serikat di Filipina dan Belanda di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942[2].

Sejak saat itu berakhirlah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan Jepang. Berbeda dengan Zaman Hindia Belanda di mana terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada zaman Jepang terdapat pemerintahan militer pendudukan. Pulau Jawa dan Sumatra diperintah oleh Angkatan Darat, sedangkan daerah Indonesia lainnya diperintah oleh Angkatan Laut Jepang.

Sesuai dengan keadaan perang, maka pemerintah militer Jepang tidak membolehkan berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Kalau pada saat-saat terakhir Hindia Belanda, masih dibolehkan partai politik kooperasi, maka pada zaman Jepang semua partai dibubarkan. Kegiatan Politik dan pergerakan nasional Indonesia dikendalikan oleh Jepang, dan bertujuan untuk membantu Jepang dalam perang, Jepang berusaha mengerahkan semua orang Asia untuk usaha perangnya. Jawatan propaganda Jepang giat melancarkan propaganda yang pokoknya adalah bahwa Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya untuk membebaskan seluruh Asia dari penjajahan Barat dan mempersatukannya di dalam "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" di bawah pimpinan Jepang. Kantor Propaganda Jepang kemudian mendirikan "Pergerakan Tiga A" yang berdasarkan bersemboyan: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia (Orang Jepang menamakan bangsa dan negerinya "Nippon").

Pergerakan Tiga A mengadakan kursus-kursus untuk pemuda dengan tujuan menanamkan semangat pro Jepang. Pergerakan Tiga A ini dipimpin oleh Mr. Sjamsuddin, bekas anggota Parindra waktu zaman Hindia Belanda.

Pergerakan Tiga A tidak begitu mendapatkan hasil karena organisasi ini tidak dipimpin oleh pemimpin Indonesia terkemuka. Pemerintah militer Jepang memerlukan dukungan penduduk dan untuk itu diperlukan kerjasama dengan tokoh-tokoh nasional terkemuka. Tokoh-tokoh nasional seperti Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta telah dibebaskan oleh pemerintah militer Jepang dari tawanan pemerintah Hindia Belanda. Kedua pemimpin itu yang pada zaman Hindia Belanda bersikap non kooperasi, pada zaman Jepang terpaksa bekerjasama dengan pertimbangan bahwa untuk menghadapi pemerintah pendudukan Jepang yang kejam itu rakyat perlu mempunyai pemimpin. Sukarno dan Hatta mengubah taktik mereka, dan berusaha memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Jepang untuk perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan.

2. Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Menteng Raya 31 dalam Perjuangan Kemerdekaan*. Dinas Museum dan Sejarah DKI, Jakarta 1973, hal. 20.

Pemimpin lainnya seperti Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin dapat menghindari kerjasama dengan Jepang, karena mereka kurang dikenal. Amir Sjarifuddin kemudian ditangkap oleh Jepang dan akan dijatuhi hukuman mati karena dituduh menjadi mata-mata Sekutu. Berkat usaha Sukarno dan Hatta, Amir Sjarifuddin berhasil diselamatkan dari hukuman mati[3].

Setelah Pergerakan Tiga A dianggap tidak memberikan keuntungan oleh Jepang, maka organisasi ini dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk "Pusat Tenaga Rakyat" (PUTERA) yang diresmikan pada tanggal 1 Maret 1943. PUTERA dipimpin oleh Empat Serangkai Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K.M. Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara. Kerjasama dengan Jepang ini kemudian diikuti oleh golongan nasionalis lainnya seperti Mr. Supomo, Mr. Subarjo dan Dr. Ratulangi.

Pemerintah Jepang ingin mempergunakan tokoh pergerakan nasional Indonesia sebagai simbol untuk membangkitkan semangat dan perasaan anti bangsa kulit putih. Masalah warna kulit (rasial) ditonjolkan oleh Jepang untuk mendapatkan dukungan secepatnya dari rakyat Indonesia. Tujuan PUTERA bagi Jepang adalah untuk memusatkan seluruh kekuatan masyarakat dalam membantu usaha Jepang. Tugas memimpin PUTERA adalah memimpin rakyat supaya kuat rasa kewajiban dan tanggung jawabnya menghapuskan pengaruh Barat. Rakyat Indonesia harus mengambil bahagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya dan memperdalam persaudaraan Indonesia — Jepang dengan menggiatkan pelajaran bahasa Jepang.

PUTERA disusun mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah terutama di Jawa. Empat Serangkai dianggap oleh Jepang sebagai lambang dari aliran di dalam pergerakan nasional Indonesia, yang menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk kepentingannya. Dalam pada itu pemimpin-pemimpin PUTERA bertujuan untuk mempersiapkan rakyat Indonesia guna merdeka, yang menurut perhitungan mereka besar kemungkinannya akan tercapai pada akhir Perang Dunia II. Pada permulaan berdirinya, PUTERA mendapat sambutan dari organisasi-organisasi yang ada.

Persatuan Guru Indonesia dengan 15.000 anggotanya. Perkumpulan Pos Telepon dan Telegraf, dan Pengurus Besar Puteri Indonesia di bawah pimpinan Mr. Maria Ulfah Santoso menyatakan bergabung dengan PUTERA. Dari kalangan organisasi Pemuda yang pertama kali bergabung dengan PUTERA adalah Barisan Banteng. Ikatan Sport Indonesia (ISI) juga mengikuti organisasi-organisasi lainnya bergabung dengan PUTERA. Dari kalangan pelajar, Badan Perantaraan pelajar-Pelajar Indonesia (BAPERPI) di bawah pimpinan Supeno yang menyatakan dan bergabung dengan PUTERA[4].

3. Mohammad Hatta, *Memoir*, Tintamas Jakarta 1978, hal. 407.

4. Nugroho Notosusanto (Editor), *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Balai Pustaka Jakarta, 1977, hal. 165.

Walaupun organisasi ini didirikan oleh pemerintah, bantuan keuangan dari pemerintah sangat kurang sehingga untuk menghidupkannya PUTRA harus mengumpulkan iuran dari para anggota. Dengan demikian PUTERA berhasil mendekati rakyat, dan para pemimpin dapat mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan dan dengan rapat-rapat raksasa, pemimpin Indonesia dapat mencapai rakyat secara luas. Akhirnya pihak Jepang menyadari bahwa PUTERA lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia dari pada bagi Jepang sendiri.

Perkembangan dan kegiatan PUTERA dinilai kurang memuaskan oleh Jepang, karena kurang menunjukkan dukungan kepada pemerintah pendudukan Jepang. Karena itu mereka mulai memikirkan pembentukan organisasi baru, yang mencakup semua golongan masyarakat.

Pada tahun 1944 Panglima Tentara Jepang yang menduduki Jawa menyatakan berdirinya organisasi *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa). Dalam situasi perang yang makin menghebat, semangat kebaktian yaitu mengorbankan diri mempertebal persaudaraan dan melaksanakan tugas untuk Jepang harus mungkin dipupuk. Berbeda dengan PUTERA maka *Jawa Hokokai* secara terang-terangan dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah.

Pemimpin PUTERA dipegang oleh tokoh Indonesia sedangkan pimpinan *Jawa Hokokai* langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang dan sampai ke daerah pimpinan *Jawa Hokokai* tetap dipegang dan diawasi oleh Jepang.

Yag diterima menjadi anggota adalah pemuda-pemuda yang telah berumur 14 tahun bagi bangsa Indonesia, sedangkan bagi bangsa Jepang harus terdiri dari pegawai negeri dan kalau bukan pegawai negeri harus mengajukan permohonan kepada penguasa setempat. Bagi orang Cina dan Eropa terlebih dahulu harus diteliti kalau ingin jadi anggota Jawa *Hokokai*. Jawa *Hokokai* merupakan organisasi pusat yang mempunyai bidang kegiatannya seperti guru, wanita serta organisasi budaya dan perusahaan.

Jawa *Hokokai* juga bertugas mengerahkan rakyat mengumpulkan padi, permata, besi tua dan lain-lain barang berharga serta menanam jarak untuk minyak pelumas guna diserahkan kepada Jepang. Pengendalian terhadap kegiatan orang Indonesia dilakukan dengan sangat ketat oleh Jepang. Semua kegiatan lebih-lebih kegiatan politik harus diketahui dan dipimpin oleh Jepang serta dipergunakan untuk kepentingan mereka.

Dalam pada itu organisasi Islam yang tidak melakukan kegiatan politik dibiarkan oleh Jepang, seperti "Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Jepang menghargai golongan Islam karena golongan ini dinilai oleh Jepang yang paling anti Barat. MIAI harus turut bekerja dengan sekuat tenaga untuk mencapai "Lingkungan Kemakmuran

Bersama'' di bawah pimpinan Jepang sedangkan pemimpin MIAI diserahkan kepada Wondoamiseno dan K.H. Mas Mansur. Jepang menggerakkan tenaganya untuk membantu kegiatan MIAI seperti mengumpulkan zakat dan mendirikan masjid. Bantuan Jepang ini berhasil dimanfaatkan pemuda Islam untuk kepentingan umat Islam di Indonesia. MIAI sebagai organisasi tunggal mendapat simpati yang luar biasa dari umat Islam Indonesia. Setelah MIAI menjadi besar, maka pemerintah Jepang mulai curiga sehingga kegiatannya mulai diawasi. Pada akhir 1943 MIAI telah resmi dibubarkan, dan sebagai gantinya dibentuk ''Majelis Sjuro Muslimin Indonesia'' (MASJUMI) yang dipimpin oleh K.M. Hasyim Asyhari dan K.H. Mas Mansur. Secara lahiriah pemerintah Jepang berhasil menindas pergerakan Indonesia, tetapi secara batiniah pergerakan nasional Indonesia semakin subur. Semangat dan kesadaran nasional semakin meningkat pada zaman pendudukan Jepang ini.

Kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1943 sudah berubah. Mereka yang sebelumnya berada di pihak penyerang sekarang beralih ke pihak yang bertahan. Pukulan-pukulan Serikat di daerah Pasifik mulai berat dirasakan. Jepang menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan daerah pendudukannya yang luas, mereka memerlukan dukungan dari penduduknya masing-masing. Itulah sebabnya di Indonesia Jepang mulai giat mengerahkan kaum muda Indonesia untuk membantu usaha Perang Asia Timur Raya. Rakyat Indonesia harus pula dipersiapkan secara fisik untuk menghadapi kedatangan Serikat di Indonesia.

Untuk itu pada tanggal 9 Maret 1943 didirikan organisasi semi militer yang dinamai *Seinendan* yang berarti Barisan Pemuda. Pemuda yang diperbolehkan masuk menjadi anggota *Seinendan* berumur 14 sampai 22 tahun. Secara resmi disebutkan bahwa tujuan pembentukan *Seinendan* adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda untuk dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Maksud sebenarnya dari Jepang adalah untuk mempersiapkan pemuda Indonesia membantu Jepang menghadapi serbuan Serikat. Pengerahan tenaga untuk perang ini bukan hanya dipergunakan bagi kaum laki-laki, tetapi kaum wanita pun diikutsertakan. Untuk keperluan itu maka dalam bulan Agustus 1943 dibentuk *Fujinkai* (Himpunan Wanita), yang dapat dimasuki oleh seluruh wanita yang telah berumur 15 tahun ke atas dan kepada kaum wanita itu pun diberikan latihan-latihan militer.

Di samping itu para pemuda ada juga yang dimasukkan ke dalam kelompok khusus untuk mendapatkan pendidikan membantu tugas-tugas kepolisian. Kelompok khusus ini disebut *Keibodan* yang berarti ''Barisan Bantuan Polisi''. Umur anggota *Keibodan* lebih tua dari umur anggota *Seinendan* yaitu antara 23 sampai 25 tahun dan yang dapat diterima menjadi anggota *Keibodan* adalah semua laki-laki yang berasal dari tiap desa. Para anggota Keibodan diusahakan oleh

Jepang agar tidak mendapat pengaruh dari golongan nasionalis. *Keibodan* dibentuk di desa-desa di mana golongan nasionalis kurang mendapat pengaruh. Badan ini langsung di bawah pengawasan polisi, dan pengawasan terhadap badan ini dilakukan secara ketat sekali, yang berbeda dengan *Seinendan*. Dalam badan ini golongan nasionalis dapat menanamkan pengaruhnya dan dengan demikian mereka dapat mengisi jiwa pemuda dan semangat nasionalisme.

Selain di Pulau Jawa, kedua badan ini juga dibentuk di Pulau Sumatera dan daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut. Di Sumatera *Keibodan* terkenal dengan nama *Bogodan*, dan di Kalimantan terkenal dengan nama Borneo *Konen Hokukudan*. Di daerah Sumatera dan daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut tidak terdapat markas pusat *Keibodan* dan *Seinendan*. Tiap-tiap daerah langsung memimpin organisasi-organisasi sendiri. *Seinendan* dan *Keibodan* dibentuk di seluruh pelosok Indonesia sampai ke daerah terkecil sekaligus, walaupun dengan cara yang berlain-lainan.

Selain dari kedua organisasi tersebut, juga dibentuk suatu organisasi dari Pemuda Islam yang dinamai Hizbullah. Sebagai barisan pemuda organisasi ini juga mendapat latihan militer seperti *Seinendan* dan *Keibodan*. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya perorganisasian pemuda secara besar-besaran seperti pada zaman pendudukan Jepang ini.

Memasuki tahun 1944 keadaan Perang Pasifik bagi Jepang semakin sulit, satu demi satu daerah pendudukan Jepang jatuh ke tangan Serikat, bahkan serangannya mulai diarahkan ke negeri Jepang sendiri. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 14 September 1944 dibentuk Barisan Pelopor sebagai bagian dari *Jawa Hokokai*. Barisan Pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama yang berlangsung dibimbing oleh kaum nasionalis. Pemimpin barisan ini adalah Ir. Sukarno dengan dibantu oleh R.P. Suroso dan Oto Iskandar Dinata serta Buntaran Martoatmojo. Barisan pelopor *mmpergunakan latihan-latihannya*. Barisan pelopor juga dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari para pemimpin nasionalis. Mereka juga dilatih tentang cara menggerakkan massa rakyat dan memperkuat pertahanan.

Melalui Barisan Pelopor, golongan pemuda terpelajar berusaha mempengaruhi rakyat. Mereka menyesuaikan diri dengan keinginan rakyat serta mengobarkan semangat nasional dan rasa persaudaraan. Sejak Jepang mengalami kemunduran di semua front, mereka memerlukan tambahan tenaga militer untuk menggantikan pasukan-pasukannya yang hancur. Karena tenaga manusia Jepang sendiri sudah habis, mereka terpaksa mengerahkan tenaga dari kalangan rakyat yang negerinya mereka duduki. Sehubungan dengan itu maka pada bulan *April 1943* dikeluarkan pengumuman yang memberi sudah kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang yang dinamai *Heiho*. Para anggota *Heiho* ini

langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Syarat-syarat penerimaan adalah mereka yang berbadan sehat, berkelakuan baik, berumur antara 12 dan 25 tahun dan pendidikan terendah adalah Sekolah Dasar. Walaupun kedudukan *Heiho* ini pada dasarnya hanya pembantu Prajurit, tetapi kemudian ketika perang semakin menghebat mereka diberikan pula senjata. Dalam perkembangan selanjutnya Heiho ini dianggap sebagai bahagian dari Angkatan Perang Jepang. Mereka turut bertempur dalam berbagai front menghadapi tentara Serikat. Banyak di antara anggota *Heiho* yang dikirim bertempur ke luar negeri seperti di Selomon dan Birma.

Sesuai dengan tuntutan perang yang makin mendesak, pemerintahan pendudukan Jepang juga membentuk Tentara Sukarelawan Pembela Tanah Air (PETA). Pada anggal *3 Oktober 1943* Panglima Tentara Jepang di Jawa memaklumkan pembentukan PETA. Sebagai tindak lanjut pengumuman itu maka mulailah dilatih puluhan calon perwira PETA di kota Bogor. Setelah lulus mereka diangkat masing-masing menjadi *Daidanco* (Komandan Batalyon) *Cudanco* (Komandan Kompi) dan *Syodanco* (Komandan Peleton). Ada pula yang didik menjadi *Buhdanco* (Komandan Regu).

Sesuai dengan pembentukan PETA di Pulau Jawa, maka di pulau Sumatera dibentuk *Giyugun* (Tentara Sukarela), dan dari Tentara Sukarela timbul suatu golongan yang memperoleh pendidikan militer pada zaman pendudukan Jepang. Mereka menjadi golongan penting dalam masyarakat Indonesia dan sesudah Indonesia merdeka banyak di antara mereka yang menjadi Pemimpin Tentara Nasional Indonesia (TNI), seperti Ahmad Yani, D.I. Panjaitan dan masih banyak lagi. Kalau Heiho adalah bagian dari tentara Jepang, maka PETA adalah Tentara Indonesia yang dilatih oleh Jepang. Jepang mengharapkan organisasi militer maupun semi militer Indonesia itu membantu mereka memenangkan Perang Asia Timur Raya. Harapan Jepang sebahagian besar tidak terlaksana, karena para pemimpin Indonesia bekerja sama dengan Jepang berhasil menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Lebih-lebih pemuda hasil didikan PETA, yang kebanyakan terdiri dari pelajar-pelajar sekolah, dapat menangkap apa yang tersirat dari apa yang tersurat oleh para pemimpinnya.

Pada zaman pendudukan Jepang daerah Riau dan kepulauan dijadikan salah satu "kamp interniren" untuk tawanan bangsa Belanda, Inggris dan India yang jumlahnya meliputi ribuan orang yang sebahagian besar diangkut dari Malaya. Di kota Bangkinang terdapat pula satu kamp interniren dan di sana ditempatkan ribuan wanita dan anak-anak yang dikumpulkan dari beberapa tempat di pulau Sumatera.

Sementara itu di sepanjang daerah Teluk Kuantan Logas sampai ke Buatan terdapat pula beberapa ribu tawanan bekas tentara Inggris dan Belanda bersama-sama dengan tawanan lainnya dan para *romusha* yaitu pekerja paksa bangsa Indonesia. Mereka disuruh secara paksa memasang rel kereta api Teluk Kuantan-Logas dan seterusnya. Pemasangan rel kereta api ini merupakan suatu kerja paksa yang luar biasa kejamnya. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa jalan kereta api yang panjangnya 100 km tersebut, tiap-tiap bantalan kereta api yang diletakkan akan memakan korban dua atau tiga orang. Para korban itu bukan hanya terdiri dari para romusha, tetapi juga bekas tentara Inggris dan Belanda akibat kelaparan dan penyakit malaria dan lain-lain.

Dalam situasi yang demikian di daerah Riau, maka D.I. Panjaitan datang di daerah itu pada tahun 1943. Mula-mula ia bekerja sebagai Kepala Pembukuan (*Accounting*) di perusahaan *Ataka* Sangyo Keboshihi Kaisha di Siak Sri Indrapura. Di daerah Riau perusahaan itu merupakan satu pabrik kapal-kapal kayu berkekuatan 200 ton di Penglong XI dekat Buatan. Perusahaan ini merupakan satu industri besar dengan pengambilan kayu-kayu dari hutan, dan untuk keperluan ini dikerjakan sebanyak 500 orang *romusha* yang didatangkan dari Jawa.

Sebagai salah seorang karyawan di pabrik itu, D.I. Panjaitan setiap harinya melihat dan menyaksikan bahwa tiap pagi sebelum para *romusha* bekerja, mereka terlebih dahulu diperintahkan untuk menggali lubang sepanjang 10 meter. Pada mulanya tak ada yang mengetahui untuk apa lobang tersebut, barulah sesudah sore hari lobang yang digali pagi itu telah penuh dengan mayat *romusha* yang telah mati. Mereka mati karena kelaparan, kelelahan karena kerja paksa yang sangat berat di mana tubuh mereka telah bagaikan tengkorak berjalan. Malahan yang dikubur itu bukan hanya orang yang telah mati tetapi para romusha yang masih bernafas walaupun belum mati juga dimasukkan ke dalam lubang yang pada sore harinya ditutupi.

Melihat kekejaman yang di luar batas peri kemanusiaan dari Jepang maka timbul niat dan keinginan dari D.I. Panjaitan untuk memasuki pendidikan *Giyugun* dengan tekad untuk suatu masa dapat mengadakan pembalasan terhadap Jepang[5].

Sebagaimana halnya dengan pembentukan PETA di Jawa maka di Sumatera dibentuk *Giyugun* dan pembentukan Badan ini berdasarkan perintah dari *Bunseri Kan Kaka* (Gubernur Jenderal) Jepang pada tanggal 14 Januari 1944[6].

5. "Pahlawan Revolusi Donald Izach Panjaitan, *Wawancara terakhir sebelum gugur*," *Ragi Buana* No. 21 Jakarta 21 Oktober 1965, hal. 6 — 7.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, *Pahlawan Revolusi Mayjen TNI Anumerta D.I. Panjaitan*, halaman 102.

D.I. Panjaitan sebagai seorang pemuda yang baru menyelesaikan M.U.L.O di Tarutung dan sudah bekerja juga, juga ikut memasuki pendidikan *Giyugun* di Bukittinggi di Sumatera Barat. Lembaga pendidikan PETA maupun *Giyugun* selalu dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk menanamkan perasaan nasional kepada para pemuda. Begitu juga lembaga pendidikan *Giyugun* di Bukittinggi pernah mendapat kunjungan dari Mohammad Sjafei, tokoh pendidikan INS dari Kayutanam Sumatera Barat dalam kedudukan beliau sebagai Kepala Penerangan (*Sendenhan*) di Sumatera Tengah. Dalam dua kali kunjungan yang dilakukan oleh Mohammad Sjafei, beliau selalu memberikan ceramah yang menguraikan soal-soal pergerakan menuju kemerdekaan bangsa dan tanah air dan menjelaskan tugas para calon perwira di masa yang akan datang. D.I. Panjaitan sebagai salah seorang siswa *Giyugun* selalu memperhatikan dan mengikuti ceramah-ceramah dari pada pemimpin seperti Mohammad Sjafei.

Lama kelamaan kesadaran nasional dari pada siswa *Giyugun* makin tumbuh dan berkembang. Pengetahuan mereka mengenai keadaan Indonesia makin banyak. Mereka juga mengetahui perlawanan yang dilakukan terhadap Jepang seperti pemberontakan PETA di Blitar.

Setelah selesai pendidikan, maka D.I. Panjaitan ditempatkan di Pekanbaru daerah Riau dan diangkat sebagai anggota *Giyuhei Dai Dan Hobu* (Prajurit Staf). Secara berbisik-bisik D.I. Panjaitan dengan teman-temannya membicarakan pemberontakan *PETA di Blitar* dan tindakan Jepang melucuti senjata kesatuan *Giyugun di Pangkalan Brandan Sumatera Utara*. *Kegiatan para prajurit Giyugun* ini kemudian dapat diketahui oleh Jepang. Untuk menghindarkan perlawanan dari pada prajurit *Giyugun* di Pekanbaru, maka akhirnya Jepang mengumpulkan semua senjata yang ada di tangan para prajurit Indonesia. Tindakan Jepang ini lebih menimbulkan keyakinan lagi kepada D.I. Panjaitan dan kawan-kawannya akan adanya perlawanan terhadap Jepang di daerah lain.

Pada suatu pagi Komandan Batalyon di mana D.I. Panjaitan ditempatkan yang bernama Kolonel Kobayashi mengadakan apel. Dalam apel itu ia menceriterakan suatu subordinasi tentara Tiongkok di mana digambarkannya hukuman-hukuman mati yang kejam yang dijatuhkan kepada tentara yang berontak itu. Dengan sengaja diuraikan kejadian itu untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia umumnya dan perwira muda *Giyugun* pada khususnya. Tetapi kejadian yang diceriterakan Komandan Batalyon itu menjadi perhatian dari para perwira *Giyugun*, dan kemudian mereka diskusikan secara mendalam untuk mengambil kesimpulan mengenai situasi Perang Pasifik.

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 diadakan lagi apel pagi pada jam 5.30 oleh Komandan Batalyon sebagaimana biasanya. Apel ini juga dihadiri oleh seluruh tentara Jepang mulai dari Komandan Batalyon sampai kepada bawahannya. Tetapi akhirnya acara dimundurkan sampai jam 7.00 pagi. Para perwira Jepang menghadiri apel itu kelihatan mata mereka merah dan bengkak karena rupanya mereka menangis sepanjang malam. Kemudian tanpa penjelasan satu apa pun para perwira *Giyugun* diperintahkan untuk mengumpulkan semua perlengkapan tentara untuk dikembalikan kepada Jepang. Sesudah itu para perwira muda *Giyugun* diberikan sedikit uang oleh Jepang dan disuruh kembali ke daerah masing-masing. Semenjak kejadian itu latihan-latihan menjadi sepi dan kejadian itu juga menyebabkan para perwira semakin bertanya-tanya dan mencoba menganalisa dan mengambil kesimpulan sendiri. Sementara itu penjagaan di semua kesatuan Jepang dilipatkan (*double guard*) dengan bayonet-bayonet terhunus.

Para Perwira *Giyugun* dan juga *Heiho* yang baru dibubarkan tidak tahu apa yang akan dikerjakan lagi, karena diliputi oleh perasaa bimbang, terutama mengenai situasi pada waktu itu. Mereka berkeliaran di kota Pekanbaru, Rengat, Teluk Kuantan, Bengkalis, Selat Panjang dan Siak Sri Indrapura dan tempat-tempat lainnya di daerah Riau sampai mereka mengetahui adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.[7].

---

7. *Op. cit.*, Majalah *Ragi Buana* No. 21 Oktober 1965 hal. 4 s

BAB III
PERJUANGAN D.I. PANJAITAN ZAMAN KEMERDEKAAN

1. Pengabdian diri Balai Angkatan Bersenjata

Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan di rumah Ir. Sukarno di Pegangsaan Timur No. 56 untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Lebih kurang seribu orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting itu. Pada pukul 10.00 kurang lima menit Hatta datang dan langsung masuk kamar Sukarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan, dan acara segera dimulai tepat jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sukarno tampil ke depan mikrofon yang sudah disiapkan dan sesudah memberikan kata pengantar, lalu membacakan naskah Proklamasi hasil ketikan yang sudah ditanda-tangani Ir. Sukarno bersama dengan Drs. Moh. Hatta.:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, tanggal 17 bulan 8 Tahoen '45
Atas nama bangsa Indonesia
Sukarno — Hatta[1]

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengadakan sidangnya yang pertama dan dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting.

1. Mengesahkan berlakunya Undang-Undang Dasar (UUD), yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh *Dokuritsu Jumbi Cosakai* dan kemudian UUD itu dikenal dengan nama UUD 1945.
2. Memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
3. Dalam masa peralihan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional yang anggotanya sebagian besar terdiri dari anggota PPKI.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden dan Wakil Presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk Komite Nasional Pusat (KNIP) dan

---

1 Iwa Kusuma Sumateri, *Sejarah Revolusi Indonesia, Masa Revolusi Bersenjata*, Grafika Jakarta, hal. 9.

KNIP berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Sejak hari itu sampai awal September 1945 Presiden dan Wakil Presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 Departemen. Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi 8 Propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur.

Untuk menjaga keamanan telah dibentuk "Badan Keamanan Rakyat" (BKR) pada masing-masing daerah. Pemerintah dengan sengaja tidak mau segera membentuk suatu tentara nasional, karena khawatir bahwa hal itu justru akan menimbulkan *kecurigaan* dan *sikap bermusuhan* dari pihak Serikat, sebagian pemuda merasa tidak puas dengan kebijaksanaan ini. Mereka tadinya mengharapkan agar pemerintah segera membentuk sebuah tentara Nasional sebagai tulang-punggung negara yang baru yaitu dan golongan pemuda yang tidak puas ini segera membentuk Badan-Badan Perjuangan. Sebaliknya Pemuda-Pemuda bekas Peta *Heiho* dan KNIL memasuki BKR di daerahnya masing-masing dan menjadikan Badan itu alat bagi perjuangan bersenjata menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Mereka juga menganggap dirinya pejuang sama dengan pemuda-pemuda lainnya.

Pada zaman pendudukan Jepang seluruh potensi ekonomi Indonesia diarahkan kepada kepentingan perang, dan Republik Indonesia yang baru berdiri mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari Zaman Pendudukan Jepang. Inflasi yang hebat segera menimpa negara yang baru berumur beberapa hari itu. Sumber inflasi adalah beredarnya uang rupiah Jepang secara tidak terkendali, sedangkan Republik belum dapat menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku, karena belum memiliki uang sendiri sebagai penggantinya. Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk sangat kurang, sedangkan pengeluaran negara semakin bertambah. Untuk sementara waktu pemerintah mengambil kebijaksanaan mengakui beberapa macam uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI yakni: Uang *De Javasche Bank*, uang Pemerintah Hindia Belanda dan uang Jepang.

Keadaan yang sulit ini ditambah lagi dengan dilakukannya blokade laut oleh Belanda. Mereka menutup pintu keluar masuk perdagangan RI, sehingga barang-barang RI, tidak dapat diekspor. Walaupun kas RI menjadi kosong karena tindakan Belanda itu, tetapi pemerintah RI. Tetap berdiri dengan tegapnya. Pemerintah RI berusaha dengan keras untuk mengatasi keuangan yang semakin gawat ini. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pinjaman nasional. Pada bulan Juli 1946 penduduk Jawa dan Madura diwajibkan menyetorkan uang kepada Bank Tabungan Pos dan Rumah Pegadaian. Instruksi pemerintah ini mendapat sambutan sehingga jumlah uang terkumpul meliputi 500 juta rupiah. Jumlah se-

banyak ini tentu menambah kas pemerintah dan juga menunjukkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan aparatnya.

Dalam pada itu pihak Serikat mengumumkan berlakunya uang NICA sebagai pengganti uang Jepang. Pemerintah menyarankan kepada rakyat untuk tidak menggunakan uang Nica sebagai alat pembayaran. Selanjutnya pemerintah pada bulan Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas Republik Indonesia yang terkenal dengan nama ORI. Karena uang Jepang telah merosot harganya maka nilai tukarnya disesuaikan yaitu 1000 rupiah uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah uang ORI. Dalam pada itu perekonomian Indonesia semakin payah. Pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluaran.

Hasil produksi pertanian dan perkebunan sebahagian besar tidak dapat diekspor, pemerintah semata-mata tergantung pada produksi pertanian. Produksi merupakan dasar pokok dari pada kehidupan ekonomi Indonesia. Bahkan pada waktu itu hasil pertanian Indonesia mencapai surplus sebanyak 400.000 ton beras. itulah sebabnya pemerintah memberikan bantuan India yang sedang dilanda oleh bahaya kelaparan seanyak 500.000 ton, dan tindakan pemerintah ini lebih didasarkan kepada segi kemanusiaan. Namun secara politis tindakan tersebut menegakkan kehadiran Republik Indonesia di dunia, apalagi India paling aktif membantu perjuangan Indonesia di forum Internasional, terutama dalam rangka solidaritas bangsa-bangsa Asia.

Usaha lain dari pemerintah adalah mengadakan hubungan langsung dengan luar negeri antara lain dengan mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika. Tetapi karena kekuatannya blokade Belanda maka sebahagian dari kapal dagang swasta yang dikirimkan itu ditangkap oleh Belanda. Sebagai jalan keluar maka pemerintah mengalihkan kegiatan perdagangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. *Selama tahun 1946 pelabuhan di Sumatera yang dikuasai penuh oleh Belanda baru pelabuhan Belanda saja.* Dari Sumatera terutama daerah Riau banyak diekspor karet ke Singapura dalam jumlah yang besar, hasilnya ikut membantu keuangan pemerintah. juga diusahakan kembali pabrik-pabrik gula yang menghasilkan bahan ekspor terpenting. Hasil ekspor gula kemudian ditukar dengan kebutuhan seperti pakaian dari luar negeri. Seluruh perkebunan bekas milik Belanda dan Jepang diusahakan kembali oleh pemerintah untuk ikut memperbaiki ekonomi Indonesia.

Dalam pada itu pemerintah menggiatkan kembali bidang perdagangan, impor hanya dibatasi pada barang yang penting saja seperti bahan pakaian, bahan baku untuk industri dan alat transpor. Ekspor meliputi hasil perkebunan, hasil hutan dan tambang. Karena pengaturan ekonomi Indonesia didasarkan kepada pasal 33 UUD 45, maka semua perusahaan yang vital dikuasai oleh negara, pemerintah juga mengawasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk kegiatan swasta.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan terjadi perubahan kehidupan sosial-budaya dalam masyarakat Indonesia. Susunan masyarakat ko-

lonial Hindia Belanda, menempatkan Belanda sebagai warganegara kelas satu, kemudian diikuti dengan golongan Timur Asing dan terakhir barulah masyarakat Indonesia sebagai warga negara kelas tiga. Pada zaman pendudukan Jepang, Jepang muncul sebagai warganegara kelas satu, Masyarakat Indonesia menjadi warganegara kelas dua, sedangkan golongan Cina dan Indo Eropa menjadi warganegara kelas tiga[2].

Kemerdekaan Indonesia telah mengangkat orang Indonesia, tetapi Republik Indonesia tidak membedakan ras, keyakinan agama dan kesukuan. Seluruh rakyat mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama pula Indonesia Merdeka tidak mengenal adanya warganegara kelas satu, dua dan tiga seperti zaman Hindia Belanda maupun zaman pendudukan Jepang. Perkembangan agama mendapatkan tempat yang wajar dalam negara Republik Indonesia, dalam susunan pemerintahan terdapat satu Departemen Agama. Perasaan toleransi di antara penganut agama di Indonesia ditumbuhkan dengan wajar, pemerintah tidak menginginkan adanya pertentangan agama yang dapat melemahkan persatuan nasional.

Salah satu syarat mutlak untuk mencerdaskan bangsa Indonesia adalah memajukan pendidikan di mana semenjak proklamasi segera dibentuk sebuah Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Departemen P dan K.). Yang ditunjuk menjadi Menteri PP dan K pertama adalah seorang tokoh pendidikan nasional yang terkenal Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah untuk membimbing murid menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggung jawab dan sekolah bertujuan memperkuat potensi rakyat. Itulah sebabnya sekolah dibuka untuk setiap warganegara sesuai dengan azas keadilan sosial, sekolah dapat diikuti oleh semua warganegara. Pendidikan terbagi atas 4 tingkatan yaitu: Pendidikan dasar, Menengah pertama, menengah atas dan pendidikan tinggi. Di samping sekolah umum, juga diadakan sekolah kejuruan yang memerlukan keakhlian khusus seperti bidang teknik, pertanian dan ekonomi.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga mengalami perkembangan, didorong oleh semangat nasional yang telah melampaui kedaerahan dan kesukuan. Adanya larangan penggunaan bahasa Belanda pada zaman pendudukan Jepang memberi peluang bagi perkembangan pesat bahasa Indonesia. Pada awal zaman kemerdekaan, bahasa Indonesia secara resmi telah berfungsi sebagai bahasa nasional. Teks proklamasi ditulis dalam bahasa Indonesia dan teks lagu Kebangsaan Indonesia Raya juga ditulis di dalam bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern berjalan sejajar dengan perkembangan sastera Indonesia modern.

Pada masa awal tampil sastrawan-sastrawan baru seperti Chairil Anwar dan Idrus yang kemudian terkenal dengan nama Angkatan '45. orientasi sastrawan ini tidak lagi terbatas kepada sastra India dan

sastra Belanda, melainkan sudah meluas ke seluruh dunia. Di samping sastra, seni drama dan film juga berkembang. Sebagai pelopor dari perkembangan perfilman nasional adalah Usmar Ismail dan Djamaluddin malik Juga seni musik modern mengalami perkembangan dengan dipelopori tokoh Ismail Marzuki dan Cornel Simanjuntak. Begitu juga tokoh Sjaiful Bahri, Iskandar dan Suwandi tidak boleh dilupakan dalam perkembangan seni musik Indonesia. Juga nampak perkembangan di bidang seni rupa. Pada permulaan kemerdekaan muncullah pelukis-pelukis kenamaan yang merupakan pelopor seni lukis Indonesia modern dewasa ini seperti Affandi, Sujoyono, Trisno Sumardjo dan lain-lain.

Sesudah penyerahan kepada Serikat tentara Pendudukan Jepang di Indonesia diperintahkan oleh Serikat untuk mempertahankan keadaan seperti pada waktu penyerahannya. Jepang mulai saat itu menjadi alat sampai Serikat datang melucuti senjata mereka. Sebagai tentara yang kalah perang, Jepang mau tidak mau harus menjalankan perintah itu. Di pihak lain Jepang harus berhadapan dengan rakyat Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya.

BKR dan Badan-Badan perjuangan beserta seluruh rakyat Indonesia mulai bergerak untuk mengambil-alih kekuasaan dari tangan Jepang. Kantor-kantor, pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, alat-alat pengangkutan seperti kapal dan kereta api serta kendaraan motor segera diambil alih dan diberikan tulisan: Milik Republik Indonesia.

Hampir di seluruh Indonesia terjadi perebutan kekuasaan dari tangan Jepang yang berusaha menghalangi keinginan rakyat Indonesia itu, di mana-mana timbul pertempuran antara rakyat yang bersenjata seadanya melawan Jepang yang bersenjata lengkap. Ribuan korban jatuh di kalangan rakyat dalam usahanya untuk menegakkan Kedaulatan Republik Indonesia, tetapi pengorbanan itu tidak sia-sia karena akhirnya berdirilah Negara kita dengan kokohnya hingga sekarang.

Dalam pada itu pada tanggal 15 September 1945 tentara Serikat mulai mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Puncak dari pada perjuangan rakyat Indonesia melawan Jepang di bawah pimpinan Komite Van Aksi adalah rapat raksasa 19 September 1945 di lapangan Ikada Jakarta. Pada hari itu diadakan rapat raksasa yang dihadiri oleh seluruh rakyat Jakarta dan sekitarnya. Jepang berusaha menggagalkan rapat itu, tetapi karena kuatnya desakan rakyat ia tidak berani menggunakan kekerasan dan dalam rapat itu berpidato Bung Karto sebagai pemimpin rakyat. Beliau mengharapkan rakyat supaya tetap tenang, dan jangan hendaknya terjadi pertumpahan darah. Walaupun semangat rakyat sedang bergelora, tetapi mereka tetap patuh kepada pemimpin mereka.

Pada waktu yang bersamaan yaitu 19 September 1945 di Surabaya terjadi insiden Tunjungan, di mana pada hari itu di Hotel Yamato Surabaya bendera Merah Putih diganti dengan bendera Belanda.

Peristiwa itu hampir saja menimbulkan pertumpahan darah besar-besaran dengan Jepang sebagai penanggung jawab keamanan.

Dengan datangnya tentara Sekutu di Indonesia, maka tentara Jepang mulai ditarik secara berangsur-angsur dari Indonesia, dan dengan demikian perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lagi ditujukan kepada Jepang, tetapi kepada Sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Setelah menghadapi kenyataan itu, pemerintah RI menyadari bahwa adanya sebuah tentara adalah mutlak perlu untuk membela negara. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TKR berkedudukan di Yogyakarta, dan yang ditunjuk sebagai Kepala Staf TKR adalah Urip Sumoharjo, seorang pensiun Mayor KNIL yang setelah Proklamasi segera menyatakan diri mendukung Republik Indonesia. Beliau segera mengambil langkah untuk mengorganisasi TKR dan BKR sebagai modalnya. Tetapi sementara tugas itu sedang dikerjakan, sudah pecah pertempuran-pertempuran melawan Jepang, Inggris dan Belanda.

Tentara Inggris yang sebenarnya bertugas memelihara keamanan di Indonesia atas nama Serikat, karena membiarkan dirinya diperalat oleh pihak Belanda untuk mengembalikan penjajahan di Indonesia, akhirnya harus berhadapan dengan pihak Indonesia. Pada tanggal 10 Nopember 1945 pecah pertempuran hebat antara Inggris dan pihak Indonesia di kota Surabaya. Setelah Sekutu mengerahkan kekuatannya di darat, laut dan Udara selama satu bulan, barulah perjuangan Indonesia terdesak meninggalkan kota Surabaya.

Begitu juga di kota Ambarawa mulai akhir Nopember 1945 terjadi pertempuran hebat antara Serikat dan pejuang Indonesia. Di bawah pimpinan Panglima Divisi TKR di daerah Banyumas, Kolonel Sudirman, pejuang Indonesia pada tanggal 15 Desember 1945 berhasil menghalau pasukan Inggris kembali ke Semarang.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak merata diketahui oleh daerah-daerah di Indonesia, berhubung komunikasi pada saat itu belum begitu lancar seperti sekarang ini. Daerah yang dekat letaknya dengan Jakarta lebih dahulu mengetahui berita proklamasi itu, dan sebaliknya daerah yang jauh letaknya terlambat mengetahui berita proklamasi itu. Daerah Riau khususnya Pekanbaru mendengar berita Proklamasi pada tanggal 21 Agustus 1945, sungguhpun sebelumnya secara berbisik-bisik berita itu sudah didengar juga. Pemerintah pendudukan Jepang sangat keras mengawasi pemberitaan pers dan siaran radio, tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu.

Setelah diketahui dengan pasti proklamasi kemerdekaan, maka para anggota bekas *Giyugun* dan *Heiho* yang telah dibubarkan oleh jepang segera menyambut berita proklamasi dengan bergelora. Tidak berapa lama kemudian dibentuk suatu organisasi perjuangan bersama "Pemuda Republik Indonesia" (PRI) di kota Pekanbaru oleh tokoh-

tokoh pemuda seperti: Abu Jamal, Sukana, Hanafi, Walsing Panjaitan, Hasan Basri dan Raden Yusuf. Semua bekas *Giyugun* dan *Heiho* semuanya berkumpul menjadi kesatuan yang di bawah pimpinan PRI[3].

Sesudah terbentuknya PRI di Pekanbaru, maka pada tanggal 15 September 1945, dilakukan penaikan bendera merah putih di kantor pos Pekanbaru yang dipelopori oleh para pemuda yang tergabung dalam PRI. Pada mulanya penaikan bendera Merah Putih akan dilakukan di kantor Pemerintahan militer Jepang (*Gunseikan*) akan tetapi karena kantor ini dijaga keras dengan bayonet terhunus, maka untuk menghindarkan korban yang lebih besar, maka rakyat dan pemuda yang telah memenuhi seluruh kota Pekanbaru dialihkan ke tempat lain. Rakyat yang bagaikan semut dengan semangat yang bergelora segera menuju kantor pos yang jaraknya kira-kira 100 meter dari rumah kediaman Gubernur Jepang tadi. Setelah sampai di tempat itu maka dengan penuh khidmat massa rakyat menaikkan bendera Merah Putih untuk berkibar sepanjang masa.

Sementara itu pihak Jepang tidak tinggal diam, mereka berusaha menghalang-halangi gerakan massa dengan bayonet terhunus, tank tank serta patroli Jepang. Mereka berkeliaran sekeliling kota menunjukkan kekuatannya, tetapi para pemuda termasuk D.I. Panjaitan walaupun tidak mempunyai senjata mereka tidak takut dan gentar menghadapi ancaman itu. Pada pemuda menganggap bayonet terhunus itu sebagai rumput-rumput liar yang tidak usah ditakuti. Dalam saat-saat seperti itu sinar mata rakyat dan pemuda yang heroik ibarat api yang menyala dan dengan disertai semangat yang membaja dan menggemuruh meneriakkan pekik merdeka atau mati.

Dalam pada itu untuk menampung dan menyalurkan semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan, maka organisasi PRI makin disempurnakan. Dan PRI kemudian dibentuk "Badan Keselamatan Rakyat" (BKR). dan yang ditunjuk sebagai Komandan adalah Hasan Basri dan sebagai Kepala Staf Umum ditunjuk D.I. Panjaitan dengan sebutan pangkat Opsir Tinggi yang daerah kekuasaannya meliputi Riau dan kepulauan.

Sementara itu pemerintah pusat di Jakarta juga menunjuk Dr. A.K. Gani sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk daerah Sumatera dan melalui Dr. A.K. Gani disalurkan semua perintah dari Pemerintah Pusat ke seluruh daerah Sumatera. Guna kesempurnaan unsur komando, maka di daerah Sumatera juga dibentuk Komando BKR dan sebagai panglimanya ditetapkan Mayor Jenderal Suharjo Harjowardoyo.

---

[3] Nugroho Notosusanto (editor), *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Balai Pustaka Jakarta 1977, hal. 140.

[4] Pahlawan Revolusi Donald Isak Panjaitan, *Wawancra terakhir sebelum gugur*, *Ragi Buana* No. 21 Jakarta 21 Oktober 1965, hal. 5.

Setelah organisasi ketentaraan makin disempurnakan, maka jalannya perjuangan, makin diarahkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Masa Rakyat laksana semut membanjiri kota Pekanbaru selama beberapa hari dan terus menerus memenuhi sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang patriotik dan membawa slogan merdeka atau mati yang berjalan dengan teratur lancar dan tertib. Kalau dibayangkan keadaan itu sekarang, kita jadi bertanya-tanya dalam hati darimana dan di mana rakyat dan pemuda yang puluhan ribu itu memperoleh makan selama berada di kota Pekanbaru. Pada waktu itu daerah Riau termasuk daerah yang sangat minus akan bahan makanan, dalam masa pendudukan Jepang praktis rakyat hanya memakan ubi dan sagu yang juga sulit untuk diperoleh.

Pada waktu itu rakyat sangat percaya kepada pemimpin, tidak ada bantahan atau pertanyaan terhadap pemerintah yang dikeluarkan. Tidak ada di antara yang menanyakan dari mana kita makan dan dari mana memperoleh perbekalan dan perlengkapan perang. D.I Panjaitan waktu itu adalah seorang pemuda yang baru berumur 20 tahun dengan pengetahuan militer yang praktis tidak ada selain dari apa yang diberikan oleh jepang dalam pendidikan perwira *Giyugun*. Dengan modal inilah ia mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat untuk memimpin mereka serta mempercayai pula semua gagasan militer yang diberikan[4].

Waktu itu D.I. Panjaitan merencanakan untuk menyerang satu kompi Jepang yang letaknya terpencil di tengah-tengah kebun karet. Pada suatu malam kira-kira jam 7.00 tanpa terlebih dahulu menyusun formasi dan hanya bersenjatakan bambu runcing, golok dan batu, maka D.I. Panjaitan dengan pasukannya menyerangi kompi Jepang tersebut. Penyerangan itu hanya dilandasi oleh semangat yang meluap-luap, dar jarak 500 meter, mereka telah berteriak-teriak dengan menyerukan yaat!, sambil menyerbu menuju pos kompi Jepang tersebut.

Sekiranya Jepang pada waktu itu menembak satu senapan mesin saja ke arah mereka, tentu sebagian besar dari mereka akan gugur. Tetapi pada waktu itu Jepang tidak melakukan tembakan. Mungkin mereka gugup atau karena alasan lain. Dalam situasi seperti itu D.I. Panjaitan segera mempergunakan kesempatan, mereka segera melucuti serdadu Jepang dengan sedikit korban dari pihak penyerang. Disiplin dan semangat pasukan D.I. Panjaitan tinggi sekali, sampai-sampai sikat gigi yang diambil dari kompi Jepang itu semuanya dilaporkan dengan tertib dan jujur kepada pimpinan[5]

4. *Ibid.*, hal. 6.
5. *Ibid.*, hal. 7.

Dalam pada itu pada bulan Oktober 1945 Lady Mounbatten (isteri dari Admiral Inggris I ord Mounbatten) datang berkunjung ke kota Pekanbaru dengan mempergunakan sebuah kapal perang Inggris dengan maksud untuk memeriksa keadaan para tawanan perang Sekutu. Setelah kunjungan Lady Mounbatten, maka semua tawanan bekas tawanan Inggris, India dan Belanda kembali dipersenjatai oleh Jepang atas perintah pihak Sekutu. Sesudah para tawanan dipersenjatai kembali, maka dibentuklah suatu *liasson office* Sekutu di Pekanbaru di bawah pimpinan seorang Mayor Inggris bernama Langley. Tempat yang akan dijadikan markas dari tentara Sekutu di Pekanbaru adalah suatu hotel yang pada masa pendudukan Jepang khusus disediakan untuk pembesar Jepang. Hotel itu oleh pasukan Sekutu diubah namanya menjadi Mounbatten Hotel.

Pada mulanya di hotel ini hanya dikibarkan bendera Inggris, dan terhadap kejadian ini rakyat dan pemuda tidak berbuat sesuatu, karena telah dikatakan bahwa kantor tersebut hanya bertugas untuk mengurus bebas tawanan. Akan tetapi beberapa hari kemudian dikibarkan pula di sana bendera Belanda. Di samping itu para tawanan yang telah dipersenjatai berkeliaran ke sana-ke mari dalam kota dengan menunjukkan sikap yang angkuh.

Melihat kejadian ini kemarahan rakyat tidak dapat dibendung lagi, mereka secara spontan berkumpul di markas perjuangan pemuda dan rakyat di gedung *Sihang Geko* (Sekolah Guru) dengan memakai senjata golok dan apa saja yang dapat dipergunakan rakyat mendesak pimpinan BKR untuk menyerang hotel Mounbatten dan asrama tentara Sekutu di Tangkerang. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1945 dengan Komando BKR di bawah pimpinan Hasan Basri dan D.I. Panjaitan maka Hotel Mounbatten telah dikepung oleh para pemuda sebanyak 1000 orang. Melihat massa yang demikian banyak, maka tentara Sekutu segera dilarikan oleh Jepang ke asrama tentera Sekutu di Tangkerang. Pimpinan tentara Jepang kemudian mengusulkan perundingan kepada BKR, dan usul itu diterima oleh pimpinan BKR sesudah mengadakan pembicaraan dengan pimpinan pemerintahan. Dalam perundingan itu pimpinan tentara Sekuru di bawah Mayor Langley menjanjikan akan mengungsikan tentara Sekutu dan Belanda ke Padang dalam waktu 15 hari, dan sesudah itu tentara Jepang akan menjaga keamanan di Pekanbaru.

Sesudah selesai perundingan, maka pimpinan pemerintahan dan pimpinan BKR segera menuju ke Hotel Mounbatten untuk menerima massa rakyat dan pemuda. Emosi dan semangat rakyat tidak bisa dikendalikan lagi tanpa dikomando dengan mengucapkan pekik merdeka dan ucapan Allahuakbar mereka menyerbu Hotel Mounbatten. Bendera Inggris diturunkan dan bendera Belanda dirobek yang berwarna biru, sedang yang berwarna merah putih dinaikkan kembali. Tentara Jepang tidak berbuat apa-apa mereka hanya menjaga jangan sampai pasukan Indonesia melewati garis pertahanan mereka. Pim-

pinan BKR dan pimpinan pemerintahan kemudian berhasil menenangkan massa dengan memerintahkan mereka bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Lima belas hari sesudah peristiwa itu *pemerintahan RI di Riau* di bawah pimpinan Residen A. Malik menganti nama Hotel Mounbateen menjadi Hotel Merdeka. Hotel Merdeka ini kemudian pada tanggal 31 Desember 1942 dibumihanguskan dalam rangka perjuangan kemerdekaan[6].

Waktu mengadakan penyerbuan ke Hotel Mounbatten, banyak surat penting dan dokumen Sekutu dan Belanda yang tertinggal. Semua dokumen dan surat penting ini diserahkan kepada D.I. Panjaitan sebagai Kepala Staf BKR daerah Riau untuk disimpan dan diteliti. Di antara dokumen itu ditemui adanya dokumen pegawai tinggi Belanda serta kaum intelektual bangsa Indonesia yang melamar kembali bekerja kepada Belanda majikan lama mereka agar dipekerjakan kembali. Mereka ini rupanya tidak yakin akan kemerdekaan dan gerakan pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan. Sejak masa itu mulailah timbul curiga-mencurigai satu sama lain antara pemuda yang tahu berbahasa Belanda dengan yang tidak mengetahui, akibat penodaan dari oknum terpelajar itu. Keadaan ini semakin terasalah kepada para pemimpin pemuda bertambahnya tanggung jawab dan memimpin perlawanan rakyat. Dari kenyataan ini terbukti kebenaran pepatah yang menyatakan "*there are no bad soldier, but only bad officier*"[7].

Perebutan kekuasaan dari tangan Jepang terjadi di mana-mana di daerah Riau secara terus-menerus dan dilakukan dengan gigih. Pertempuran hampir terjadi di semua daerah di Indonesia antara barisan pemuda dan serdadu Jepang. Pemerintah Republik Indonesia mulai mengadakan konsolidasi dengan membentuk kesatuan-kesatuan yang lebih teratur. Apalagi pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah pusat telah meresmikan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan langkah ini kemudian diikuti oleh daerah-daerah di Indonesia.

Di daerah Riau juga dibentuk TKR dengan pimpinan sebagai berikut:

Komandan	: Hasan Basri
Wakil Komandan	: Hanafi
Kepala Staf Umum merangkap Komandan Batalyon I Pekanbaru	: D.I. Panjaitan
Komandan Batalyon II Rengat	: Rasyid,
Komandan Batalyon III	: Amir Yusuf
Komandan Kompi Selat Panjang.	: Arifin Achmad
Komandan Kompi Bengkalis.	: Marah Halim Harahap
Komandan Batalyon IV Pekanbaru	: Osman Pohan

6. Mohammad Baseri, *Peristiwa Mounbatten Hotel Pekanbaru*, Berita Buana, 10 Desember 1976.

7. Pahlawan Revolusi Donald Isak Panjaitan, *Wawancara terakhir Sebelum Gugur*, *op. cit*. hal. 7.

Kesatuan-kesatuan TKR di daerah Riau umumnya terdiri dari bekas *Giyugun* dan *Heiho* termasuk pemuda-pemuda bekas Heiho yang dikembalikan oleh Jepang dari Burma ditambah lagi dengan kader KNIL sebelum perang dan ditambah dengan pemuda-pemuda di daerah itu. Dalam pada itu oleh karena sungai Siak dan Selat Malaka merupakan satu-satunya garis yang masih terbuka ke Singapura, maka dengan secara terorganisasi segera dilakukan penyelundupan senjata dan pemancar radio yang diberi dari Singapura. Penyelundupan senjata yang sangat berbahaya itu sangat berhasil dilaksanakan oleh para pemuda dan pejuang di daerah Riau. Komando TKR untuk daerah Riau dan kepulauannya yang terdiri dari 10.000 orang, dapat memiliki senjata satu untuk dua orang. Jumlah ini merupakan suatu persenjataan yang cukup lengkap di waktu itu, jika dibandingkan dengan kesatuan-kesatuan lain di berbagai daerah di seluruh Indonesia[8].

Dalam pada itu daerah Tanjung Pinang dan pulau Karimun telah terlebih dahulu dikuasai oleh Angkatan Laut Belanda dengan bantuan pihak Inggris, karena pulau-pulau itu terpencil letaknya dan penduduknya juga sedikit. Karena daerah-daerah itu telah dikuasai Belanda, maka pasukan-pasukan TKR berusaha merebut daerah itu kembali, guna kelancaran gerak mereka dalam usaha mencapai senjata ke Singapura. Pada permulaan bulan Pebruari 1946 di bawah pimpinan seorang Mayor peranakan Jepang yang telah berpihak kepada Republik Indonesia yang telah diberi nama Abdul Manaf dibantu oleh Letnan Husen dengan membawa pasukan lengkap maka penyerangan ke pulau-pulau tersebut untuk merebut daerah itu kembali. Perlawanan terhadap pasukan Belanda dilakukan terutama dengan jalan gerilya oleh pasukan Abdul Manaf. Perlawanan itu berlangsung beberapa bulan lamanya dengan mengorbankan tidak sedikit di kedua belah pihak. Kompi Abdul Manaf akhirnya tidak kembali, karena banyak mengalami tekanan alam seperti rawa dan kebun sagu, sedangkan pengiriman makanan oleh pihak Indonesia tidak mungkin dilakukan karena sulitnya hubungan. Mayor Abdul Manaf akhirnya juga gugur di pulau tersebut dan dengan demikian berakhirlah pula perlawanan gerilya di pulau Karimun.

Kota Bengkalis dan daerah Selat Panjang juga sering mendapat gangguan dan tembakan dari kapal perang Belanda dari laut. Akan tetapi sampai pada aksi militer Belanda kedua, pihak Belanda tidak berani memasuki daerah itu berkat pertahanan dan perlawanan yang gigih dan patriotik dari rakyat daerah tersebut.

Dalam perkembangan perjuangan selanjutnya, maka diadakan penyempurnaan dalam unsur-unsur komando dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Untuk kepulauan itu maka bulan Maret

8. *Ibid.*, halaman 8

1946 datanglah Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo panglima Komandan Sumatera ke Pekanbaru untuk melantik TKR di Riau dan kepulauan menjadi satu *resimen*. Resimen yang dibentuk itu dinamai Resimen IV sebagai bahagian dari Divisi IX yang berkedudukan di Bukittinggi dengan panglima Divisi Kolonel Dahlan Jambek. Sebagai Komandan Resimen ditunjuk Hasan Basri dengan pangkat Letnan Kolonel dan Kepala Staf adalah D.I. Panjaitan dengan pangkat Mayor.

Di samping diangkat sebagai Kepala Staf Resimen, maka Mayor D.I. Panjaitan juga diangkat sebagai Komandan Batalyon I yang berkedudukan di Pekanbaru. Batalyon II dipimpin oleh Mayor Arifin Achmad yang berkedudukan di Bengkalis, Batalyon III dipimpin oleh Mayor *Jusuf Nor* yang berkedudukan di Rengat dan Batalyon Artileri dipimpin oleh Mayor *Ali Rasyid* yang juga berkedudukan di Pekanbaru[9].

Mengingat pentingnya kedudukan daerah Riau terutama Riau Kepulauan, maka terjadi perebutan pengaruh antara masing-masing kesatuan di daerah Riau dan juga daerah Sumatera Barat. Supply Line sungai Siak — Selat Malaka terus ke Singapura merupakan daerah yang penting untuk penjualan bahan mentah dan pemasukan perlengkapan serta perbekalan militer secara selundupan dari Singapura. Berhubung daerah Riau merupakan daerah minus bahan makanan, maka beras dan keperluan lain harus didatangkan dari Sumatera Barat dan Tapanuli dan sebagai gantinya dari daerah Riau dikirimkan alat-alat perlengkapan militer.

Sebagai romantika dari perjuangan, maka terjadi hubungan yang erat antara pribadi para pejuang di samping hubungan dinas dalam bidang militer. Perkenalan dan hubungan antara Hasan Basri dan D.I. Panjaitan berkembang sedemikian rupa, sehingga hubungan itu seperti hubungan sahabat saja dan telah dimulai sejak jaman Jepang berkembang lebih akrab lagi pada zaman perjuangan kemerdekaan. Sebagai manifestasi dari keakraban mereka, sewaktu D.I. Panjaitan akan melangsungkan pernikahannya ia minta izin kepada Hasan Basri dan sekalian meminta uang untuk pulang ke kampung. Karena pada waktu itu Hasan Basri juga tidak mempunyai uang, maka ia menyarankan kepada D.I. Panjaitan untuk membawa bensin dengan kendaraan dan bensin ini dapat ditukar dengan uang untuk menutup keperluan. Saran dari Hasan Basri ini dapat juga diartikan sebagai perintah dari seorang Komandan Resimen kepada Kepala Staf ini. Setelah itu D.I. Panjaitan dapat pulang ke kampung halamannya untuk melangsungkan pernikahannya.

9. Zahdi, "*Sejarah perjuangan Bersenjata di Riau*," Majalah *Canang* No. 10 Oktober 1978, hal. 4.

Setelah melangsungkan pernikahan, maka D.I. Panjaitan kembali ke Pekanbaru dengan keluarganya dan ia kembali melaksanakan tugasnya seperti dahulu. Oleh Hasan Basri, D.I. Panjaitan kemudian ditugaskan mengadakan perdagangan candu lewat Sungai Rokan ke Singapura untuk ditukarkan dengan senjata. Dalam melaksanakan tugas itu D.I. Panjaitan telah berhasil sehingga senjata yang dimiliki pasukan TKR di daerah Riau makin bertambah banyak. Di samping mengadakan hubungan dengan Singapura D.I. Panjaitan juga berhasil mempengaruhi orang-orang Cina di daerah Riau untuk masuk tentara dan berjuang bersama-sama dengan pasukan TKR[10].

Perlawanan rakyat Pekanbaru khususnya dan daerah Riau pada umumnya makin lama makin meningkat. Pada tanggal 2 Juni 1946 sebuah kapal terbang Belanda B-25 secara demonstratif terbang sangat rendah dengan ketinggian 100 meter, di atas lapangan terbang Pekanbaru. Mereka berkeliling di daerah lapangan terbang selama 20 menit sambil terbang rendah sekali. Lapangan terbang Simpang Tiga Pekanbaru telah lama dipersiapkan dengan membuat lobang pertahanan di sekitar dan di landasan. Pihak Belanda tidak menduga sama sekali bahwa lobang-lobang pertahanan selama itu diisi oleh prajurit Kompi IV Batalyon I Pekanbaru di bawah pimpinan Mayor D.I. Panjaitan. Dalam keadaan terbang demikian rendah secara demonstratif kapal terbang Belanda B-25 ini mengeluarkan kamera dan mengadakan opname.

Demikianlah pada menit ke 18 pesawat terbang tersebut terbang lebih rendah lagi di atas landasan setelah berkeliling, maka tanpa tedeng aling-aling serta dengan penuh keyakinan, Sersan Abdul Manaf segera menembaknya dengan karaben mounser dan tepat mengenai kepala pilot. Karena sudah terbang sangat rendah pilot tidak sempat beraksi dalam cock-pit. Hidung pesawat terbang terjungkil sambil menabrak satu sarang senapan mesin penangkis serangan udara yang terdiri dari beton hingga pesawat itu rusak. Sesudah terjungkil di tanah, awak pesawat udara sebanyak delapan orang di antaranya enom orang bangsa Belanda dan dua orang Indonesia suku Ambon masih sempat mengadakan perlawanan dengan menembakkan senapan mesin 12,7 dari pesawat terbang ke arah pasukan Indonesia.

Tembakan gencar dari pihak Belanda tidak dihiraukan oleh pasukan TKR, sehingga mereka menembak terus. Karena tembakan mereka tidak mendapat balasan maka ke delapan awak pesawat itu berlompatan keluar sambil memegang stengun di tangan siap untuk bertempur dengan mengambil posisi *Stelling* di sekitar pesawat terbang yang hidungnya telah hancur itu.

10. Wawancara dengan *Bapak Hasan Basri*, Kebun Kacang XIX No. 18 Jakarta, Oktober 1979.

Tiada berapa lama antaranya, pasukan TKR diberi komando untuk menyerbu dan serta merta pasukan yang berjumlah 200 orang serentak menyerbu tempat stelling Belanda. Mereka menyerbu dari segenap penjuru dan membunuh seluruh awak pesawat. Pilotnya seorang yang berpangkat Mayor yang kena tembak oleh Sersan Abdul Manaf tepat mengenai pelipis sebelah kiri tembus sampai sebelah kanan. Semua awak pesawat mati ditusuk-tusuki karena meluapnya amarah anggota pasukan TKR. Satu dari dua orang Indonesia suku Ambon awak pesawat itu sempat pula berlaku licik yakni dengan memasukkan badannya di bawah dua mayat temannya, dan sewaktu anggota pasukan TKR menginjak-injak mayat itu rupanya terpijak pula bagian perut orang yang berlaku licik itu. Tanpa disadarinya orang itu berteriak karena dia masih hidup, dan kemudian ia ditawan oleh pasukan TKR. Mayat ke tujuh orang tentara Belanda yang tewas itu dikuburkan di Pekanbaru dengan upacara militer penuh. Cincin mayor Belanda yang menjadi pilot yang merupakan cincin kawin disimpan oleh Komandan Batalyon Mayor D.I. Panjaitan sampai agresi militer Belanda yang kedua. Cincin tadi sedianya akan dikembalikan oleh Mayor D.I. Panjaitan kepada isteri Mayor Belanda itu, tetapi pada tahun 1948 cincin itu hilang di daerah hutan daerah Riau.

Pesawat B-25 itu walaupun hancur tetapi tidak terbakar sehingga semua dokumen yang ada di pesawat itu dapat dibaca. Pesawat itu berangkat dari Australia menuju Medan dengan berisi peti barang, kelambu militer dan perlengkapan lainnya dengan alamat *"Plaatselijke Militair Commandant"* (PMC) Medan. Di dalam pesawat itu juga didapati sebanyak 1½ juta *gulden* uang Nica, yang sebahagian dipamerkan kepada rakyat di dalam ktoa Pekanbaru.

Sesudah kejadian itu, yaitu 6 Juni 1946 datang lagi dua buah pesawat terbang Belanda jenis Mustang yang menembaki lapangan terbang. Sebelumnya 6 buah senapan jenis 12,7 bekas persenjataan B-25 yang telah ditembak dipasang di lapangan terbang untuk menangkis serangan udara. Dengan senjata itu pula pesawat Mustang Belanda itu ditembaki oleh pasukan TKR, sehingga satu di antaranya dapat ditembak dan akhirnya melarikan diri. Pesawat itu akhirnya jatuh ke laut dekat daerah Tanjung Pinang yang dapat disaksikan oleh beberapa nelayan di daerah itu.

Dalam pada itu pesawat B-25 yang telah hancur di pelabuhan udara Pekanbaru dalam waktu satu jam berhasil dipereteli oleh pasukan TKR, hingga yang tinggal hanya dua mesinnya saja. Balingbaling pesawat itu juga tidak berhasil ditemukan. Dinamo kecil dari pesawat itu dengan ditambah kawat-kawat listrik mempunyai jasa yang besar sebagai pembangkit api di depan asrama sebagai akhir tahun 1948.

Sebagai penghargaan atas hasil Batalyon I Pekanbaru di bawah pimpinan D.I. Panjaitan, maka Sersan Mayor Abdul Manaf dinaik-

kan pangkatnya menjadi Letnan Muda. Di samping itu Batalyon Pekanbaru mendapat perhatian khusus dari Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin dan panglima besar Sudirman. Untuk keperluan itu maka diutus Kepala Staf Umum Komando Sumatera Kolonel Mohd Nuh ke Pekanbaru menyampaikan penghargaan itu, dan menaikkan pangkat Sersan Abdul Manaf.

Uang NICA sebanyak 1½ juta gulden yang didapat dari pesawat Belanda tadi diserahkan kepada Kolonel Mohd Nuh bersama-sama dengan seorang tawanan Belanda suku Ambon tadi. Tawanan ini kemudian dijadikan pengawal pribadi Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo, tetapi akhirnya memihak Belanda kembali sesudah tentara Belanda menduduki kota Palembang. Panglima Komando Sumatera sejak saat itu memindahkan markas besarnya ke Prapat[11]

Selama bertugas sebagai komandan Batalyon I di Pekanbaru Mayor D.I. Panjaitan terkenal sebagai seorang tokoh militer yang cekatan, tegas dan pemberani. Di samping itu sebagai seorang militer D.I. Panjaitan mempunyai disiplin yang teguh, terutama pada bawahannya. Pada suatu hari Letnan Subrantas sebagai Komandan Kompi dari luar kota Pekanbaru mengadakan latihan di lapangan kota Pekanbaru, tetapi latihan itu belum mendapat izin dari Mayor D.I Panjaitan sebagai Komandan di Pekanbaru. Setelah D.I. Panjaitan mengetahui kejadian itu, maka ia memanggil Letnan Subrantas untuk meminta pertanggungjawabannya. Letnan Subrantas tidak datang menghadap D.I. Panjaitan, tetapi ia menghadap langsung kepada Komandan Resimen Letnan Kolonel Hasan Basri.

Setelah Hasan Basri mengetahi persoalannya dia langsung turun tangan menyelesaikan tanpa mempertemukan D.I. Panjaitan dan Subrantas, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu kalau kedua perwira itu dipertemukan. D.I. Panjaitan akhirnya menerima penyelesaian seperti itu, dan sesudah itu dia tidak pernah merasa dendam kepada Subrantas[12].

Hubungan D.I. Panjaitan dengan Hasan Basri, telah berkembang sedemikian akrab, baik secara dinas maupun secara pribadi. Dalam suatu kesempatan D.I. Panjaitan dengan pakaian militer lengkap datang mengendarai panser ke rumah Hasan Basri di Pekanbaru. Setelah mengucapkan selamat datang, maka D.I. Panjaitan menyatakan kepada Hasan Basri sebagai berikut:

"Saya masuk menjadi prajurit sampai menjadi Jenderal, dan saya ingin mati sebagai Jenderal." Ungkapan tersebut disampaikan oleh D.I. Panjaitan kepada Hasan basri dengan sikap dan suara yang tegas dan penuh disiplin[13].

11. Pahlawan Revolusi Donald Isak Panjaitan, *Wawancara terakhir Sebelum Gugur*, *op. cit.*, hal. 10.

12. Wawancara dengan *Bapak Subrantas*, Pekanbaru 10 Oktober 1979.

13. Wawancara dengan *Bapak Hasan* Basri, *op. cit.*

Pada tanggal 3 Juni 1947 pemerintah mensahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari Tentara Republik Indonesia (TRI) ditambah dengan Lasykar perjuangan. Kemudian pada bulan Maret 1948 Perdana Menteri Mohammad Hatta mengadakan rasionalisasi dalam bidang ketentaraan, opsir-opsir diturunkan pangkatnya satu tingkat[14].

Mayor D.I. Panjaitan mulai saat itu pangkatnya juga diturunkan satu tingkat menjadi Kapten. Kapten D.I. Panjaitan kemudian pada tahun 1948 dipindahkan ke Bukittinggi sebagai Wakil Kepala Staf Organisasi DIVISI IX merangkap Direktur Pendidikan Perwira di Bukittinggi. Dalam pada itu Letnan Kolonel Hasan Basri pangkatnya juga turun satu tingkat menjadi Mayor, dan juga dipindahkan ke Bukittinggi pada tahun 1948. Sewaktu sama-sama bertugas di Bukittinggi, walaupun berbeda kesatuan D.I. Panjaitan masih tetap menghormati Hasan Basri. Pada tanggal 1 Januari 1949 Kapten D.I. Panjaitan datang mengendarai panser ke rumah Mayor Hasan Basri yang meminta agar Hasan Basri datang ke Pekanbaru karena rombongan Bung Hatta, Haji Agus Salim dan Sutan Syahrir akan datang ke Pekanbaru.

Pada tahun 1949 Kapten D.I. Panjaitan dipindahkan lagi dari Bukittinggi ke daerah Riau Udara selaku Asisten IV Komando Sumatera yang ditempatkan di daerah Bangkinang. Waktu itu yang menjadi Panglima Komando Sumatera adalah Kolonel Hidayat yang menggantikan Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo, Kolonel Hidayat berasal dari DIVISI Siliwangi Jawa Barat, yang dipindahkan ke Sumatera berdasarkan kebijaksanaan dari Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Mohammad Hatta. Kedudukan D.I. Panjaitan di Bukittinggi digantikan oleh Mayor Akil Prawiradiraja yang berasal dari DIVISI Siliwangi. Kebijaksanaan Mohammad Hatta sebagai tokoh nasional untuk mengadakan mutasi di kalangan militer didasarkan kepada keyakinan bahwa tentara Jawa lebih banyak pengalaman dalam bertempur[15].

Pada waktu itu di daerah Riau Utara yang merupakan front utama adalah front Bangkiang dengan pusat kesatuan di Muara Mahat, yang dipimpin oleh Komisaris Mobrig Silalahi. Kota Bangkiang pada waktu agresi militer Belanda kedua sering digempur habis-habisan oleh Belanda, yang menyebabkan korban banyak yang jatuh di antara mereka. Karena hebatnya serangan Belanda pada waktu itu, senapan mesin berat 12,7 yang dipunyai oleh TNI terpaksa dibuang ke dalam dasar sungai Kampar tatkala pasukan TNI mengundurkan diri ke Muara Mahat akibat pukulan Belanda dari arah Bangkiang. Dalam hubungan ini patut dicatat bahwa rakyat Riau daratan sampai pada akhir agresi militer Belanda kedua terus menerus dengan gigih bahu membahu melawan pasukan tentara Belanda.

14. Mohammad Hatta, *Memoir*, Tintamas Jakarta 1978, hal. 524.

15. Wawancara dengan *Bapak Hasan Basri, op. cit.*

Di dalam hubungan ini perlu pula diingat jasa dari Haji Bakri dari Lubuk Bendaharo di dalam pembinaan garis belakang front di dalam *menggembleng* rakyat di dalam aksi-aksi perlawanan menentang agresi Belanda. Sampai akhir aksi militer Belanda kedua, daerah Riau daratan masih mempunyai dua batalyon pasukan yang bersemangat, yang pada tahun 1950 masih tetap segar dan setia dapat selamat. Hampir seluruhnya dari mereka terdiri dari perintis pembentukan kesatuan BKR yang kemudian menjadi TKR — TRI dan terakhir TNI. Mereka telah menunaikan kewajibannya sebagai abdi rakyat mengantar kepada pengakuan kedaulatan[16].

Sesudah pengakuan kedaulatan Kapten D.I. Panjaitan, terus melanjutkan pengabdiannya di dalam bidang militer. Pada tahun 1950 ia diangkat sebagai Kepala Operasi dan merangkap sebagai bahagian organisasi dari Komando Tentara Teritorium I yang berkedudukan di Medan. Daerah Komando Teritorium I pada waktu itu meliputi daerah Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Tengah yang meliputi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Selama bertugas di tempat ini D.I. Panjaitan tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi sesuai dengan tata cara kemiliteran.

Pada tahun 1952 Kapten D.I. Panjaitan dipindahkan lagi ke Palembang sebagai Kepala Staf Komando Tentara Territorium II Sumatera Selatan dan pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor. Ia bertugas di daerah ini selama empat tahun, karena pada tahun 1956 D.I. Panjaitan mendapat kesempatan mengikuti Sekolah *Senior Officer Course* di Mhow — propinsi Madia Pradesh India. Setelah selesai mengikuti pendidikan di India D.I. Panjaitan dinaikkan lagi pangkatnya menjadi Letnan Kolonel dan pada tahun 1957 diangkat sebagai Atase Militer di Bonn Jerman Barat. Sewaktu D.I. Panjaitan bertugas di Jerman Barat, suhu politik di tanah air semakin lama semakin panas. pada waktu ini timbul pergolakan di daerah-daerah seperti Dewan Gajah di Medan, Dewan Banteng di Padang dan Dewan Garuda di Palembang. Para perwira militer pada waktu itu terpecah belah dalam kelompok yang saling bermusuhan.

Dalam situasi seperti ini D.I. Panjaitan sebagai seorang perwira muda yang ditugaskan di luar negeri diliputi oleh keragu-raguan dalam menentukan alternatif mana yang akan dipilih. Dan kemudian D.I. Panjaitan meminta pendapat salah seorang bekas komandannya yaitu Hasan Basri dengan jalan mengirim surat kepadanya dari Bonn (Jerman Barat) ke Jakarta. Walaupun Hasan Basri tidak aktif lagi dalam bidang militer, tapi ia masih tetap dapat memberikan jalan keluar

16. Pahlawan Revolusi Donald Isak Panjaitan, *Wawancara Terakhir sebelum Gugur*, *op. cit.*, hal. 11.

yang terbaik yang akan ditempuh oleh D.I. Panjaitan. Di dalam membalas surat D.I. Panjaitan, Hasan Basri menyarankan agar D.I. Panjaitan memilih alternatif A.H. Nasution yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Saran dari Hasan Basri kemudian ternyata diikuti oleh D.I. Panjaitan dan jalan ini ternyata merupakan yang terbaik baginya[17].

Kariernya dalam bidang militer, makin lama makin meningkat di mana dalam tahun 1957 D.I. Panjaitan diangkat menjadi Atase Militer di Bonn Jerman Barat, tempat ia bertugas sebelumnya. Kemudian pada tahun 1960 pangkat D.I. Panjaitan dinaikkan lagi satu tingkat menjadi Kolonel. Pada bulan Mei 1962 D.I. Panjaitan pulang ke tanah air untuk memegang jabatan sebagai Assisten IV (Logistik) Men/Pangad. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1963 D.I. Panjaitan mendapat promosi untuk menjadi perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal[18].

Sebelum melaporkan kenaikan pangkatnya kepada Men/Pangad, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan terlebih dahulu melaporkan kenaikan pangkatnya secara tidak resmi kepada bekas komandannya waktu di Pekanbaru yaitu Hasan Basri. Pagi-pagi sebelum masuk kantor, D.I. Panjaitan pergi ke rumah Hasan Basri di Jalan Sumatera Jakarta untuk memberi tahu kenaikan pangkatnya karena waktu di Pekanbaru ia pernah juga menyatakan kepada Hasan Basri, bahwa ia masuk tentara mulai dari perajurit sampai menjadi jenderal dan ingin mati sebagai jenderal. itulah sebabnya sesudah menjadi Jenderal ia juga datang melapor kepada Hasan Basri, disebabkan hubungan batin mereka yang begitu dalam[19].

Pada tahun 1964 D.I. Panjaitan mendapat kesempatan mengikuti *"Command General Staff College"* (sama dengan SESKOAD) di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Setelah kembali ke Tanah Air D.I. Panjaitan memegang jabatannya kembali sebagai Asisten IV Men/Pangad sampai gugur pada tanggal 30 September 1965.

Situasi politik pada masa itu sangat menguntungkan PKI, walaupun pimpinan Angkatan Darat sangat keras menentang meluasnya pengaruh PKI. Men/Pangad Letnan Jenderal Achmad Yani dengan tegas menyatakan bahwa "lebih baik bekerja sama dengan setan dari pada bekerja sama dengan PKI." Kemudian Assisten I men/Pangad Mayjen S. Parman mengadakan pemeriksaan di Pusat Latihan Kemiliteran bagi Pemuda Rakyat dan Gerwani di Lubang Buaya. Kemudian Assisten IV Men/Pangad Brigjen D.I. Panjaitan juga mengadakan pemeriksaan di gudang-gudang Tanjung Priok tem-

18 Pramono et al *Biografi Pahlawan Nasional dari lingkungan ABRI*. Departemen Hankam Pusjarah ABRI. Hal. 76

17 19 Wawancara dengan *Bapak Hasan Basri, op. cit.*

pat meyimpan senjata-senjata Khung yang dimasukkan secara rahasia oleh PKI dari RRC. Secara keseluruhan pimpinan Angkatan Darat juga menentang pembentukan *Angkatan Ke-V* seperti yang diusulkan oleh PKI dan kawan-kawannya. D.I. Panjaitan termasuk salah seorang perwira tinggi Angkatan Darat Republik Indonesia yang dengan tegas menolak bekerjasama dengan PKI.

2. Situasi Politik pada zaman demokrasi terpimpin

Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 jam 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka diumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka Demokrasi Terpimpin. Dekrit Presiden itu mendapat sambutan baik dari rakyat dan disokong penuh oleh TNI/AD, seperti disebut dalam melaksanakan dan mengamankan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi ABRI. Mahkamah Agung juga membenarkan Dekrit Presiden itu, sedang DPR (hasil pemilihan umum 1955) dalam sidang plenonya tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk bekerja terus dalam rangka UUD 1945, berarti menyetujui Dekrit Presiden itu.

Rakyat yang sudah lama mendambakan stabilitas politik menggantungkan harapannya kepada berlakunya kembali UUD 1945 dalam rangka Demokrasi Terpimpin. Menurut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 Presiden/Kepala Negara/Kepala Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada Parlemen; baik Parlemen maupun Presiden berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pengertian terpimpin dalam UUD 1945 adalah dengan "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Akan tetapi kemudian ternyata Presiden Sukarno menafsirkan "terpimpin" itu dengan pimpinan pribadinya selaku Pemimpin Besar Revolusi.

Tidak berapa lama kemudian harapan-harapan tadi semakin kabur dan hilang, karena UUD 1945 ternyata tidak dilaksanakan secara murni. Kalau menurut UUD 1945, Presiden berada di bawah MPR seperti disebut di atas, maka MPR (S) yang dibentuk atas penetapan Presiden dengan pembatasan tugas dan anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, menjadi MPR (S) yang tunduk kepada Presiden; Presidenlah yang menentukan apa saja yang harus diputuskan oleh MPR (S). Kenyataan-kenyataan itu jelas dengan diambilnya tindakan-tindakan oleh Presiden dalam rangka pengangkatan Pimpinan MPR (S). Ketua MPR (S) dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III dan Wakil-wakil Ketua diangkat dari pimpinan partai-partai besar PNI, NU, PKI) dan dari Wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai Menteri tidak berportofolio. Dan dengan demikian Presiden dapat berbuat apa saja menurut kehendaknya. Kemudian Sidang Umum MPR (S) I/1960 menetapkan Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 17 Agustus 1959 "Penemuan Kem-

bali Revolusi Kita" menjadi Manifesto Politik Republik Indonesia dan menetapkannya menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara, sedangkan Sidang Umum MPR (S) tahun 1963 mengambil Ketetapan "Mengangkat Dr. Ir. Haji Sukarno menjadi Presiden seumur hidup".

DPR hasil Pemilihan Umum (1955) yang telah bekerja selama 8 bulan dan menyatakan dirinya mau bekerja terus dalam rangka UUD 1945, pada tanggal 5 Maret 1960 dibubarkan oleh Presiden, karena persoalan Anggaran Belanja Negara. Dan kemudian Presiden mengangkat anggota-anggota DPR baru yang disebut DPR-Gotong Royong (DPR-GR). DPR menurut ketentuan-ketentuan UUD 1945, merupakan perwakilan rakyat yang mengawasi atau mengontrol tindakan-tindakan pemerintah, dalam Demokrasi Terpimpin tidak lebih dari pada lembaga yang mensahkan secara formal yuridis apa yang diputuskan dan apa yang dilakukan oleh Presiden/Kepala Pemerintahan, seperti dalam hal anggaran pendapatan dan belanja negara, politik luar negeri dan lain-lain[20].

Pada umumnya Partai Politik (Parpol) dan organisasi massa (Ormas) mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maupun Penpres No. 7 tahun 1959 yang mengatur tentang dapat atau tidaknya sesuatu parpol diakui eksistensinya dalam Negara Republik Indonesia. Dalam Penpres tersebut disebutkan ketentuan-ketentuan mewajibkan parpol mencamtumkan, baik dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun dalam programnya; "tidak bertentangan dengan azas dan tujuan negara, menerima Pancasila dan UUD 1945, menghukum partai-partai yang terlibat dalam pemberontakan". Sehubungan dengan Penpres No. 7 tahun 1959 itu, maka Masyumi, dan PSI terkena dan kemudian dibubarkan. Demikianlah dengan tidak memakan waktu lama setelah Dekrit itu, maka dibentuklah Kabinet Kerja dengan program kerja: sandang pangan, keamanan dalam negeri dan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Pada pertengahan tahun 1960 telah selesai disusun Lembaga tertinggi negara baik yang disebutkan dalam UUD 1945 maupun tidak, misalnya DPA, DPR-GR, MPR (S), Depernas, Front Nasional dan lain-lain. Semua keanggotaan Lembaga-lembaga tersebut disusun dengan komposisi gotong-royong yang menurut Presiden Sukarno merupakan pengejawantahan dari Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi lembaga-lembaga tersebut tidak banyak berbuat berhubungan dengan pembatasan tugas yang diberikan oleh Presiden Sukarno. Mereka menetapkan apa yang diajukan dan diinginkan oleh Presiden/Kepala Pemerintahan. Sementara itu TNI telah ikut aktif menyumbangkan tenaga dan pikirannya, terutama dalam sidang Dewan Nasional, misalnya saja setelah mempelajari rumusan "Rancangan usul Dewan Nasional kepada Dewan Menteri tentang tindakan yang harus diambil untuk mencapai Demokrasi Terpimpin".

Diajukan pula pendapat, bahwa Demokrasi Terpimpin tetap Demokrasi dan bukan Diktatur, jadi kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat melalui Pemilihan Umum. Sejak diumumkannya SOB pada bulan Maret 1957 terdapatlah sesuatu dasar hukum bagi TNI untuk berperan dan bergerak di bidang non militer.

Adapun PKI sudah sejak semula mendukung konsepsi Presiden dengan perhitungan bahwa dengan mendukung konsepsi tersebut PKI akan dapat menuju ke realisasi Nasakom (Nasakomisasi Kabinet Gotong Royong). Dengan menggarapnya secara sistematis, ditimbulkan keyakinan pada diri Presiden Sukarno, bahwa tanpa PKI, ia akan menjadi lemah terhadap TNI. Konsepsi Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) pada hakekatnya berarti mengikutsertakan dan memasukkan komunisme ke dalam pelaksanaan Pancasila. Padahal Komunisme didasarkan atas dialektis-materialisme, jadi anti Ketuhanan, lagi pula komunisme mengandung konsepsi perjuangan klas, yang asing bagi Pancasila.

Dalam periode itu semuanya diatur oleh Pemerintah, sampai-sampai kepada kreasi-kreasi seni dan selera hiburan. Bahkan band *Koes Bersaudara* pernah ditahan atas tuduhan menyebarkan budaya nekolim. Jaminan dan perlindungan hukum tidak ada. Banyak pemimpin yang anti Demokrasi Terpimpin ditangkap tanpa diadili, dituduh kontra-revolusi, agen nekolim, subversib dan sebagainya. Dalam usaha mencapai cita-cita untuk mewujudkan sosialisme dan kemudian komunisme di Indonesia PKI menjalankan tindakan-tindakan yang dapat disimpulkan:

Dalam negeri: berusaha keras untuk memecah belah atau menyusupi kekuatan partai atau organisasi massa atau badan-badan lainnya dari pihak lawan. Di bidang pendidikan berusaha memasukkan marxisme-Lenimisme sebagai salah satu mata pelajaran wajib. Di bidang militer berusaha untuk mengindoktrinasikan perwira-perwira dengan ajaran komunisme dan membina sel-sel di kalangan ABRI.

Luar Negeri: berusaha untuk mengubah politik luar negeri yang bebas aktif ke arah politik yang condong ke blok komunis[21]. Landasan dari semua gerakan PKI adalah Manipol yang menyatakan, bahwa rakyat Indonesia sedang menyelesaikan Revolusinya atau lebih populer: revolusi belum selesai. Dengan dalih ini PKI mengajak rakyat untuk menyelesaikan revolusi menurut ketetapan-ketetapan yang telah ditentukannya. Selanjutnya untuk mengaburkan tuduhan bahwa PKI bersifat internasional dan anti agama, PKI mengakui menganut Manipol (yang dikatakan sudah mencakup Pancasila), dengan dalih bahwa manipol adalah satu-satunya doktrin Revolusi Indonesia yang harus dipegang teguh. Apalagi dengan adanya anjur-

20. Nugroho Notosusanto (editor) *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka Jakarta 1977, hal. 109.

21. *Ibid.*, halaman 107.

an Presiden Sukarno supaya jangan berkomunisto fobi maka amanlah PKI dari serangan. Pada awal tahun 1964, diketemukan dokumen-dokumen mengenai rencana perjuangan PKI yang pula berisi rencana merebut kekuasaan. PKI menyatakan bahwa dokumen itu palsu. Tetapi sikap Presiden Sukarno yang melindungi PKI yang dominasinya mutlak pada panggung politik dewasa itu, menyebabkan partai lainnya dan ABRI tidak dapat bertindak mengusut rencana PKI itu secara terang-terangan. Adanya ucapan Aidit di depan Kursus Kader Revolusi pada tanggal 16 Oktober 1964 bahwa "Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan kalau kita sudah bersatu, Pancasila tidak perlu lagi" dapat dilaluinya dengan selamat, karena pemerintah tidak mengambil tindakan. Atas petunjuk Presiden Sukarno, PKI dan ormasnya dapat dengan aman melakukan intimidasi dan teror politik terhadap pihak-pihak dan tokoh-tokoh yang dianggap lawannya dengan menyatakan siapa saja yang menentang nasakom apalagi anti PKI, adalah kontra-revolusioner dan anti Bung Karno.

Dengan adanya perlindungan resmi dari Presiden, Ormas PKI meningkatkan aksi-aksinya yang lebih dikenal dengan aksi sepihak. Ormas PKI BTI (Barisan Tani Indonesia) di beberapa tempat mengacaukan pelaksanaan landreform. Terjadilah peristiwa Boyolali dan Bandar Betsy di mana buruh tani dihasut untuk merampas tanah milik pihak lain. Kedua peristiwa ini merupakan ujian untuk mengukur kekuatannya dalam menghadapi ABRI. Front Nasional juga mereka gunakan untuk melancarkan aksi-aksinya.

Sebagai reaksi atas teror PKI di bidang budaya dan pers, terbentuklah suatu kelompok budayawan yang mengajukan suatu Manifes Kebudayaan dan suatu kelompok wartawan dan penerbit surat kabar yang menamakan dirinya Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Kedua kelompok ini dengan caranya sendiri bermaksud memecahkan belenggu absolutisme PKI yang mengekang kegiatan kreatif mereka.

Mengenai Manifes Kebudayaan, yang ditakutkan PKI sebenarnya adalah terselenggaranya Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI) yang berhasil membentuk organisasi pengarang dengan nama Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI) yang dapat menghambat usaha mereka untuk menguasai bidang budaya. Oleh Presiden Sukarno Manifes Kebudayaan dan BPS kemudian dilarang setelah dikeluarkan tuduhan dibiayai CIA (badan intelijen Amerika Serikat).

Dua instansi sebagai alat komunikasi-masa yang vital, yaitu kantor Berita Antara dan Radio Republik Indonesia juga mereka kuasai. Di antara parpol-parpol yang ada masih ada satu yang mengadakan perlawanan aktif terhadap PKI, yakni partai Murba. Akhirnya PKI berhasil mempengaruhi Presiden Sukarno sehingga partai Murba dibubarkan pada bulan September 1964.

Terhadap ABRI dilakukan usaha menguasai melalui komisaris politik Nasakom yang mendampingi Panglima atau Komandan pada

setiap I-selon. Usaha itu tidak berhasil karena keteguhan sikap pimpinan ABRI. Semboyan "Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu" yang juga dibuatkan lagunya, dibalas dengan semboyan "Nasakom jiwaku", yang berarti Nasakom dianggap ada pada setiap organisasi, tanpa menempatkan tiga orang komisaris politik ke dalamnya yang berasal dari PNI, NU dan PKI yang dikatakan mewakili Nasakom.

Adanya saran RRC kepada Presiden Sukarno agar dibentuk Angkatan ke-5 di samping Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polisi dengan tujuan memberikan kekuatan bersenjata kepada PKI yang terdiri dari Sukarelawan Dwikora yang sudah dikerahkan, juga memenuhi kegagalan. Pada akhirnya PKI melakukan kampanye untuk pembentukan kabinet Nasakom, yang baru mencapai hasil sedikit dengan masuknya pemimpin-pemimpin utama PKI sebagai menteri-menteri tanpa portofolio.

Sejak periode 1960/1961 keadaan neraca perdagangan Indonesia belum menampakkan suatu kemajuan, malahan telah menunjukkan perkembangannya yang lebih memburuk. Index biaya hidup menunjukkan perkembangan yang makin menaik: dari tahun 1961 mengalami kenaikan 70% pada tahun 1962 dalam waktu 3 bulan atau kenaikan 225% bila dibandingkan dengan angka indexs tahun 1960. Meskipun pemerintah telah berusaha memperbanyak ekspor Indonesia, tetapi belum berhasil. Hal ini disebbkan para eksportir masih selalu berorientasi pada barang ekspor tradisional Indonesia seperti karet, kopra, dan sebagainya.

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka *export drive*, misalnya sistem Bukti Export (BE), SIVA dan peraturan lainnya mengalami kegagalan. Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden telah mengumumkan berlakunya Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dengan adanya Deklarasi Ekonomi tersebut, maka pemerintahlah yang sepenuhnya memimpin dalam bidang Ekonomi. Peraturan pelaksanaan Dekon tanggal 26 Mei 1963 ternyata telah menimbulkan kesulitan, karena tidak sesuai dengan Dekon itu sendiri. Pemerintah kemudian menggantinya dengan peraturan baru yang dikenal dengan nama peraturan 17 April 1964 di mana antara lain ditetapkan adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (*Kotoe*) dan Kesatuan Operasi (*Kesop*) dalam usaha perdagangan. Kebijaksanaan pemerintah tersebut ternyata telah mengundang reaksi menolak peraturan tersebut, karena dengan peraturan tersebut belum bisa segera dirasakan perbaikan ekonomi yang merata bagi rakyat.

Mengenai strategi dasar ekonomi yang ditempuh pemerintah pada waktu itu, pada tahap pertama berusaha menciptakan susunan ekonomi yang bersifat demokratis serta bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme. Tahap pertama sebenarnya merupakan persiapan menuju pada alam masyarakat sosialis Indonesia, di mana setiap orang akan dijamin hidupnya secara layak. Dalam prakteknya ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem lisensi yang hanya

menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan istana. DPR tidak berfungsi sehingga pernah pada awal 1965 sekaligus mengesahkan 50 Undang-Undang, termasuk Angkatan Belanja Negara. *Deferred payment*, proyek mercu suar, cetak uang kertas tanpa batas, inflasi 600% merupakan ciri-ciri ekonomi Demokrasi Terpimpin.

Politik Luar Negeri poros-porosan bertentangan dengan prinsip politik bebas dan aktif. Adanya konfrontasi dengan Malaysia tidak membawa keuntungan bagi rakyat dan hubungan internasional, sehingga Indonesia makin diasingkan dari pergaulan bangsa-bangsa. Pada waktu itu PKI telah berhasil membelokkan politik luar negeri Indonesia ke arah blok komunis, sehingga tercipta poros Jakarta-Peking. Karena itu kita makin terikat pada RRC. Timbullah gagasan yang membagi kekuatan-kekuatan politik dunia (*New Emerging Forces* sebagai tandingan pihak kolonial (*Old Established Forces*) kenyataannya berjalan dengan Doktrin "dua kubu" komunis. Sementara itu atas desakan PKI akhirnya Indonesia telah keluar dari PBB yang dianggap sudah tidak berfungsi lagi.

Dalam bidang sosial budaya kelihatan kegigihan PKI mempengaruhi kehidupan sosial budaya dengan ciri-ciri budaya asing komunis. Sebaliknya buku-buku majalah-majalah serta film-film yang berbau Barat dikatakan merusak jiwa masyarakat dan dilarang. Hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda sejak tanggal 17 Agustus 1960 diputuskan secara sepihak oleh Indonesia. Hal ini terjadi setelah perjuangan diplomasi dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan.

Selain terjadi pendekatan dengan RRC, seagai akibat adanya bantuan kredit jangka panjang dari Uni Sovyet dan sekutunya, negara-negara itu kemudian berpengaruh besar kepada perkembangan politik dan ekonomi Indonesia. Misi-misi dan pertukaran budaya lebih banyak dilakukan dengan negara-negara komunis, terutama RRC. Di bidang Olahraga, diselenggarakannya *Ganefo* (*Games of The New Emerging Forces*) dijadikan alat oleh RRC untuk mengukur kekuatannya di bidang olahraga.

Salah satu program Kabinet Kerja ialah pembebasan Irian Barat yang telah lama merupakan masalah nasional. Persetujuan Konperensi Meja Bundar (KMB) pasal 1 mengenai "penyerahan" kedaulatan atas Indonesia berbunyi: Kerajaan Belanda menyerahkan sepenuhnya atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat". Akan tetapi KMB tidak berhasil menyelesaikan salah satu masalah, yaitu menyerahkan kekuasaan oleh Belanda atas Irian Barat kepada Indonesia. Oleh karena itu untuk masalah tersebut kemudian dicapai suatu kompromi, yakni bahwa dalam satu tahun sesudah tanggal "penyerahan" kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah status Irian Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.

Setelah setahun dan Irian Barat masih tetap dikuasai oleh kerajaan Belanda dan usaha-usaha secara bilateral telah mengalami kegagalan, maka pemerintah Indonesia membawa masalah Irian Barat ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berulang-ulang persoalan Irian diajukan ke Sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan yang positif. Pada sidang ke-12 Majelis Umum PBB tahun 1957, masalah Irian kembali diperbincangkan, akan tetapi juga tidak berhasil. Pihak kerajaan Belanda tidak mau menyerahkannya bahkan untuk membicarakannya saja mereka tidak mau lagi.

Jalan damai tidak berhasil ditempuh, sehingga pihak Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Maka dilancarkanlah aksi-aksi pembebasan Irian di seluruh tanah air, yang dimulai dengan pengambilalihan milik perusahaan Belanda di Indonesia oleh kaum buruh dan karyawan. untuk mencegah anarkhi dan untuk menampung keinginan rakyat banyak, maka Kasad selaku Penguasa Perang Pusat memutuskan untuk mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah. Kelanjutan dari pada hubungan yang tegang antara Belanda dan Indonesia itu mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1960. Pada waktu itu Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda.

Dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1961 kembali masalah Irian Barat diperdebatkan. Sekretaris Jenderal PBB U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker untuk mengajukan suatu usul penyelesaian masalah Irian Barat kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Usul Bunker tersebut menyebutkan pada pokoknya: agar pihak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dan penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam jangka waktu dua tahun.

Pemerintah RI pada prinsipnya dapat menyetujui usul tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Pemerintah Kerajaan Belanda mempunyai pendapat sebaliknya: Pihak Belanda akan mau melepaskan Irian Barat dengan membentuk dulu perwalian di bawah PBB untuk kemudian membentuk Negara Papua[22]. Sikap pemerintah Belanda itu di Indonesia disambut dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan bersenjata membebaskan Irian Barat. Untuk itu maka pada tahun 1961 bertepatan dengan hari ulang tahun dimulainya aksi militer ke II Belanda pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Sukarno mengucapkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta.

Tri Komando Rakyat itu adalah:

1. Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan Belanda Kolonial.
2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat.
3. Bersiap untuk mobilisasi umum.

Dalam rangka persiapan suatu kekuatan militer untuk merebut Irian Barat Pemerintah RI mencari bantuan pembelian senjata ke luar negeri. Pada mulanya diharapkan pembelian di negara-negara Barat terutama Amerika Serikat tetapi tidak berhasil. Kemudian usaha bantuan pembelian senjata itu dilanjutkan, kali ini ke negara-negara blok komunis terutama Uni Soviet. Demikianlah pada bulan Desember 1960, suatu misi di bawah pimpinan Menteri Keamanan Nasional/Kasad, Jenderal A.H. Nasution bertolak ke Moskow dan berhasil mengadakan suatu perjanjian pembelian senjata. Misi tersebut disusul dengan missi kedua dan ketiga (untuk penyempurnaan dan tambahan), dan kemudian disusul pula dengan suatu missi Menteri Keamanan Nasional/Kasad mengunjungi beberapa negara: India, Pakistan, Muangthai, Filipina, Australia, Selandia Baru, Jerman, Perancis dan Inggris untuk menjajaki dan mendapatkan kesan atau kepastian dari negara-negara tersebut." Tentang bagaimana sikap negara-negara itu, seandainya terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda. "Kesimpulan dari Menteri Keamanan Nasional/Kasad dari hasil penjajagannya itu: bahwa negara-negara tersebut tidak ada yang terikat kepada Belanda untuk bidang bantuan militer, meskipun negara-negara tersebut menekankan supaya perang dihindari dan bahkan ada yang mendukung posisi Belanda. Pembelian senjata dari Uni Soviet ditujukan kepada usaha memperkuat TNI terutama pembangunan pertahanan udara, pertahanan marinir serta pembentukan kekuatan ofensif, terutama di laut dan di udara.

Dengan demikian Belanda mulai menyadari bahwa bila Irian Barat tidak diserahkan secaa damai kepada Indonesia dalam waktu tertentu, maka pasti Indonesia akan berusaha membebaskannya dengan kekuatan militer. Menghadapi persiapan-persiapan Indonesia itu Belanda pun tidak tinggal diam, mula-mula diajukan protes kepada PBB dengan menuduh Indonesia melakukan agresi , selanjutnya Belanda memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bala bantuan militernya, dan mengirim kapal perangnya ke perairan Irian Barat di antaranya kapal induk Karel Doormann.

Dengan diucapkannya Trikora mulailah Konfrontasi total terhadap Belanda. Dan guna menyelenggarakan operasi-operasi militer untuk merebut Irian Barat maka pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan No. I tahun 1962 membentuk Komando Mandala yang bertanggung jawab atas segala kegiatan Operasional ABRI serta Sukarelawan.

Sebelum Komando Mandala Pembebasan Irian Barat terbentuk, terjadi peristiwa Pertempuran Laut Aru antara 3 MTB kita melawan kapal perusak Belanda. Dalam pertempuran itu gugur Deputy Kepala Staf Angkatan Laut Komodor (Laksamana Pertama) Yos Sudarso yang tenggelam dengan MTB Macam Tutul. Peristiwa itu mendorong pimpinan angkatan Perang untuk mempercepat pembentukan

Komando Mandala. Setelah Komando terbentuk, barulah dapat diambil langkah-langkah konkrit untuk membebaskan Irian. Pada mulanya Belanda mencemoohkan persiapan-persiapan tersebut. Mereka mengira, bahwa pasukan Indonesia tidak mungkin dapat masuk ke wilayah I Irian Barat. Tetapi setelah ternyata bahwa operasi-operasi infiltrasi dari pihak Indonesia berhasil, dan bahkan kota Teninabuan jatuh ke tangan pasukan ABRI, maka Belanda bersedia untuk duduk pada meja perundingan guna menyelesaikan sengketa Irian Barat.

Dalam pada itu pemerintah kerajaan Belanda sedikit banyak mendapat tekanan dari pihak Amerika Serikat untuk berunding, untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya di mana masing-masing memberi bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa, yakni Republik Indonesia dan kerajaan Belanda. Dengan demikian pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda di New York yang terkenal dengan perjanjian New York. Perjanjian itu berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Duta Besar Ellsworth Bunker dari Amerika Serikat, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah.

Soal yang terpenting dalam perjanjian itu, ialah perihal penyerahan administrasi di Irian Barat dari pihak kerajaan Belanda kepada PBB. Untuk kepentingan tersebut dibentuklah *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) yang akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Republik Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Sedangkan Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan penentuan pendapat rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969, dengan ketentuan bahwa: kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, akan menerima hasilnya.

Akhirnya penyelesaian sengketa Irian Jaya dengan penyerahan administrasi dilakukan pada tanggal 1 Mei 1963 dan pemulihan kembali hubungan diplomatik antara kedua negara dilakukan pada tahun 1963 itu juga dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag dan kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta[23].

Dalam periode ini Indonesia menentang pembentukan Malaysia, karena sebagai akibat pengaruh PKI, Presiden Sukarno menganggap bahwa Malaysia adalah Proyek Neo-Kolonialisme Inggris, yang membahayakan Revolusi Indonesia yang belum selesai". Karena itu Malaysia harus dicegah berdirinya dan setelah tetap dipaksanakan berdirinya, harus dihancurkan.

22. Ruslan Abdulgani, *25 Tahun Indonesia – PBB*, Gunung Agung, Jakarta, 1977, hal. 17.

23. Nugroho Notosusanto, (Editor), *op. cit.*, hal. 115.

Untuk melaksanakan niat itu dilancarkan konfrontasi bersenjata yang dilakukan oleh Sukarelawan yang sebagian diambil dari ABRI dan sebagian dari masyarakat luas. Berdasarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), yakni:

1. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunai untuk membubarkan negara Boneka Malaysia.

Para gerilyawan Indonesia berusaha masuk ke daerah Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara dan di sana melancarkan operasi-operasi terhadap Angkatan Perang Persemakmuran Inggris.

Dalam rangka penyelesaian sengketa dengan Malaysia secara damai, atas prakarsa Filipina pada tanggal 9 — 17 April 1963 diadakan Konperensi Tingkat Wakil-wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) dari Indonesia, Malaya dan Filipina. Pertemuan itu membicarakan rencana pembentukan Federasi Malaysia dan suatu konfederasi antara ketiga negara tersebut dalam rangka kerjasama. Selain dari pada itu pertemuan tersebut merupakan suatu persiapan konferensi tingkat Menteri Luar Negeri yang akan diadakan pada bulan Juni 1963.

Pertemuan Tokyo antara Presiden Sukarno dengan Perdana Menteri Tengku Abdurachman yang diadakan pada tanggal 1 Juni 1963, agar mengurangi ketegangan dan meratakan jalan bagi diadakannya konferensi puncak tiga negara di Manila. Menteri Luar Negeri dari ketiga negara tersebut mengadakan pertemuan dari tanggal 7 — 11 Juni 1963 di Manila dalam rangka persiapan konperensi puncak. Pertemuan itu menghasilkan suatu pengertian tentang masalah-masalah yang timbul sebagai akibat rencana pembentukan federasi Malaysia. Pada waktu sedang dilakukan persiapan-persiapan ke arah terselenggaranya pertemuan puncak, maka pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdurachman menandatangani dokumen mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Dengan demikian segala yang telah dirintis bersama tentang pembentukan Federasi Malaysia menjadi cair, dan dianggap sudah menyimpang dari mufakat semula. Meskipun demikian pertemuan puncak dari tiga kepala negara/kepala pemerintahan tersebut diselenggarakan juga pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 5 Agustus 1963 di Manila. Pertemuan tersebut menghasilkan 3 dokumen: Deklarasi Manila, Persetujuan Manila dan Komunike Bersama. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia ketiga negara/kepala pemerintahan tersebut mufakat untuk meminta Sekretaris Jenderal PBB menyelidiki keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia itu. Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Malaysia, bilamana keinginan rakyat telah diselidiki oleh suatu otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu Sekretaris Jenderal PBB atau wakilnya.

Semula pembentukan Federasi Malaysia itu akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1963 di London, akan tetapi kemudian diundurkan. Ternyata pada tanggal 16 September 1963, walaupun missi PBB belum menyampaikan hasil laporan penyelidikannya mengenai kehendak rakyat di daerah-daerah itu, pembentukan Malaysia tetap dilaksanakan. Pemerintah Republik Indonesia berpendapat, bahwa tindakan itu suatu pelanggaran terhadap pernyataan bersama, yang tegas menyebutkan: penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diumumkan.

Dalam memuncaknya ketegangan, terjadilah demontrasi di Kualalumpur terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia dan demonstrasi di jakarta terhadap Kedutaan Besar Malaysia dan Kedutaan Besar Inggris. Maka pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik dengan Kualalumpur oleh pemerintah Republik Indonesia diputuskan secara sepihak. Maka pada akhirnya pecahlah permusuhan antara Republik Indonesia dengan Malaysia sejak diucapkannya Dwikora (Dwi Komando Rakyat).

Pada tanggal 3 September 1964, pemerintah Malaysia meminta kepada Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan pengaduannya mengenai "agresi Indonesia berupa invasi lintas udara oleh pasukan payung Indonesia" di Malaysia bagian selatan. Dewan Keamanan menyetujui permintaan Malaysia itu, sehingga masalah itu diperdebatkan dalam sidang Dewan Keamanan.

Perkembangan Politik Dwikora ini tidak lepas dari kedudukan terkemuka PKI dalam konstelasi Demokrasi Terpimpin, sehingga akhirnya membelokkan politik luar negeri Indonesia menyimpang dari politik bebas aktif, masuk ke dalam ril politik luar negeri RRC dengan adanya apa yang disebut poros Jakarta — Peking. Dilihat dari sudut kepentingan RRC, konfrontasi Dwikora itu sangat menguntungkan karena menyedot potensi negara-negara yang dianggap musuh oleh RRC. Tetapi dilihat dari sudut kepentingan indonesia, yang ingin memainkan peranan yang positif di Asia Tenggara, konfrontasi itu justru sangat merugikan karena untuk sementara melenyapkan simpati jutaan orang Malaysia. Ditinjau dari sudut militer, konfrontasi Dwikora tidak merupakan sukses, berlainan dengan operasi-operasi pembebasan Irian Jaya.

Sebagaimana kita ketahui pada sidang Umum PBB tahun 1960, Presiden Sukarno hadir dan mengucapkan suatu pidato dengan judul "Membangun Dunia Kembali". Isi pidato tersebut menyebutkan antara lain "Kemungkinan retooling PBB". Ternyata saran Presiden Sukarno itu tidak mendapat sambutan yang serius dari PBB

Berhubungan dengan masuknya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan maka Presiden Sukarno mengulangi lagi Pidato "Membangun Dunia Kembali", yaitu PBB sekarang adalah percerminan dari keadaan dunia tahun 1945, sewaktu masih belum ba-

nyak terdapat negara negara di Asia Konstelasi dunia, komposisi dunia sudah berubah, tetapi PBB tidak berubah PBB tetap tinggal seperti PBB tahun 1945 Itulah sebabnya maka PBB perlu dirombak. Oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum berubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita Indonesia akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang[24].

Jelas dari isi pidato tersebut, bahwa Presiden Sukarno mengkaitkan masuknya Malaysia ke dalam Dewan Keamanan dengan alasan untuk keluar dari PBB. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di PBB menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB isi pidato Presiden Sukarno itu dengan tujuan, supaya para anggota PBB tidak menyokong masuknya Malaysia ke dalam Dewan Keamanan dan memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB.

Inilah taktik terakhir di forum PBB untuk memencilkan Malaysia, yang hasilnya malahan Indonesia yang akan keluar sendiri dari PBB, karena pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan, sedang Malaysia itu yang menjadi sasaran politik konfrontasi Dwikora Indonesia. Maka terpaksalah Presiden Sukarno mengeluarkan Indonesia dari PBB dan dengan demikian bertambahlah isolasi negara kita. Kemudian Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio resmi menyatakan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB

Momentum yang diperoleh Partai Komunis Indonesia (PKI) selama jaman Demokrasi Terpimpin mencapai klimaksnya pada pertengahan tahun 1965. Dalam suatu aliansi dengan Presiden Sukarno mereka telah membagi kekuatan-kekuatan politik di Indonesia atas kawan dan lawan, yang kawan dirangkul, yang lawan disingkirkan yang masih ragu-ragu digarap supaya menjadi kawan

Sejak tahun 1964 dan berjalan selama tahun 1965, sikap PNI semakin agresif Sesuai dengan anjuran Ketuanya D.N Aidit, PKI mengajak semua kawannya untuk "meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya" Melalui rapat-rapat umum, kampanye pers dan radio serta kampanye poster dan papan-papan propaganda raksasa di tepi-tepi jalan mereka menghasut rakyat untuk memusuhi golongan-golongan yang mereka anggap lawan dengan menggambarkan mereka itu sebagai setan desa, setan kota, kapitalis birokrat (kabir)" yang harus dibunuh dan dibasmi.

Dan usaha mereka tidak terbatas kepada kata-kata dan gambar-gambar belaka Di berbagai daerah mereka melancarkan aksi-aksi sepihak di mana kader-kader mereka menghasut petani-petani untuk merampas tanah yang bukan haknya dengan semboyan *landreform*

24. *Ibid.*, hal. 118

Padahal misalnya saja di Jawa sudah tidak terdapat lagi tanah cukup untuk di "landreform"kan. Satu-satunya cara untuk memberikan tanah kepada petani miskin adalah dengan jalan transmigrasi.

Sesuai dengan doktrinnya setiap partai komunis, di mana pun di dunia bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dan menyingkirkan kekuatan-kekuatan politik lainnya dalam rangka menegakkan "diktatur proletar" yang dilaksanakan oleh partai. Usaha merebut kekuasaan negara itu selalu dilakukan dengan kekerasan, dengan kudeta atau dengan menggunakan kekuatan tentara komunis seperti di Eropa Timur maupun di Cina dan Asia Timur. Di Indonesia PKI telah pula berusaha merebut kekuasaan negara dengan Pemberontakan Madiun yang dimulai pada tanggal 18 September 1948. Usaha itu gagal dan PKI selama beberapa tahun bergerak di bawah tanah. Tetapi sejak tahun lima puluhan PKI muncul kembali dan ikut dalam kehidupan politik partai. Nampaknya seolah-oleh PKI hendak mencapai kekuasaan negara dengan jalan parlementer, terutama setelah jaman Demokrasi Terpimpin memperoleh dukungan penuh dari Presiden Sukarno.

Tetapi kemudian terbukti bahwa mereka melaksanakan strategi dua-muka mempergunakan cara-cara parlementer secara maximal untuk memperlihatkan wajah demokrasi parlementer yang respektabel, tetapi sementara mereka mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu kondisinya matang beralih kepada cara "lain", yakni dengan menggunakan kekerasan atau kudeta. Untuk cara "lain" itu mereka harus dapat membina suatu blok di dalam Angkatan Bersenjata yang terdiri atas kader-kader PKI atau setidak-tidaknya simpatisan-simpatisan mereka. Dari pemberontakan Madiun mereka belajar, bahwa tidak cukup untuk menguasai pasukan-pasukan tempur, melainkan mutlak perlu pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata dinetralisasi, dan jika perlu dilikuidasi

Untuk melaksanakan strategi dua-muka itu Ketua D.N. Aidit memakai dua aparat yang berbeda dan terpisah. Untuk cara-cara demokratis parlementer ia mempergunakan aparat partai yang terbuka, sedangkan untuk cara "lain" dipergunakan Biro Khusus. Tugas Biro Khusus ini adalah untuk merancang mempersiapkan dan melaksanakan perebutan kekuasaan dengan kekerasan atau dengan jalan kudeta. Untuk melaksanakan tugasnya, agen-agen Biro Khusus secara sistematis telah melakukan usaha "pembinaan" terhadap "perwira-perwira ABRI" mulai dari Panglima Angkatan dan Polisi sampai kepada kepala-kepala seksi staf di komando-komando daerah.

Menurut suatu dokumen yang diketemukan oleh Pemerintah pada tahun 1964, PKI memperkirakan bahwa pada tahun 1966 kondisi akan matang dan situasi akan menguntungkan untuk beralih dari taktik demokratis-parlementer ke taktik kekerasan. Pihak PKI menyangkal keras otentisitas daripada dokumen itu dan mencegah diperbincangkan dokumen itu secara luas dan terbuka

Pada bulan Agustus 1965 Presiden Sukarno sakit keras dan menurut suatu tim dokter yang khusus didatangkan dari Republik Rakyat China ada kemungkinan ia akan lumpuh jikapun tidak meninggal. Mengingat situasi perkembangan yang demikian itu D.N. Aidit memutuskan untuk mempercepat bagan waktu peralihan dari taktik demokratis-parlementer ke taktik kekerasan. Sasaran utama daripada tindakan kekerasan itu adalah pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat yang ternyata tidak berhasil dibina oleh Biro Khusus.

Untuk beberapa bulan lamanya Biro Khusus telah melancarkan kampanye fitnah yang berisi berbagai isyu seolah-olah pemimpin-pemimpin TNI-AD membentuk "Dewan Jenderal" itu adalah agen Amerika dan Inggris yang pada waktu itu dinyatakan sebagai "Nekolim" (Neo-Kolonialis/Imperialis).

Untuk melaksanakan rencananya itu Biro Khusus mengerahkan agen-agennya di dalam ABRI yang pemukanya antaranya adalah Brigjen Suparjo dan Letnan Kolonel Untung dari TNI-AD. Kolonel Sunardi dari TNI-AL, Letnan Kolonel Heru Atmojo dari TNI-AU dan Letnan Kolonel Anwas dari Polisi Negara. Mereka menentukan sasaran antara lain menyingkirkan pimpinan TNI-AD yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani dan menggantinya dengan tokoh-tokoh simpatisan PKI atau setidak-tidaknya tokoh-tokoh yang bukan lawan PKI, dan membentuk pemerintah Nasakom berupa Dewan Revolusi dengan mendemosionasi Kabinet Dwikora yang ada. Jika sasaran antara sudah tercapai akan dituju sasaran sesungguhnya, yakni secara terang-terangan merebut kekuasaan negara dan mengganti Pancasila serta UUD-1945. Kepada gerakan itu yang digambarkan sebagai suatu usaha bersama kekuatan-kekuatan "Progresif Revolusioner", diberikan nama Gerakan 30 September sesuai dengan saat mereka mulai bergerak. Untuk memimpin Gerakan 30 September, D.N. Aidit menunjuk Syam (Kamaruzaman) Ketua Biro Khusus PKI.

BAB IV
PEMBERONTAKAN G 30 S/PKI DAN GUGURNYA D.I. PANJAITAN

1. Rencana pemberontakan

Setelah pembentukan blok dalam PKI (Fraksi Ilegal PKI), yang pada hakekatnya merupakan benalu ganas pada tubuh setiap lembaga negara maupun Lembaga-Lembaga masyarakat (terutama pembentukan sel-sel dalam tubuh ABRI, khususnya di dalam tubuh Angkatan Darat), mencapai taraf yang mutlak diperlukan, maka tahap perjuangan PKI memasuki babak yang akhir. Perayaan Hari Ulang Tahun PKI yang ke-45 secara besar-besaran pada tanggal 23 Mei 1965 di Jakarta pada hakekatnya merupakan pameran kekuatan sebagai isyarat bahwa PKI sudah siap tempur. Pada saat itu dikomandokanlah oleh Ketua CC PKI D.N. Aidit kepada seluruh unsur-unsurnya untuk meningkatkan situasi ofensif revolusioner sampai ke puncaknya.

Pelaksanaan komando PKI ini dilakukan dalam bentuk kontradiksi di segala bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, sehingga menciptakan situasi revolusioner. Aksi massa itu dikobarkan dan dipersenjatai dengan ajaran Marxisme-Leninisme serta seruan slogan sesuai dengan program tuntutan PKI yang antara lain berbunyi:

a. Ganyang 7 (tujuh) setan desa.
b. Ganyang 3 (tiga) setan kota.
c. Ganyang kapitalis birokrat.
d. Bentuk Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom sekarang juga.
e. Bentuk Angkatan ke-V.
f. Adakan Pemilu ke-II.
g. Laksanakan Manipol dan Deklarasi Ekonomi secara konsekuen.
h. Intensifkan konfrontasi dengan Malaysia, dan bantu Vietnam Utara.
i. Ganyang kebudayaan ngak-ngik-ngok (kebudayaan Barat)[1].

Rangkaian kejadian dalam periode prolog G 30 S/PKI merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh PKI sendiri maupun oleh Presiden Sukarno. Kegiatan kedua pihak ini walaupun dapat dibeda-bedakan, akan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan, karena semuanya menjurus ke arah perebutan kekuasaan pada tanggal 1 Oktober 1965. Prolog G 30 S/PKI ditandai dengan aksi-aksi yang makin menghemat dan meluas di hampir segala bidang sehingga suatu keadaan yang makin hari makin gawat.

---

1 G 30 S/PKI, dikeluarkan oleh *Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban*, Jakarta, 1978, hal. 77.

Periode inilah yang sering disebut oleh PKI sebagai "tahap ofensif revolusioner", yakni periode yang penuh kegiatan untuk mendapat kemenangan politik dan psikologis, yang dilakukan di berbagai tempat. Gerakan di desa-desa yang disebut aksi-aksi sepihak ialah gerakan penyerobotan tanah dengan kekerasan di pelbagai daerah yang disponsori oleh BTI (Barisan Tani Indonesia), PKI, dan yang menimbulkan pemberontakan serta korban. Aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI dalam rangka pengembangan situasi ofensif revolusioner yang pada umumnya selalu melanggar hukum yakni mengerahkan massa dengan cara menghasut, mengadu kekuatan dan bertindak sewenang-wenang, mengganggu ketenteraman, mencampuri urusan pihak lain yang tidak pada tempatnya dan serba bertentangan dengan kebenaran dan keadilan serta peradaban.

Pada tanggal 15 Januari 1965 di desa Gayam (Kediri) seorang petani bernama Sudarno mengerjakan sawahnya. Tiba-tiba datang 1000 orang PKI menyerbu Sudarno dan menganiaya dengan mengemukakan alasan bahwa sawah itu tanah sengketa.

Kepala Desa yang mendengar peristiwa itu datang dan berniat menyelesaikan. Tetapi sial bagi Lurah karena begitu tiba terus dikeroyok dan dianiaya dengan senjata tajam dan ditinggalkan begitu saja. Tindakan penganiayaan ini oleh yang berwajib dipandang sebagai Pelanggaran Pasal: 170; 333; 336 jo KUHP. Para pemimpin pengeroyok yang semuanya anggota PKI, masing-masing bernama Suwardi, Citro Atmojo, Sukarmin, Darmo, Ritmin, Wongso, Simin, telah diadili oleh Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 29 Mei 1965.

Kemudian pada tanggal 13 Januari 1965 jam 4.30 pagi, di waktu pajar, di desa Kanigoro (Kediri) kurang lebih 8.000 orang PKI di bawah pimpinan Pengurus Cabang Pemuda Rakyat/PKI bernama Suryadi, telah mengepung, menyerbu dan mengeroyok *Training Centre* Pemuda Islam Indonesia (PII) Mereka memasuki asrama dan rumah-rumah anggota Orpol/Ormas Islam, rumah kyai dan imam masjid, menginjak-injak kitab suci Al Qur'an sambil mengucapkan kata-kata penghinaan serta memukul seorang kyai dan imam serta beberapa orang guru yang mengajar di *Training Centre* tersebut, kemudian menggiring orang-orang/anak-anak dan siswa-siswa itu ke kantor Polisi. Suryadi beserta kawan-kawannya yang terdiri dari anggota PKI berteriak-teriak antara lain: "ganyang santri, ganyang Masyumi, ganyang serban, ganyang kapitalis, ganyang kontra revolusi, dulu waktu peristiwa Madiun besar kepala, kini rasakan". Tingkah laku mereka itu menunjukkan rasa benci PKI kepada kaum beragama dan hal ini menimbulkan protes dari segenap ummat Islam.

Di beberapa tempat mereka membalas kekejaman PKI itu, di mana aksi-aksi sepihak PKI langsung dilawan dengan aksi pisik dengan senjata tajam, sehingga banyak jatuh korban di pihak PKI sehingga aksi sepihak PKI itu mengendor Pemimpin PKI Suryadi, di beberapa saat setelah penyerbuan, ditangkap dan perkaranya diaju-

kan ke pengadilan negeri Kediri pada tanggal 14 Juni 1965. Sebagai pembelaan tentang mengapa menyerbu TC PII, dan tempat-tempat di sekitarnya, Suryadi menyatakan bahwa TC-PII itu telah diberikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. PKI memang selalu mempergunakan alasan yang berupa fitnah seperti: anti Pancasila, anti rakyat, anti revolusi dan lain sebagainya. Pada tanggal 11 Juli 1965 dalam persidangan pengadilan negeri Kediri, Jaksa menuntut agar Suryadi, pemimpin penyerbuan tersebut, karena melanggar pasal-pasal 333, 165 jo, 170 KUHP, dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Sementara itu karena kemarahan rakyat telah terjadi kampanye untuk menumpas PKI dan Ormas-ormasnya.

Peristiwa lain ialah sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang mendiami atau mengerjakan tanah secara tidak sah, yang telah diselesaikan secara baik. Kaum tani tersebut kemudian dihasut oleh orang-orang PKI yang tergabung dalam BTI/PKI dan berakibat jatuhnya korban Peltu Sujono yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawal tanah tersebut. Ia dikeroyok dan dianiaya sampai meninggal dunia. Kejadian ini sebenarnya sudah merupakan adu kekuatan, dalam arti pihak PKI memancing sampai beberapa jauh Angkatan Darat bertindak terhadap aksi yang dilancarkannya. Aksi semacam itu, yang dilakukan oleh PKI dengan Ormas-ormasnya, juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten dan berbagai tempat di seluruh Indonesia. Sebagai dalih, PKI selalu mengemukakan bahwa Angkatan Darat selalu memberi *"backing"* kepada mereka yang dirugikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Yang sesungguhnya ialah bahwa gerakan itu tak lain dari usaha mendorong situasi ofensif revolusioner sampai ke puncaknya dan sekaligus pula latihan efektif bagi massa PKI dan juga untuk melihat reaksi Angkatan Darat.

Peristiwa lain adalah penyerbuan terhadap Gubernuran di Surabaya pada tanggal 27 September 1965. Gabungan Organisasi Wanita Surabaya telah meminta agar penguasa daerah menunggu delegasinya yang akan datang ke Gubernuran Surabaya, untuk menyampaikan resolusi menuntut penurunan harga. Pada tanggal tersebut para penguasa daerah menunggu delegasi di tempat kediaman resmi Gubernur.

Tiba-tiba yang datang bukan wanita-wanita, melainkan anggota-anggota PKI/Pemuda Rakyat/CGMI (laki-laki) yang dengan berlari-lari memasuki halaman dan gedung Gubernuran dengan cara yang tidak sopan, di antaranya melalui pintu, jendela serta memecah kaca jendela, pot-pot bunga dan menghancurkan kursi-kursi dan dalam situasi yang demikian Gubernur terpaksa disembunyikan. Mereka mencari Gubernur di kamar-kamar sambil memukul pintu-pintu dan terus ke belakang karena mengira Gubernur lari ke kamar belakang. Menurut rencananya, sebagai hasil pemeriksaan kemudian, tujuan demonstrasi tersebut di samping mengusulkan penurunan harga bahan makanan sebagai dalih, juga sebagai acara pokok untuk menangkap Gubernur dan mengarak-araknya dengan berbagai hinaan dan

manakala berhasil, membunuhnya. Perlu diketahui bahwa Gubernur Jawa Timur itu dijabat oleh Brigadir Jenderal TNI Wiyono, karyawan Angkatan Darat. Penyelidikan terhadap perkara ini baru dalam tingkat permulaan dan tidak dapat diselesaikan, karena meletusnya G 30 S/PKI[2].

Dari contoh-contoh di atas dapat diketahui, bahwa setidak-tidaknya sejak bulan Agustus 1965, PKI secara sistematis mengadakan *Built Up* mental maupun fisik. Dalam hal ini mereka mempergunakan media komunikasi massa yang telah mereka kuasai, karena mereka telah dapat menduduki posisi menentukan di dalam kantor berita Antara, Persatuan Wartawan Indonesia (PKI), Radio Republik Indonesia (RRI) dan lain-lain. Instruksi pimpinan PKI dalam rangka *Built Up* itu adalah: "Mengembangkan situasi ofensif revolusioner sampai ke puncaknya dengan memperhebat persatuan dan menggerakkan aksi-aksi massa untuk mengganyang Kabir, Koruptor, Tuan Tanah, serta imperialisme "A.S.", seperti yang termaktub dalam instruksi PKI dalam rangka Ulang Tahun BTI-SOBSI-PR.

Dalam sambutan tertulis Ketua CC PKI kepada Sidang Pleno ke-III Pengurus Besar Pemuda Indonesia di Surabaya, terdapat pernyataan bahwa setiap insan revolusioner di dalam negeri adalah untuk memperhebat ofensif revolusioner di segala bidang untuk mengembangkan situasi revolusioner sampai ke puncaknya, yaitu sampai kepada dibersihkannya kaum Kabir dan Bermotor dari semua pimpinan aparatur politik, ekonomi dan keuangan. Sebagai contoh-contoh *Built Up* mental itu dapat dikemukakan cuplikan pidato fungsionaris PKI, Ormas serta simpatisan maupun berupa tulisan-tulisan di dalam pers yang mereka kuasai atau pengaruhi, antara lain, sebagai berikut:

a. DN. Aidit di depan Sukarelawan Departemen Penerangan pada tanggal 9 September 1965 antara lain menyatakan, "..... Kita berjuang untuk sesuatu yang pasti akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan dari pada bayi masyarakat baru itu. Sang bayi lahir dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat jadi besar".
b. Di depan Sidang Dewan Nasional SOBSI tanggal 4 September 1965 D.N. Aidit menyatakan, "..... Yang paling penting sekarang ini, bagaimana kita memotong penyakit kanker dalam masyarakat kita, yaitu setan kota. Kalau revolusi mau tumbuh dengan subur, kita harus menyingkirkan kaum dinasti ekonomi/kabir dan setan kota dari segenap aparatur politik dan ekonomi negara . Oleh karena itu berbagai daerah siap untuk melancarkan aksi mengganyang apa yang mereka namakan kabir, setan kota dan setan desa."

---

[2] *Ibid*, hal. 81

c. Pada tanggal 22 September 1965 D.N. Aidit menyatakan di hadapan karyawan BNI, "... Kabinet sekarang belum Nasakom, yang hanya mampu Nasakom. Oleh karena itu Kabinet berporos Nasakom harus segera dibentuk".

d. Dan pada tanggal 26 September 1965 D.N. Aidit berkata pada SARBUPRI, ".... Jangan hanya berjuang untuk satu ikan asin, tetapi berjuang juga *naar de politieke macht*, jangan menjadi landasan jadilah palu godamnya perjuangan untuk kabinet Nasakom dengan Menteri yang terkenal cinta dan didukung rakyat. Jangan seperti sekarang, mereka hanya hidup dari distribusi kewibawaan Bung Karno. Bila ini berhasil, kaum proletar tidak akan kehilangan sesuatu apa pun, kecuali belenggu mereka saja".

e. Moch Munir, Ketua Umum DPP SOBSI pada tanggal 26 September 1965 berkata kepada SARBUPRI, "Jadikanlah perkebunan perkebunan untuk markas pertahanan".

f. Pada tanggal 27 September 1965 D.N. Aidit berseru kepada para anggota IPPI, "Hati kita lebih dari pada lapar, kita tidak akan serahkan nasib kita kepada setan kota, kita akan ganyang dan kalahkan setan kota."

g. Tajuk Harian Rakyat tanggal 30 September 1965 dengan penuh/ancaman berbunyi, ".... Dengan menggaruk kekayaan negara setan kota ini mempunyai maksud politik yang jahat terhadap pemerintah dan revolusi. Mereka harus dijatuhi hukuman mati di depan umum. Soalnya tinggal pelaksanaannya, tuntutan adil rakyat pasti berhasil".

h. Pada tanggal 29 September 1965 di hadapan para peserta Kongres III CGMI, D.N. Aidit antara lain berseru, "Mahasiswa Komunis harus berani berpikir dan berani berbuat. Berbuat, berbuat, berbuat. Bertindak dan berbuat dengan berani-berani, sekali lagi berani."

i. Anwar Sanusi Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Front Nasional dan seorang pemimpin PKI, dalam pidatonya di hadapan para sukarelawan BNI pada tanggal 29 September 1965 antara lain berkata, "... Kita sedang dalam situasi di mana ibu Pertiwi sedang berada dalam hamil tua. Sang bidan siap dengan alat yang diperlukan untuk menyelamatkan sang bayi yang sudah lama dinanti-nantikan.

Sang bayi adalah kekuasaan politik yang sudah ditentukan dalam Manipol. Sukwan adalah salah satu alat penting di tangan sang bidan.

Ada segelintir setan yang mengancam keselamatan ibu pertiwi dan sang bayi akan dilahirkan."

Kampanye mengenai pengembangan situasi ofensif revolusioner dan kampanye mengenai isyu "Dewan Jendera!" ternyata juga dilancarkan di daerah-daerah pada waktu bersamaan. Hal ini dapat di-

buktikan dari laporan lima partai politik: PNI, NU, Partai Katolik, Parkindo, dan IPKI di Bali kepada Presiden Sukarno mengenai persiapan dan kegiatan petualangan "Gerakan 30 September – PKI". Dalam laporan itu antara lain dikatakan, ".... Mulai dilancarkan kampanye tentang Dewan Jenderal dan keharusan lahirnya bayi dari revolusi yang sudah hamil tua, dan secara terang-terangan sudah "me-macan-kertas"-kan pemerintah dan Menteri yang dianggap sebagai distribusi kekuasaan dan wewenang Bung Karno."

Kegiatan di kota-kota pun tidak kurang hebatnya, pelbagai aksi dilancarkan seperti aksi **pengganyangan** terhadap BPS (Badan Pendukung Sukarno-Isme), terhadap Manikebu (Manifesto Kebudayaan), terhadap Partai Murba dan lain-lain. Aksi sepihak di desa-desa, aksi revolusioner di kota-kota yang dibarengi dengan **perampokan bersenjata yang serentak merajalela di desa dan di kota,** kecil dan besar, bahkan di ibu kota adalah dalam rangka menciptakan situasi krisis di segala bidang kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Hal ini merupakan syarat mutlak yang diperlukan dan ciri-ciri khas menjelang terjadinya perebutan kekuasaan semacam gerakan 30 September/PKI pada tahun 1965. Sesungguhnya *Built Up* mental itu telah dimulai sejak lama sebelum bulan September 1965. Laporan politik D.N. Aidit kepada Sidang Pleno ke IV CC PKI yang diperluas tanggal 11 Mei 1965 berjudul, "Perhebat ofensif revolusioner di segala bidang", merupakan bukti yang tidak dapat disangkal.

Setelah PKI berhasil menyingkirkan lawan-lawannya yang ada dalam partai-partai atau ormas-ormas maupun secapa perseorangan maka tinggallah satu kekuatan sebagai penghambat utama bagi pelaksanaan program dan politiknya, yakni Angkatan Darat.

Menurut penilaian PKI, Angkatan Laut dan Kepolisian dapat dinetralisir, sedangkan pimpinan Angkatan Udara dianggap progresif dan akan menyediakan fasilitas; tinggallah pimpinan Angkatan Darat yang diklasifikasikan sebagai "kanan" dan kepala batu oleh karena itu harus dipencilkan atau disingkirkan[3].

Dr. Subandrio menrangkan dalam Sidang Mahmilub bahwa permulaan tahun 1965 merupakan tahun kristalisasi dan bahwa kekuatan yang saling bertentangan hanya terhimpun pada dua golongan, yaitu PKI di satu pihak dan Angkatan Darat di lain pihak. Antara kedua kekuatan ini akan timbul kontradiksi dan yang akan memuncak pada bentrokan secara fisik. Dalam evaluasi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang diketuai oleh Dr. Subandrio serta penilaian dari Polit Biro CC PKI yang diuraikan pada sidangnya tanggal 28 Agustus 1965 dikatakan bahwa akan terjadi kontradiksi ataupun bentrokan fisik antara PKI dan Angkatan Darat. Perkiraan PKI selagi Presiden masih berkuasa maka tidak akan timbul hal yang merugikan PKI, se-

3. *Ibid.*, hal. 84.

baliknya apabila kontradiksi atau bentrokan fisik tersebut terjadi sewaktu Presiden Sukarno sudah meninggal atau tidak berkuasa maka PKI akan terpukul. Yang penting bagi pimpinan PKI ialah bagaimana memperhitungkan kekuatan Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghambat utama bagi pelaksanaan strategi mereka. Oleh sebab itu disusunnya suatu rencana kerja yang sistematis untuk merongrong dan men-diskreditkan Angkatan Darat sehingga kedudukan ini dapat terpencil. Tidak mengherankan bilamana tahun 1964 PKI telah menyempurnakan aparatnya yang bertugas khusus untuk menggarap anggota-anggota ABRI untuk menjadi bagian kekuatannya dengan dibentuknya Biro Khusus/PKI dengan Angkatan Darat sebagai sasaran utamanya.

Dalam rangkaian konfrontasi dengan Malaysia, PKI menuntut dipersenjatainya Buruh dan Tani Revolusioner, yang pada hakekatnya sama saja dengan tuntutan untuk mempersenjatai Sobsi dan BTI. Sehubungan dengan tujuan ini dibentuklah Sukwan-sukwan dalam rangka mana kepada anggota BTI. Pemuda Rakyat, Gerwani, Sobsi dan lain-lain diberikan latihan-latihan kemiliteran. Tuntutan PKI yang secara langsung ditujukan kepada pimpinan Angkatan Darat ialah diadakannya Komisaris Politik dalam tiap-tiap angkatan sesuai dengan gagasan Nasakomisasi di segala bidang. Gagasan itu ditolak secara tegas oleh Letnan Jenderal A. Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat[4].

Kemudian muncul tuntutan baru, yakni pembentukan Angkatan ke-V, yang berasal dari Chou En Lai yang disampaikan kepada Presiden Sukarno, yang setelah menerimanya kemudian dilemparkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk ditanggapi. Men/Pangau Omar Dhani menyetujui dan mendukung gagasan Angkatan Ke-V itu sambil menyatakan, "Alangkah hebatnya jika rakyat sebagai Angkatan Ke-V dipersenjatai". Akan tetapi sebaliknya Men. Pangad A. Yani menolaknya karena sudah dapat diperhitungkan sebelumnya, bahwa mengadakan angkatan Ke-V di samping Angkatan yang telah ada di Indonesia akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun dalam pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia.

Di samping itu pembiayaan juga akan bertambah besar dan harus dipikul oleh rakyat. Gagasan tentang pembentukan Angkatan ke-V ini tidak terlepas dari kesanggupan Chou En Lai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma kepada Indonesia. Akan terbukti di kemudian hari bahwa walaupun Angkatan ke-V tidak terwujud, pemberian senjata dari RRC itu tidak terlepas dari penyusunan kekuatan persenjataan yang digunakan oleh PKI dengan G 30 S/PKI. Dalam pada itu kampanye yang ditujukan kepada

4. Nugroho Notosusanto (Editor), *Sejarah Nasional ke VI*, Balai Pustaka Jakarta, 1977, hal. 109.

Angkatan Darat memperoleh bentuk yang serius dengan diciptakannya isyu Dewan Jenderal yang dikatakan mau melancarkan *coup*. Pada hakekatnya isyu itu bersifat merongrong, memfitnah dan mencemarkan nama baik Angkatan Darat serta pimpinannya.

Dalam uraiannya kepada Syam pada bulan April 1965 D.N. Aidit menjelaskan situasi politik di tanah air yang semakin gawat. Sebagian besar keterangan itu menyangkut penilaiannya tentang Angkatan Darat. D.N. Aidit menganggap fungsi, peranan dan doktrin Angkatan Darat sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki PKI, karena menghambat usaha PKI dalam merealisasi tujuan perjuangannya. Singkatnya PKI beranggapan bahwa kedudukan Angkatan Darat semakin membahayakan dan bahwa dalam SUAD pasti terdapat bagian yang khusus mengendalikan segala kegiatan politik. Bagian ini dihubungkan dengan sebuah Dewan pada tingkat SUAD yang anggota-anggotanya terdiri atas perwira-perwira tinggi dan merupakan Dewan jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi yang tugasnya mengendalikan karier perwira-perwira tinggi. Dewan yang para anggotanya terdiri atas Jenderal-jenderal itu oleh D.N. Aidit terus dinamakan "Dewan Jenderal" dan diartikan sebagai Dewan yang mengatur/melakukan kegiatan politik untuk memusuhi PKI. Istilah "Dewan Jenderal" untuk pertama kali diperkenalkan oleh PKI. Jenderal-jenderal yang oleh PKI dianggap tokoh-tokoh potensial yang menghambat program PKI adalah Jenderal A.H. Nasution, Letjen A. Yani, Mayjen Suprapto, Mayjen S. Parman Mayjen Haryono, Brigjen Sutoyo, Brigjen Panjaitan dan Brigjen Sukendro.

Setelah istilah "Dewan Jenderal" diciptakan dan sekaligus diartikan sebagai "Dewan yang merupakan bagian dari A.D. yang memimpin dan melakukan kegiatan politik", maka Biro Khusus selanjutnya ditugaskan untuk mengembangkan sinyalemen Ketua CC PKI D.N. Aidit tentang adanya Dewan tersebut sehingga mencapai bentuk yang kiranya bisa diterima oleh pihak luar sebagai suatu kenyataan khususnya oleh Presiden Sukarno. Dengan perkataan lain, Biro Khusus harus dapat menyiarkan sinyalemen tersebut dan menjelmakannya sebagai sesuatu yang mendapat tanggapan luas sebagai membahayakan negara. Tujuannya ialah untuk dapat memencilkan Angkatan Darat. Cara yang dipilih ialah menyebarkannya sebagai isyu dan ada juga yang berupa surat kaleng. Cara ini mudah dilaksanakan dengan berhasil karena situasi dan kondisi yang saat itu serba gawat, diperuncing oleh banyak desas-desus dan sejumlah besar Badan Intel yang tidak terkoordinasi. Dimulai dengan isyu-isyu ringan seperti "ada jenderal-jenderal dari Angkatan Darat yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi (PBR)". Ada jenderal-jenderal yang tidak loyal terhadap PBR", yang kemudian diperkuat "Jenderal-jenderal yang tidak loyal menyatukan diri dalam suatu dewan dengan nama "Dewan Jenderal" yang bertugas menilai kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi". Akhirnya sifat isyu itu diperberat

"Dewan Jenderal akan mengadakan coup". Demikianlah isyu tingkat pertama yang disiarkan dalam bulan Mei, Juni dan Juli 1965. Bersama dengan membumbungnya isyu tentang Dewan Jenderal, tersiar pulalah adanya Dokumen Gillchrist.

Gillschrist adalah Duta Besar Inggris yang waktu itu bertugas di Indonesia, sedang dokumen yang memakai nama itu dikatakan berasal dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan jatuh ke tangan Indonesia. Dalam dokumen tersebut yang kemudian ternyata palsu antara lain disebutkan kata-kata *"our local army friends"* yang kemudian dihubung-hubungkan dan diartikan sama dengan Dewan Jenderal. Dengan demikian isyu Dewan Jenderal telah naik setingkat lagi. Bila semua isyu tersebut hanya dikaitkan dengan masalah dalam negeri saja maka selanjutnya ia dinaikkan dan disangkutkan dengan pihak-pihak luar negeri dengan bentuk dan tujuan baru, yakni bahwa Angkatan Darat bekerja sama dengan kaum imperialis, justru pada saat Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia.

Menjelang G 30 S/PKI masalah Dewan Jenderal kian santer dan telah meningkat menjadi isyu "Kabinet Dewan Jenderal". Dalam sidang Mahmilub yang memeriksa dan mengadili perkara Waluyo alias Bono (orang ketiga Biro Khusus) pada tanggal 28 September 1968 diperoleh pengakuan bahwa apa yang disebut "Kabinet Dewan Jenderal" itu disusun olehnya sendiri bersama dengan tokoh-tokoh Biro Khusus lainnya atas perintah D.N. Aidit sebagai ketua CC PKI. Ia menjelaskan konsep Kabinet Dewan Jenderal produksi Biro Khusus ialah seagai berikut:

— Perdana Menteri	Jenderal A.H. Nasution
— Wakil Perdana Menteri/ Menteri Pertahanan	Letjen A. Yani
— Menteri Dalam Negeri	Hadi Subeno
— Menteri Luar Negeri	Ruslan Abdulgani
— Menteri Hubungan Dagang Luar Negeri :	Brigjen Sukendro
— Menteri Jaksa Agung	Mayjen S. Parman
— Menteri Agama	K.H. Rusli
— Menteri Pangad	Mayjen Ibrahim Adjie
— Menteri Pangau	Komodor Udara Rusmin
— Menteri Pangak	Mayjen Polisi Jasin
— Menteri Pangal	Salah seorang Staf Men/Pangad.
— Menteri Kehakiman	—

Dengan adanya konsep tersebut maka penyebaran isyu Dewan Jenderal telah mencapai klimaksnya. Walaupun sumber utamanya D.N. Aidit sendiri, akan tetapi sebagai taktik penyesatan untuk menghapuskan asalnya maka dalam Sidang Polit Biro CC PKI yang diperluas yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 1965 Aidit menguraikan adanya info tentang Dewan Jenderal dan berkata sebagai berikut, "info tentang Dewan Jenderal diperoleh dari beberapa

orang dan pihak, tetapi sumber terpercaya ialah Brigjen Pol. Sutarto, Kepala Staf Badan Pusat Intelijen (BPI). Saya juga tidak mempercayai begitu saja informasi tersebut dan dokumen yang saya terima tentang Dewan Jenderal sudah diserahkan kepada Presiden Sukarno, Dr. Subandrio, dan Ali Sastroamijoyo. Saya mengharap agar kawan-kawan masing-masing juga aktif mencari bahan tentang Dewan Jenderal. Saya sendiri sepenuhnya percaya bahwa Dewan Jenderal itu ada."

Isyu Dewan Jenderal dan bahwa Dewan Jenderal mau mengadakan *coup* selain disebarkan melalui saluran Biro khusus juga lewat saluran-saluran lain, seperti Badan-badan Partai maupun secara perorangan oleh tokoh-tokoh PKI kepada pejabat-pejabat tinggi negara, secara formal maupun secara informal.

Yang dipergunakan sebagai saluran ke daerah-daerah CDB, CDB (Propinsi) dan terus ke bawah. Fraksi PKI juga dipergunakan sebagai saluran, yakni di mana anggota Fraksi PKI berada, baik yang resmi seperti DPR, DPA, di Front Nasional dan sebagainya, maupun fraksi PKI yang ilegal seperti fraksi-fraksi dalam ormas-ormas, Jawatan dan lain-lain. Isyu tentang Dewan Jenderal dilancarkan dari satu pihak sehingga menjadi "info-info" bagi pihak-pihak lain. Misalnya, Ditjas Intel Mabak mendapat info tersebut dari bawah, yakni dari Ketua Sobsi Cabang Pabrik Gula Kadipaten Cirebon. Brigjen Polisi Sutarto, Kepala Staf BPI memperolehnya langsung dari Sujarwo Haryowirasastro, anggota PKI yang duduk di DPR-GR dan dari Syarifuddin Tanjung, seorang "kader" *Marhaenis* melalui Witano. Selain melalui saluran-saluran tersebut di atas masih terdapat juga jalan melalui instansi lain seperti Kejaksaan Agung, Badan Pusat Intelijen (BPI) dan partai-partai *seperti PNI dan Partindo.*

Dengan cara demikian isyu Dewan Jenderal berhasil mencapai sasaran utamanya, yakni Presiden Sukarno. Dari pernyataan Dr. Subandrio dalam sidang bulan Oktober 1966 diketahui antara lain bahwa ia pada tangga 26 Mei 1965 telah menghadap Presiden Sukarno Sukarno di istana Merdeka Jakarta dan menyampaikan sebuah dokumen Gillchrist beserta sebuah amplop dan sepucuk surat pengantarnya yang menyatakan bahwa dokumen tersebut diperoleh dari rumah Bill Palmer warga negara Amerika Serikat di Tugu, Bogor sewaktu rumah tersebut diobrak-abrik oleh demonstrasi pemuda.

Yang sebenarnya ialah surat tersebut diterima Dr. Subandrio melalui pos tanpa tanda tangan dan alamat pengirim. Riwayat "Konsep surat Gillchrist" dimulai sejak tahun 1963. Pada tahun 1963 itu dalam rangka demonsrasi pengganyangan Malaysia, PKI dan ormas-ormasnya dalam Front Nasional yang telah didominasi oleh PKI melakukan pengobrak-abrikan di gedung kedutaan besar Inggris di Jakarta dan membakarnya. Segala alat kantor yang ada di kedutaan tersebut dirusak dan dimusnahkan. Pada pemuda dari golongan Pemuda Rakyat/PKI, petugas Intel dari BPI dan BRIMOB memasuki gedung

tersebut serta mengambil surat-surat, formulir-formulir dan kertas-kertas lain yang belum sempat terbakar.

Akhir tahun 1964 dalam rangka demonstrasi pengganyangan film-film Barat, PKI beserta ormasnya dalam front nasional melakukan pengrusakan pada rumah peristirahatan Bill Palmer yang mereka beri judul sebagai kepala urusan perfilman Barat di Indonesia, yang letaknya di Puncak. Setelah para demonstran meninggalkan rumah tersebut para petugas keamanan menyegel rumah itu untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa waktu kemudian, masih dalam rangka pengganyangan film-film Barat ini, adalagi sebuah kelompok demonstran yang dipimpin oleh Ny. Suryadarma mengobrak-abrik lagi rumah peristirahatan Bill Palmer tersebut.

Setelah terjadi pengobrak-abrikan gedung Kedutaan Besar Inggris di mana Pemuda Rakyat (PR), BPI dan Intel Brimob mengambil formulir kertas blanko dan surat-surat lain dari dalamnya dan sesudah demonstran pengrusakan rumah Bill Palmer di Puncak itu maka pada tanggal 15 Mei 1965, Dr. Subandrio menerima sebuah surat anonim melalui pos Jakarta. Surat tersebut mempunyai dua bagian. Bagian pertama berupa surat pengantar yang isinya menyatakan pengiriman dokumen yang berguna bagi revolusi yang mereka sebut surat Gillchrist yang ditemukan di rumah peristirahatan Bill Palmer di Puncak pada waktu pengobrak-abrikan rumah tersebut. Bagian kedua ialah lampiran surat pengantar tersebut, berupa sebuah konsep surat yang diketik tanpa ada tanda tangan ataupun paraf dari si pembuat yang hanya ditulis namanya "Gillchrist". Kemudian Dr. Subandrio menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Staf BPI Brigjen Polisi Sutarto untuk diperiksa.

Sutarto tidak mengadakan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya dokumen tersebut, dengan kata lain ia tidak menyuruh instansi yang berwenang untuk meneliti tulisan, tanda tangan, sidik jari untuk keperluan mana ada tersedia fasilitas di Departemen Angkatan Kepolisian. Ia mengembalikan "konsep surat Gillchrist" tersebut kepada Dr. Subandrio sambil menentukan bahwa formulir yang digunakan untuk membuat "konsep" itu adalah otentik karena sama dengan formulir yang pernah diambil oleh BPI pada tahun 1963 dari gedung Kedutaan Besar Inggris pada saat demonstrasi dan perusakan, akan tetapi bahwa isi konsep tersebut tidak dapat dipastikan keotentikannya.

Dr. Subandrio kemudian memerintahkan untuk membuat reproduksi dari "konsep surat Gillchrist"itu. Pada tanggal 26 Mei 1965 Dr. Subandrio membawa konsep itu serta melaporkannya kepada Presiden Sukarno. Presiden Sukarno memerintahkan Dr. Subandrio untuk mengumpulkan semua panglima Angkatan di Istana Merdeka dan pada lebih kurang jam 10.00 hadirlah Men/Pangak Inspektur Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo, Men/Pangal Laksamana Madya L.R.E. Martadinata, Men/Pangad Letnan Jenderal A. Yani

Men/Pangau yang diwakili, oleh Laksamana Muda Sri Mulyono Herlambang dan Dr. Subandrio. Sementara Presiden Sukarno membacakan dokumen tersebut, Dr. Subandrio membagikan poto copynya pada hadirin. Setelah pembacaan selesai Presiden Sukarno langsung bertanya kepada Letnan Jenderal A. Yani, "Apakah dalam Angkatanmu masih ada orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika?" Jenderal A. Yani menjawab, "Tidak pak, yang ada ialah yang saya beri tugas khusus, yaitu Brigjen Sukendro supaya selalu mencari hubungan dengan Amerika Serikat dan Mayjen S. Parman supaya berhubungan dengan Inggris untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang selanjutnya dilaporkan kepada saya."

Kemudian Presiden Sukarno menyatakan lagi kepada Jenderal A. Yani, "Bagaimana desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang menilai kebijaksanaan saya?"

Dijawab oleh Jenderal A. Yani, "Tidak benar. Saya memang satu kali mengumpulkan para perwira senior atas permintaan sendiri untuk tukar pikiran mengenai masalah yang dihadapi oleh revolusi kita. Saya beri kesempatan secara luas kepada mereka untuk mengemukakan pendapatnya (*stoom uitblazen*). Adapun yang ada ialah Dewan yang menyusun promosi perwira-perwira senior".

Dengan selesainya pertemuan tersebut Angkatan Darat menganggap bahwa masalah Dewan Jenderal telah di*"clear"*kan. Namun kenyataannya tidak demikian, karena Dr. Subandrio telah memperbanyak apa yang disebut "Dokumen Gillchrist" itu sebanyak 100 eksemplar dan membawanya ke luar negeri sewaktu ia menyertai Presiden Sukarno untuk menghadiri Konperensi Asia Afrika ke-11 yang sedianya akan diadakan pada pertengahan tahun 1965 di Aljazair Dr. Subandrio telah membagi-bagikan foto copy "Dokumen Gillchrist" tersebut kepada delegasi negara-negara peserta Konperensi yang sedang berada di Kairo. Dengan demikian isyu Dewan Jenderal Dokumen Gillchrist telah meluas ke luar negeri, yang merupakan inti dari masalah yang menimbulkan keonaran dan perkembangan situasi yang kian meruncing menjelang G 30 S/PKI, yang sengaja dan sistimatis diciptakan oleh PKI.

Sehubungan dengan surat yang dinamakan "Dokumen Gillchrist" itu maka secara analogis dapat dikemukakan bahwa Dr. Subandrio sebagai seorang pejabat tinggi negara, terlebih-lebih sebagai Kepala Badan Intelijen (BPI), seharusnya menilai surat tersebut sebagai surat kaleng yang tidak pantas ditanggapi. Sebagai kepala BPI, sebelum menanggapi materinya, ia setidak-tidaknya tadinya harus berusaha secara teliti memeriksa keotentikanya dan tidak sewajarnya terus melaporkannya demikian saja dengan tambahan keterangan yang tidak benar. Karena itu laporannya kepada Presiden Sukarno dalam ujud yang demikian itu merupakan rangkaian dari sikap dan kegiatanya sendiri yang telah memasuki arus strategi dan garis politik

PKI. Dari data yang telah terurai terdahulu nampak jelas bahwa isyu Dewan Jenderal sama dengan fitnah buatan PKI terhadap Angkatan Darat, terutama kepada pimpinan terasnya, yang dilaksanakan secara bertahap dan sistematis.

Pada tahap pertama, diciptakan isyu tentang adanya "Dewan Jenderal" di Angkatan Darat yang bertugas khusus untuk memikirkan usaha-usaha dalama rangka menghadapi perjuangan PKI yang bersikap "kiri", karena Angkatan Darat bersikap "kanan". Dengan isyu tersebut PKI ingin memberi kesan bahwa Angkatan Darat bersikap sebagai penghalang perjuangan dan tidak loyal kepada cita-cita dan perjuangan sosialisme Pancasila, karena sosialisme Pancasila adalah "kiri".

Pada tahap kedua, diisyukan bahwa Dewan Jenderal yang "kanan" itu bertugas khusus, antaranya untuk menguji kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi (PBR). Pada tahap ini PKI ingin memberi kesan bahwa Dewan Jenderal adalah sebuah badan dalam Angkatan Darat yang tidak dapat dijamin loyalitasnya kepada PBR. Tujuannya ialah menghilangkan kepercayaan kepada Angkatan Darat dan mengadu domba antara Angkatan Darat dan Presiden Sukarno.

Pada tahap ketiga, ditimbulkan isyu bahwa Dewan Jenderal bekerja sama dengan imperialis, untuk menerbitkan kesan seolah-olah Angkatan Darat telah menghkhianati perjuangan Bangsa dan Negara.

Pada tahap keempat, dikeluarkan bisikan bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno. Dan untuk lebih meyakinkan orang tentang kesungguhannya. PKI telah menciptakan isyu "Kabinet Dewan Jenderal".

Jelaslah bahwa isyu tersebut merupakan dalih PKI untuk menutupi maksud PKI yang sebenarnya untuk merebut kekuasaan. Dengan cara dan usaha yang sistematis, fitnah berbentuk isyu "Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan" yang diserahkan kepada Presiden/PANGTI ABRI/PBR Dr. Ir. Sukarno akhirnya secara sempurna dapat mencapai sasaran yang dimaksudkan oleh PKI. Hal ini tampak dari tindakan Presiden Sukarno pada tanggal 26 September 1965 sewaktu ia menetapkan semacam tindakan darurat guna menghadapi situasi apabila sewaktu-waktu apa yang disebut "Dewan Jenderal" itu melaksanakan perebutan kekuasaan. Presiden Sukarno menganggap perlu memencarkan tempat kedudukan semua anggota Presidium Kabinet, sebagai berikut:

— Presiden/Perdana Menteri Dr. Ir. Sukarno ke Yogyakarta
— WAPERDAM I Dr. Subandrio ke Sumatera
— WAPERDAM II Dr. Leimena tetap di Jakarta
— WAPERDAM III Dr. Chairul Saleh saat itu sedang di RRC memimpin delegasi Indonesia.

Kiranya tidaklah mengherankan bahwa jika sasaran utama itu sudah tercapai maka timbullah *follow up* yang berupa desakan-desakan dari tokoh-tokoh yang searus dengan perjuangan PKI. Dr. Subandrio dan Birgjen Pol. Sutarto pada tanggal 27 September 1965 mendekati Presiden Sukarno dan menyarankan kepadanya agar menindak Dewan Jenderal. Desakan yang sama dilakukan juga oleh Laksamana Madya Omar Dhani pada tanggal 29 September 1965. Dari sidang-sidang Mahmilub yang mengadili mereka ini di kemudian hari terbukti bahwa semua isyu tersebut adalah fitnah terarah demi kepentingan PKI dalam usahanya untuk merebut kekuasaan[5].

Sehubungan dengan sakitnya Presiden Sukarno, maka sejak tanggal 15 Juli 1965 sampai tanggal 30 Juli 1965 tim dokter RRC yang khusus didatangkan telah melakukan pemeriksaan fisik atas diri Presiden Sukarno yang kesehatannya semakin mundur. Di samping tim dokter RRC itu, juga tim dokter Indonesia turut memeriksa. Tanggal 30 Juli 1965 Presiden Sukarno memerintahkan kepada Jenderal Dr. Rubiono memanggil Nyoto (orang ketiga PKI) yang sedang di luar negeri, karena diperlukan untuk turut membantu menyusun naskah pidato yang akan diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1965. Dari Sekretariat Negara dikirim kawat ke perwakilan-perwakilan RI di Moskow dan Peking yang isinya agar Nyoto dan D.N. Aidit segera pulang. Pada waktu itu D.N. Aidit yang sedang dalam perjalanan dari Moskow ke Peking dan Hanoi menunda perlawatannya ke Hanoi karena menerima surat kawat dari Dr. Subandrio. Dan dari Peking ia tiba di Jakarta tanggal 6 Agustus 1965. Penyakit Kepala Negara mencapai puncaknya pada tanggal 4 Agustus ketika ia jatuh pingsan dan muntah-muntah.

Sekembalinya D.N. Aidit di Jakarta, ia segera berkunjung ke Bogor untuk menengok Presiden Sukarno. Ia melihat Presiden di kamar tidurnya, kemudian mengadakan pembicaraan yang lama sekali dengan Dokter-Dokter RRC di ruang lain di Istana Bogor itu. Menurut keterangan para dokter RRC itu ada kemungkinan sebagai akibat penyakitnya, Presiden Sukarno akan menjadi lumpuh atau wafat.

Peristiwa lain yang penting untuk dicatat ialah dialog antara Presiden dan Letkol Untung, Komandan Batalyon Pengawal Pribadi Resimen Cakrabirawa pada tanggal 6 Agustus 1965. Saat itu Kepala Negara "menanting" (menanyakan) kepada Perwira tersebut apakah ia sanggup untuk menangkap Jenderal-jenderal yang menilai kebijaksanaan PBR. Jawabnya "sanggup , apabila diperintahkan". Perlu pula dicatat bahwa Letkol Untung termasuk perwira-perwira yang dibina oleh PKI sejak tahun 1950. Ia melaporkan percakapannya dengan Presiden kepada Waluyo orang ketiga Biro Khusus PKI. Ke-

5. G 30 S/PKI, *op. cit.*, hal. 94.

mudian pimpinan Biro Khusus melaporkan hal tersebut Kepada Ketua PKI D.N. Aidit dan dengan demikian pihak PKI dapat mengetahui dialog Sukarno — Untung tersebut.

Peristiwa lain yang penting dicatat dalam periode itu ialah menderasnya isyu bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan *coup* pada tanggal 5 Oktober 1965 atau sekitar Hari Ulang Tahun ABRI.

Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, maka pada tanggal 8 dan 11 Agustus 1965 Aidit memanggil Syam, Kepala Biro Khusus PKI, dan menginstruksikannya "Menyusun Kekuatan Guna Memberikan Pukulan Terlebih dahulu" kepada apa yang dinamakan "Dewan Jenderal" untuk mana perlu diperkuat Barisan dan selekas mungkin dihubungi perwira-perwira yang akan digunakan.

Dengan memperhatikan sikap Presiden Sukarno, Aidit berpendapat bahwa penindakan oleh Presiden terhadap Pimpinan A.D. pastilah akan berupa atau berakhir dengan suatu kompromi, sehingga hasil tindakannya itu tidak akan menguntungkan PKI.

Sehubungan dengan ini Aidit mengambil prakarsa untuk menyusun rencana "Untuk Mendahului Tindakan Terhadap Apa Yang Dikatakan Dewan Jenderal yang Akan Coup" dengan cara menangkap para Jenderal yang, apabila mereka melawan harus dibunuh.

Menurut Pomo orang kedua Biro Khusus, sikap Aidit terhadap pimpinan A.D. mengalami perubahan. Apabila semula D.N. Aidit lebih cenderung untuk menyerahkan masalah Dewan Jenderal kepada Presiden Sukarno, maka sekembalinya dari Peking sikapnya lebih agresif. Ia mengambil inisiatif untuk menempuh jalan partai, "Kebijaksanaan dan tindakan Aidit dalam usahanya untuk mendahului" adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan Biro Khusus seagai organisasi penggerak bagi organisasi yang hendak dilancarkan.
b. Mengadakan Sidang Pleno Polit Biro PKI yang diperluas, khususnya untuk menjelaskan situasi terakhir, serta untuk mendapat pengesahan tentang rencana operasi tersebut.

   Sebenarnya pada tanggal 28 Agustus 1965 ada dua masalah penting yang dibicarakan.

   Pertama, Syam, Ketua Biro Khusus Sentral PKI, melaporkan kepada D.N. Aidit bahwa tanggal 25 Agustus 1965 Syam bersama Haryana, Kepala Biro Daerah Jabar, telah mengadakan pertemuan di Bandung dengan Mayjen Rukman dan Brigjen Suparjo, Kolonel Inf. Jukardi dan lain-lain. Dalam pertemuan dengan perwira-perwira tersebut mereka membicarakan masalah "Dewan Jenderal" yang akan mengadakan *coup d'etat* serta rencana partai untuk melancarkan gerakan terlebih dahulu, khususnya rencana pelaksanaannya di Jawa Barat.

   Kedua tanggal 28 Agustus 1965 malam D.N. Aidit mengadakan sidang Polit Biro CC PKI yang diperluas. Dalam sidang itu ia menguraikan perkembangan situasi politik yang dihubungkan dengan kemungkinan akibat sakitnya Presiden Sukarno.

Tentang Angkatan Darat dikatakannya bahwa ada dua kekuatannya yang saling berhadapan yakni PKI dan Angkatan Darat. Kekuatan ini belum tabrakan satu sama lain, karena masih ada tamengnya, yakni Presiden Sukarno. Yang ketemu baru sungut-sungutnya tetapi bila tameng itu tidak ada lagi, kepala dengan kepala pasti bertabrakan, demikian dikatakannya. Masalahnya ialah siapa yang sebenarnya bisa mengetahui lebih dahulu jika seandainya Presiden Sukarno sampai meninggal. Apabila Angkatan Darat mengetahui terlebih dahulu, mereka akan bertindak dan PKI pasti akan dimusnahkan. Oleh karena itu persoalannya ialah lebih baik didahului atau mendahului. Menurut Aidit, apabila Angkatan Darat mengetahui terlebih dahulu tentang wafatnya Presiden Sukarno, dalam waktu singkat saja Angkatan Darat dapat menguasai keadaan dan menggulung PKI. Karena itu Aidit lebih condong untuk mendahului. Akan tetapi ada dua problema pokok yang belum dapat dipecahkan oleh Aidit, ialah:

Pertama tentang imbangan kekuatan. Pada waktu Aidit menguraikan situasi, ia sudah menyebut-nyebut tentang tampilnya seorang perwira menengah yang menentang "Dewan Jenderal" dan yang digolongkan sebagai "perwira yang berpikiran maju". Menurut Aidit, "perjuangan yang menentukan adalah di Jakarta padahal perwira-perwira yang berpikiran maju dan partai kita adalah paling lemah di Jakarta".

Kedua, para perwira yang berpikiran maju yang mau mendahului itu pada umumnya bersikap ragu-ragu.

Jika seandainya Presiden Sukarno mengutuknya, maka aksi tidak akan berhasil. Tetapi imbangan kekuatan selanjutnya Aidit berkata, "Pengaruh partai di kalangan Angkatan Bersenjata umumnya dicerminkan pada kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali Jakarta Raya. Dan yang terbaik adalah Jawa Tengah. Soal imbangan kekuatan secara mendetail tidak bisa saya jelaskan karena memang ada badan yang mengurus hal ini dan adalah berbahaya sekali kalau nama-nama perwira-perwira itu diumumkan. Seandainya kita nanti diperiksa dan disiksa, belum tentu kita kuat menyimpan rahasia itu, karenanya biasakanlah jangan serba ingin tahu".

Aidit menilai Angkatan Darat tidak kompak karena, menurut dia, ada perbedaan pendapat antara Jenderal Nasution dan Jenderal A. Yani tentang waktu untuk pelaksanaan perebutan kekuatan. Ketidakkompakan Angkatan Darat juga disebabkan oleh adanya golongan perwira yang menentang "Dewan Jenderal". ALRI dan AKRI dapat dinetralisir, karena mempunyai persoalan intern masing-masing. AURI memberikan fasilitas. "Imbangan kekuatan menguntungkan bagi perwira menengah yang progresif revolusioner yaitu sepertiga. Sebab pengalaman mengatakan bahwa apabila kekuatan *coup* sudah sepertiga dibandingkan dengan seluruh kekuatan ber-

senjata yang ada dan gerakan disokong oleh massa, maka *coup* itu pasti berhasil, demikianlah D.N. Aidit.

Mengenai situasi Luar Negeri, Aidit antara lain menyatakan bahwa Boumediene telah berhasil dengan baik melakukan *coup d'etat* terhadap Ben Bella dan Pemerintah Alzadjair yang baru ini telah menggunakan nama "Dewan Revolusioner" sebagai pengganti pemerintahan yang lama. Dalam hal ini D.N. Aidit juga mengemukakan kekagumannya atas berhasilnya *coup d'etat* Boumedience tersebut.

Kedua, tentang perspektifnya. Aidit menjelaskan, "sebagai saya katakan tadi, di Jawa umumnya kita kuat, kecuali di Jakarta. Sedangkan di luar Jawa pengaruh kita umumnya lemah, baik dalam masyarakat maupun di kalangan Angkatan Bersenjata."

Atas pertanyaan apakah kalau di Jawa saja suatu aksi bisa sukses, Aidit menjawab, "Menurut saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa berhasil menguasai Jawa itulah yang menang. Lihatlah PRRI/Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di Luar Jawa, akan tetapi karena Jawa tidak ditariknya, maka mereka gagal. Sebagai tadi mengenai kesulitan pokok kedua saya dapat memahami persoalan perwira-perwira yang berpikiran maju itu bahwa jika Presiden mengutuk aksi, mereka tak mungkin berhasil. Karena itu apakah sidang Polit Biro yang diperluas dapat menyetujui apabila perwira-perwira yang berpikiran maju itu mendahului?"

Karena sidang diam saja, Aidit bertanya, "Kalau begitu apakah Sidang Polit Biro dapat menyerahkan persoalan ini kepada Dewan Harian Polit Biro?" Sesudah hadirin tidak memberikan suatu reaksi Aidit lalu berkata, "Yah, serahkan hal ini kepada Dewan Harian Polit Biro". Palu diketok tanda sidang ditutup, dengan pengertian bahwa PKI akan bergerak dengan mempergunakan perwira-perwira progresif revolusioner dan bahwa dalam pelaksanaannya Sidang Polit Biro CC PKI yang diperluas memberikan delegasi wewenang sepenuhnya kepada Ketua CC PKI D.N. Aidit; bahwa PKI akan membentuk Dewan Revolusi yang akan menggantikan Kabinet Dwikora, dan bahwa di bidang politik umum Sidang Polit Biro CC PKI memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Harian Polit Biro CC PKI. Oleh karena itu kegiatan tokoh-tokoh PKI semakin meningkat dalam periode setelah ada keputusan Polit Biro CC PKI yang diperluas itu tentang rencana gerakan.

Periode ini sering disebut "prolog dekat" karena kegiatan sudah diarahkan ke titik kulminasi dari situasi ofensif revolusioner, yaitu gerakan perebutan kekuasaan dalam ujud G 30 S/PKI. Sebagai pelaksanaan keputusan PKI itu maka menjelang G 30 S/PKI sebagian dari anggota CC PKI telah dikirim ke pelbagai daerah seperti: Joko Sujono ke Semarang, Ir. Sakirman ke Yogya, Suwardiningsih ke Palembang, Peris Pardede ke Medan, Asmu (BTI) ke Surabaya, Munir (SOBSI) ke Surabaya, Nyono (CDR) tetap di Jakarta karena pembantu persiapan dan pelaksanaan G 30 S/PKI. sebagian dari anggota CC

tetap di Jakarta membantu Sudisman. Kegiatan tokoh-tokoh PKI tersebut berarti mengurangi resiko tertangkap menjelang dan sesudah terjadi gerakan dan juga berarti membantu pelaksanaan di tingkat daerah.

Diinstruksikan pula kepada CDB-CDB untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan selalu mendengarkan siaran RRI Pusat, dan mengusahakan bantuan massa di daerah masing-masing untuk mendukung gerakan di Pusat (dukungan politik) di saat gerakan dilancarkan.

Selain dari itu telah diambil tindakan pengosongan markas PKI di Jalan Kramat Raya (Salemba), Jakarta dan didirikan Markas darurat di Kayuawet Jakarta. Sudisman ditunjuk untuk melakukan tugas sebagai pimpinan PKI mengingat bahwa tokoh-tokoh lainnya pada hari — H sudah tidak berada di tempatnya lagi. Nyono telah menyingkir sebelumnya karena turut rombongan Dr. Subandrio ke Sumatera dan MH. Lukman menyingkir ke Jawa Tengah pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, sedang D.N. Aidit sejak tanggal 30 September 1965 malam hari sudah berada di Komplek Halim untuk melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Tertinggi G 30 S/PKI.

2. Pelaksanaan G 30 S/PKI dan gugurnya D.I. Panjaitan

Pada tengah malam tanggal 29 September 1965 setelah selesai mengadakan rapat terakhir bersama Untung dan A. Latif, pimpinan Biro Khusus Central PKI, Syam selaku pimpinan pelaksanaan G 30 S/PKI kemudian menemui D.N. Aidit selaku Pimpinan Tertinggi G 30 S/PKI untuk melaporkan secara terperinci seluruh persiapan gerakan di Jakarta maupun di daerah-daerah. Antara lain dilaporkannya Organisasi Gerakan, nama gerakan, hari H, Jam J, Susunan Dewan Revolusi di Pusat, proses penyusunan Dewan Revolusi di daerah dan tentang Dewan Militer.

Pada kesempatan itu D.N. Aidit mengadakan perubahan gerakan yang pada waktu dipersiapkan diberi nama Operasi Takari, kemudian oleh D.N. Aidit diubah dan ditetapkan dengan nama "Gerakan 30 September". Yang lain-lain dianggap sudah sesuai dengan Keputusan politik Sidang polit Biro CC PKI yang diperluas pada tanggal 28 Agustus 1965 dan Sidang Dewan Harian Polit Biro CC PKI pada hari-hari berikutnya.

Laporan Syam tersebut telah menambahkan keyakinan mereka bahwa gerakan itu akan berhasil, persiapan telah diatur secara terperinci dengan sangat dirahasiakan, sehingga tidak ada kesempatan bagi yang tidak berkepentingan untuk mengetahuinya. Suasana di Lubang Buaya menjelang malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 benar-benar sibuk. Karena berkumpulnya berbagai pasukan bersenjata yang antara lain terdiri dari anggota-anggota Brigif I Kodam V/Jaya, Sukarelawan dan Sukarelawati yang berasal dari Pe-

muda Rakyat dan Gerwani dan dinamakan SUKTA (Sukarelawan Takari). Kesibukan bertambah dengan kedatangan kompi-kompi Yon 454/Diponegoro, Yon 530/Brawijaya dan Men Cakrabirawa yang semuanya tergabung dalam Divisi yang mereka namakan Divisi Ampera.

Pimpinan tertinggi G 30 S/PKI dijabat oleh D.N. Aidit Ketua CC PKI dan tempat yang digunakan ialah rumah Sersan Udara S. Suwardi yang letaknya dalam Kompleks perumahan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah, berdekatan dengan (Central Komando) *Senko II*, KO-OPS AU, dan rumah Komodor Susanto, D.N Aidit dalam melakukan tugas Pimpinan Tertinggi G 30 S/PKI dibantu oleh Iskandar Subekti dan Pono sebagai penghubung dengan SENKO dan Kusno sebagai kawal pribadi.

Yang bertindak sebagai penghubung dengan SENKO dan KO-OPS di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma ialah Mayor Ud. Suyono. Aidit menempati Pos kedudukan ini sejak hari Kamis tanggal 30 September 1965 sekitar jam 23.00 dengan diantar jemput oleh Mayor Udara Suyono.

Semenjak datang kira-kira jam 03.00 tanggal 1 Oktober 1965 Aidit secara terus-menerus mempersiapkan berbagai naskah yang diketik oleh pembantu-pembantunya. Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekira jam 03.00 D.N. Aidit beserta pembantu-pembantunya datang ke ruangan KO OPS/AU antara lain untuk membahas berbagai persoalan mengenai G 30 S/PKI dengan Men Pangau Omar Dhani, Brigjen Suparjo, Komodor Udara Susanto, Komodor Udara Leo Watimena dan Kolonel Udara Wisnu.

Selesai pembahasan, seluruh hadirin pergi ke rumah Komodor Udara Susanto, dan tidak lama antaranya D.N. Aidit dan kawan-kawannya pindah lagi ke sebuah rumah yang sengaja telah dipersiapkan dan dikosongkan dan terletak di dekat rumah Komodor Udara Susanto.

Setelah penculikan terhadap para Jenderal Pimpinan Angkatan Darat di pagi hari itu berhasil, D.N. Aidit pergi ke Lubang Buaya. Ketika diketahuinya bahwa Jenderal Nasution lolos dari penculikan ia memerintahkan agar Jenderal itu segera dicari dan ditangkap, hidup atau mati.

Selama gerakan berjalan D.N. Aidit selalu menerima laporan perkembangan gerakan melalui kurir maupun melalui radio yang menghubungkannya dengan SENKO KO-OPS Auri-Intel Pangkalan Halim (dekat dengan KO-OPS/AURI). Berdasarkan laporan perkembangan gerakan, D.N. Aidit membuat keputusan-keputusan yang beraspek politik untuk disampaikan ke SENKO dan untuk segera dilaksanakan, keputusan itu antara lain:

a. Pengumuman pertama G 30 S/PKI melalui Studio RRI Pusat jam 07.00 tanggal 1 Oktober 1965 tentang pembersihan dalam Angkatan Darat serta penyelamatan PBR Presiden Sukarno.

b. Pengumuman Komandan G 30 S/PKI melalui RRI Studio Pusat pada jam 08.00 tanggal 1 Oktober sebagai ulangan pengumuman pertama.
c. Penyampaian saran kepada Presiden Sukarno melalui Brigjen Suparjo tentang penunjukan Men/Pangad yang baru (sebagai pengganti Letjen A. Yani).
d. Pengumuman Dekrit No. 1 Keputusan No. 1 dan No. 2 G 30 S/PKI yang disiarkan pada jam 13.00 tanggal 1 Oktober 1965.
e. Menerima saran Syam sebagai Pimpinan Pelaksanaan G 30 S/PKI untuk menyelamatkan diri ke Yogyakarta/Jawa Tengah dengan pesawat udara Dakota milik AURI, sambil meneruskan perjuangan[6].
f. Pesan untuk melanjutkan perjuangan sesaat sebelum berangkat ke Yogyakarta, setelah menerima laporan tentang kegagalan G 30 S/PKI.

Sentral Komando (SENKO) adalah suatu tempat di mana Syam sebagai pimpinan Pelaksanaan Gerakan menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk D.N. Aidit SENKO menggunakan gedung PENAS yang terletak di Jalan Jakarta Bypass dengan diberi nama SENKO I, dan oleh Mayor Udara Suyono juga telah dipersiapkan tempat cadangan dengan nama SENKO II, yaitu di tempat kediaman Sersan Udara A. Suyatno yang terletak dalam Komplek Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah berdekatan dengan tempat di mana D.N. Aidit berada dan tidak jauh pula dari KO OPS/AURI dan rumah Komodor Udara Susanto. Tempat-tempat tersebut mempunyai hubungan radio atau dengan lainnya. Di SENKO tersebut, selain Syam terdapat juga Pono sebagai Wakil Pimpinan Pelaksana Gerakan, Brigjen TNI Suparjo sebagai penghubung SENKO dengan Presiden, Kolonel Latif dan Letkol Untung sebagai Komandan Gerakan Militer, Mayor Udara Suyono seagai penghubung antara SENKO dan Letkol Udara Heru Atmojo.

Para anggota SENKO, terkecuali Brigjen Suparjo dan Mayor Udara Suyono, mengikuti Letkol Untung ke Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar jam 1.30 untuk meneliti persiapan dan penyampaian perintah-perintah terakhir dalam rangka gerakan militer. Setelah penculikan dalam bentuk gerakan militer selesai dilaksanakan maka hal itu segera dilaporkan kepada D.N. Aidit, dan setelah mengetahui secara pasti hasil gerakan militer tersebut Syam memerintahkan Brigjen Suparjo agar segera berangkat menuju ke Istana Merdeka untuk mengambil Presiden Sukarno dan membawanya ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma sesuai dengan keputusan pertemuan antara Syam dan Birgjen Suparjo pada tanggal 29 September 1965. Semula direncanakan delegasi penjemput

6. G 30 S/PKI, *Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban*, hal. 121.

Presiden Sukarno akan terdiri dari para Pemimpin Dewan Revolusi, akan tetapi karena belum hadirnya Kolonel Laut Ranu Sunardi dan AKBP Anwas di SENKO maka Dan Yon 454/Diponegoro dan Dan Yon 530/Brawijaya oleh Brigjen Suparjo dan dengan persetujuan Syam diperintahkan mengikuti rombongan delegasi untuk mengambil Presiden Sukarno. Delegasi berangkat menuju Istana Merdeka setelah terlebih dahulu melaporkan kepada Men Pangau Laksamana Omar Dhani yang berada di KO-OPS/AURI.

Sesuai dengan petunjuk Pimpinan Tertinggi G 30 S/PKI, maka pada jam 07.00 tanggal 1 Oktober 1965 melalui Studio RRI Pusat di Jakarta disiarkan pengumuman pertama tentang penangkapan para Jenderal. Dalam pada itu Pimpinan G 30 S/PKI memutuskan untuk tetap mencari Jenderal Nasution agar ditangkap hidup atau mati, dan Kolonel Latif telah mencarinya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) tanpa hasil. Atas laporan dan permintaan Pasukan Gatotkoco tentang apa yang harus dibuat dengan jenderal yang telah diculik, maka diputuskan agar yang masih hidup segera dibunuh. Dengan tiadanya lagi Jenderal A. Yani sebagai Men/Pangad maka SENKO memerintahkan kepada Brigjen Suparjo agar mengusulkan kepada Presiden untuk menetapkan Mayor Jenderal Rukman atau Mayor Jenderal Pranoto sebagai Men/Pangad yang baru.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 pada hari sekitar jam 09.15 itu juga Letkol Untung telah menandatangani Dekrit No. 1 dan 2 surat keputusan yang masing-masing adalah:

a. Dekrit No. 1 tentang Dewan Revolusi sebagai sumber kekuasaan Negara dan pendemonisioneran Kabinet Dwikora.
b. Keputusan No. 1 tentang pembentukan dan suasana Dewan Revolusi Indonesia.
c. Keputusan No. 2 tentang penurunan pangkat bagi Kolonel ke atas menjadi Letnan Kolonel, dan kenaikan pangkat bagi mereka yang ikut aktif dalam G 30 S/PKI[7].

Setelah mendapat perintah dari Letkol Untung maka pasukan yang ditugaskan segera berangkat menuju ke sasaran masing-masing yang telah diputuskan di mana Pondok Gede ditetapkan sebagai basis gerakan.

Lettu Dul Arief yang bertindak sebagai Pimpinan Pasukan Pasopati segera mengumpulkan pasukan dalam formasi yang telah ditentukan sebelumnya sebagai berikut:

a. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Nasution di bawah pimpinan Pelda Jaharup dari Men Cakrabirawa terdiri dari:

1 (satu) RU Yon Kawal Kehormatan Cakrabirawa
1 (satu) Ton Yon 530 Brawijaya
1 (satu) Ton Yon 454 Diponegoro
1 (satu) Ton PGT AURI
1 (satu) Ton Pasukan Pemuda Rakyat.

b. Pasukan yang ditugaskan menculik Letjen A. Yani di bawah pimpinan Peltu Mukijan dari Brigif I Kodam V Jaya terdiri dari
   1 (satu) Ton Brigif I Kodam V Jaya
   1 (satu) RU Men Cakrabirawa
   1 (satu) Ton dari Yon 530 Brawijaya
   1 (satu) Ton dari Yon 454 Diponegoro
   1 (satu) RU PGT AURI
   2 (dua) RU Sukwan Pemuda Rakyat.
c. Pasukan yang ditegaskan menculik Mayjen Suprapto di bawah pimpinan Serka Sulaiman dari Men Cakrabirawa terdiri dari:
   1 (satu) Ton Kawal Kehormatan dibagi dua:
   1 (satu) RG I dipimpin oleh Serka Sulaiman
   1 (satu) RG II dipimpin oleh Serda Sukiman
d. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Mayjen S. Parman d bawah pimpinan Serma Satari dari Men Cakrabirawa terdiri dari:
   1 (satu) RU Yon Cakrabirawa
   2 (dua) RU Yon Raiders 530 Brawijaya
e. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Brigjen Sutoyo Siswomiharjo di bawah pimpinan Serma Surono dari Men Cakrabirawa terdiri dari:
   1 (satu) RU I di bawah pimpinan Serma Sudirjo
   1 (satu) RU II di bawah pimpinan Serma Ngatijo
   1 (satu) RU III di bawah pimpinan Kopda Dasuki
f. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Brigjen D.I. Panjaitan di bawah pimpinan Serma Sukarjo dari Yon 454/Diponegoro dengan kekuatan 1 (satu) Ton Minus.

Gerakan yang menculik Jenderal Nasution dipimpin oleh Pelda Jahurub dari Men Cakrabirawa dengan kekuatan 1 (satu) kompi lebih. Mereka berangkat dari Basis Lubang Buaya kira-kira jam 03.00 tanggal 1 Oktober 1965. Menjelang mendekati rumah Jenderal Nasution mereka terlebih dahulu berusaha melumpuhkan pengawal yang berada di tempat kediaman Dr. Leimena, yang mengakibatkan seorang anggota pengawal (Polisi) gugur. Setibanya di rumah Jenderal Nasution masuklah regu yang berasal dari Men Cakrabirawa langsung menuju ke kamar kerja Jenderal Nasution dan selanjutnya menghampiri kamar tidur Jenderal tersebut. Mendengar keributan Ibu Nasution membuka pintu pagar, dan melihat seorang anggota Cakrabirawa dengan sepucuk senjata otomatik di tangan. Melihat gelagat yang tidak baik itu Ibu Nasution segera menutup pintu kamar dan memberitahukan suaminya bahwa ada orang berseragam yang mungkin bermaksud tidak baik.

Jenderal Nasution kurang yakin akan keterangan isterinya dan segera membuka pintu kamar. Melihat pintu terbuka, maka anggota Cakrabirawa ini segera melepaskan tembakan ke arah Jenderal Nasution. Seketika itu juga Jenderal Nasution menjatuhkan diri ke lantai. Melihat kejadian ini Ibu Nasution menutup dan mengunci

pintu kamar dan segera tembakan selanjutnya ditujukan ke arah daun pintu kamar. Ibu Nasution segera mendorong suaminya agar menuju belakang rumah. Sementara itu Irma Suryani (Ade), anak bungsu Jenderal Nasution yang masih berumur lima tahun oleh pengasuhnya dilarikan ke luar dengan maksud hendak diselamatkan, tetapi malang baginya, seorang anggota Cakrabirawa telah melepaskan tembakan otomatis hingga mengenai punggung Irma Suryani. Mendengar jeritan pengasuh anaknya, Jenderal Nasution ingin kembali lagi untuk menolong pengasuh yang sedang menggendong anaknya itu, tetapi ia segera didorong oleh isterinya ke luar rumah menuju pagar tembok yang berbatasan dengan kediaman Duta Besar Irak yang menjadi tetangganya. Jenderal Nasution memanjat tembok itu dan menghilang di kegelapan malam. Sementara itu salah seseorang ajudan Jenderal Nasution Lettu Pierre Tendean yang pada malam itu di pavilyun, terbangun karena kegaduhan di luar kamar. Ia ke luar dan segera ditangkap oleh gerombolan, mungkin dikira Jenderal Nasution. Ia diseret ke salah satu kendaraan. Pasukan penculik ini kemudian meninggalkan tempat itu dan menuju Lubang Buaya kembali.

Gerombolan yang bertugas menculik Letjen A. Yani (Men/Pangad) dipimpin oleh Peltu Mukijan dari Brigif I/Kodam V Jaya, dengan kekuatan satu setengah kompi diperkuat, berangkat dari Lubang Buaya kira-kira jam 03.00 tanggal 1 Oktober 1965. Setibanya di rumah Letjen A. Yani di jalan Lembang Sersan Raswad dan beberapa anggota Cakrabirawa diikuti oleh Peltu Mukijan dari Brigif I/Kodam V Jaya masuk ke pekarangan. Regu pengawal yang ama sekali tidak menaruh curiga atas kedatangan mereka seketika itu uga ditodong dan dilucuti. Sebagian gerombolan menuju rumah dan engetuk pintu yang dibuka oleh seorang pembantu rumah tangga. Mereka masuk dan bertemu dengan seorang puteri Pak Yani yang maih berumur tujuh tahun yang kebetulan terbangun mencari ibunya di elakang. ibu Yani malam itu sedang tirakat di tempat kediaman smi Men/Pangad di Taman Suropati, karena keesokan harinya nggal 1 Oktober adalah hari ulang tahun beliau. Sementara itu putri dua Jenderal A. Yani juga terbangun mendengar ribut-ribut tetapi lak keluar kamarnya. Yang keluar dari kamarnya adalah putera A. ani yang berusia 11 tahun. Ia segera membangunkan ayahnya dan tidak lama kemudian Jenderal A. Yani ke luar.

Salah seorang anggota gerombolan berkata bahwa Pak Yani dipanggil Presiden, dan Letjen A. Yani menyatakan hendak mandi dan berpakaian sebentar, tetapi dijawab oleh anggota gerombolan, "Tidak usah," sambil mendorong senjatanya. Letjen A. Yani sangat marah melihat sikap kurang ajar itu, dan memukul orang itu hingga jatuh, kemudian Letjen A. Yani membalik dan hendak menutup pintu kaca yang menghubungkan ruang makan dengan kamar belakang. Pada saat itu Sersa Raswad memerintahkan Serda Siyadi untuk menembak Letjen A. Yani dari belakang dengan senajta Thomson.

Tujuh buah peluru menembus tubuh Letjen A. Yani hingga ia rubuh. Segera Praka Wagimin menyeret Letjen A. Yani yang berlumuran darah itu ke luar rumah dan dengan memegang kakinya melemparkannya ke dalam salah satu kendaraan, dan selanjutnya mereka berangkat menuju ke Lubang Buaya.

Gerombolan yang bertugas menculik Mayor Jenderal Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman dari Men Cakrabirawa dengan kekuatan 2 (dua) peleton berangkat dari Lubang Buaya kira-kira jam 03.00 tanggal 1 Oktober 1965. Dalam rombongan turut Lettu Dul Arief dari Men Cakrabirawa selaku Dan Pasopati sebagai penunjuk jalan. Pada malam itu Mayjen Suprapto agak meriang karena sakit gigi. Pratu Buang yang termasuk regu yang ditugaskan untuk memasuki rumah memasuki rumah membuka pintu pagar, Mayjen Suprapto terbangun dan menyapa siapa mereka, yang dijawab mereka anggota Cakrabirawa. Mendengar jawaban itu Mayjen Suprapto dan Ibu tidak menaruh curiga. Mayjen Suprapto keluar dari kamarnya membuka pintu ruangan depan, dan diteras sudah menunggu beberapa orang rombongan penculik. Serda Sulaiman mengatakan bahwa Jenderal Suprapto diperintahkan Presiden untuk menghadap dengan segera dan seagai salah seorang yang patuh ia menyatakan kesediaannya dan bersiap untuk tukar pakaian dulu. Tetapi para penculik tidak mengizinkannya, beliau ditodong dengan sejata dan dipaksa ke luar. Beberapa orang memegang tangannya dan menaikkannya ke atas salah satu truk yang telah disediakan. Tak lama kemudian rombongan penculik meninggalkan tempat dengan membawa serta Mayjen Suprapto menuju Lubang Buaya.

Gerombolan yang bertugas menculik Mayjen S. Parman dipimpin oleh Serka Satar dari Men Cakrabirawa berkekuatan satu setengah peleton dan bergerak dari Lubang Buaya Jam 03.00 tanggal 1 Oktober 1965.

Mereka memasuki pekarangan dengan melompat pagar. Karena keributan itu S. Parman terbangun dan segera membangunkan isterinya, keduanya menduga ada perampokan di rumah tetangganya. Mayjen s. Parman ke luar dari kamar dengan tujuan memberikan bantuan, tetapi ketika ia sampai di ruangan tengah terdengar ketukan pintu. Sesudah mengetahui bahwa yang datang adalah pasukan Cakrabirawa ia membuka pintu tetapi agak heran sedikit ketika melihat banyaknya anggota Cakrabirawa di pekarangannya. Serma Satari menuju ke depan dan mengatakan bahwa Jenderal S Parman diperintahkan Presiden menghadap segera. Sampai detik itu Mayjen S. Parman belum juga menaruh curiga apa pun. Ia kembali ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Dua orang Cakrabirawa mengikutinya dari belakang dengan bayonet terhunus. Mayjen S. Parman minta agar mereka menunggu saja di ruangan tengah, tetapi ia tidak diindahkan, Ibu Parman mulai curiga akan tingkah laku mereka yang demikian itu. Beliau tanyakan surat perintah, seorang di antaranya

menjawab bahwa surat printah ada pada Pelda Yanto di luar. Usaha Ibu Parman untuk melihat surat perintah tidak berhasil, bahkan ia pun ditodong dengan bayonet. Selesai berpakaian lengkap Mayjen S. Parman dibawa ke luar. Di pintu ia menyuruh isterinya menelpon Letjen A. Yani melaporkan kejadian tersebut tetapi ternyata kabel telepon sudah dirusak. Mayjen S. Parman dimasukkan ke dalam kendaraan dan bersama gerombolan berangkat menuju Lubang Buaya.

Gerombolan yang bertugas menculik Mayjen Haryono M.T. dipimpin oleh Serda Bungkus dari Men Cakrabirawa dengan kekuatan kira-kira satu peleton. Setibanya di kediaman Mayjen Haryono M.T. serda Bungkus mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh ibu Haryono serda Bungkus memberitahukan bahwa Pak Jenderal dipanggil oleh Presiden Sukarno. Ibu Haryono masuk ke dalam dan mengatakan kepada suaminya bahwa anggota Cakrabirawa minta ia turut karena Presiden memanggilnya. Jenderal Haryono merasa keberatan dan meminta agar para anggota Cakrabirawa itu datang lagi pada jam 08.00 pagi nanti. Tetapi Serda Bungkus memaksa, dan sekarang bertambah jelaslah bagi Mayjen Haryono bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, karena itu ia menyuruh isterinya dan anak-anaknya pindah ke kamar sebelah. Sementara itu Serda Bungkus dan beberapa orang rombongannya berteriak dan meminta Mayjen Haryono supaya ke luar. Karena Mayjen Haryono tidak memenuhi permintaan mereka maka mereka melepaskan tembakan ke pintu yang terkunci itu. Pintu terbuka dan mereka memasuki kamar. Pada saat itu Mayjen Haryono M.T. berusaha merebut senjata salah seorang dari mereka tetapi gagal dan pada saat itulah ia ditusuk beberapa kali dengan bayonet. Ia jatuh dan dibawa ke luar serta dimasukkan ke dalam sebuah truk yang telah tersedia. Salah seorang anaknya yang masih kecil yang mengikuti anggota gerombolan yang sedang membawa pergi ayahnya itu dipukul dengan popor senjata hingga terjatuh. Tidak lama kemudian gerombolan penculik berangkat dengan membawa Mayjen Haryono M.T. ke Lubang buaya.

Gerombolan yang bertugas menculik Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dipimpin oleh Serma Surono dari Men Cakrabirawa dengan kekuatan 1 (satu) peleton. Tidak banyak bedanya dengan peristiwa yang terjadi di rumah para jenderal lainnya, maka kira-kira jam 04.00 pagi tanggal 1 Oktober 1965 Brigjen Sutoyo terbangun dan sebelum membuka pintu ia menanyakan siapa di luar dan mendapat jawaban Gondo, datang dari Malang. Sebagian dari anggota penculik lainnya melalui garasi sebelah kanan rumah masuk ke belakang. Dengan todongan bayonet mereka meminta kepada pembantu rumah untuk menyerahkan kunci pintu yang menuju ke kamar tengah. Setelah Brigjen Sutoyo membuka pintu Pratu Suyadi dan Praka Sumardi masuk dan mengatakan bahwa Brigjen Sutoyo dipanggil oleh Presiden. Kedua orang itu membawa Brigjen Sutoyo di luar dan

sampai pintu pekarangan ia diserahkan kepada Serda Sudibyo. Dengan diapit oleh Serda Sudibyo dan Pratu Sumardi, ia berjalan ke luar pekarangan meninggalkan tempat untuk selanjutnya menuju ke Lubang Buaya.

Gerombolan yang bertugas menculik Brigjen D.I. Panjaitan dipimpin oleh Serma Sukarjo dari Yon 454/Diponegoro dengan kekuatan 1 (satu) peleton minus, berangkat lebih kurang jam 03.00 tanggal 1 Oktober 1965 dari Lubang Buaya. Para penculik itu membuka pintu rumah dengan paksa dan menembak dua orang kemenakan Brigjen Panjaitan yang pada saat itu sedang tidur di tingkat bawah. Setelah itu anggota gerombolan berteriak memanggil Brigadir Jenderal Panjaitan supaya turun. Ia menolak turun, dan segera menyusul peringatan gerombolan yang mengancam akan membunuh seluruh keluarganya yang ada di dalam rumah kalau ia tidak mau turun. Sebelum Brigjen Panjaitan diberitahu oleh pembantu rumah tangga bahwa dua orang keponakannya telah ditembak dan seorang di antaranya telah tewas. Kemudian ia turun juga dengan mengenakan pakaian seragam. Setibanya di pekarangan ia tak dapat menahan amarahnya atas perlakuan para anggota gerombolan penculik itu terhadap dirinya. Ia dipukul oleh seorang di antaranya dengan popor senjata sehingga terjatuh dan seketika itu juga dua orang gerombolan lainnya menembaknya dengan senjata otomatis. Brigjen Panjaitan gugur saat itu juga dan jenazahnya dilemparkan ke dalam sebuah kendaraan yang telah menunggu.

Sementara itu seorang agen polisi, Sukitman, yang sedang melaksanakan tugas patroli datang karena mendengar letusan-letusan senjata api. Setibanya di dekat rumah Brigjen Panjaitan ia terus ditangkap oleh para penculik itu dan ikut dibawa bersama-sama ke Lubang Buaya. Agen polisi inilah yang kemudian dapat membantu Angkatan Darat c.q. Kostrad dalam usaha untuk menemukan sumur tua di Lubang Buaya di mana para korban penculikan yang telah dianiaya dibunuh dan dilemparkan ke dalamnya.

Semua korban dibawa ke Lubang Buaya/Pondok Gede dan diserahkan kepada pasukan Gatotkaca. Lettu Dul Arief selaku Pimpinan Pasukan Pasopati segera meninggalkan Lubang Buaya pada jam 06.30 menuju ke SENKO/Gedung Penas untuk melaporkan hasil-hasil penculikan dan tentang lolosnya Jenderal Nasution. Hadir pada saat pelaporan itu Syam, Pono, Brigjen Suparjo, Kolonel Latief, Letnan Kolonel Untung, Letkol Udara Heru Atmojo dan Mayor Udara Suyono[8].

---

7. *Ibid.*, halaman 123.

8. *Ibid.*, hal. 133.

PENUTUP

Jenazah almarhum D.I. Panjaitan beserta ke lima perwira tinggi dan seorang perwira pertama baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 sore dalam sebuah sumur tua yang kecil dan dalam di daerah Lubang Buaya. Jenazah mereka ditemukan dalam keadaan rusak dan susah dikenal wajah mereka. D.I. Panjaitan telah gugur sebagai pahlawan yang telah mengabdikan jiwa raganya untuk kepentingan nusa dan bangsa.

Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang telah rela berkorban untuk membela cita-cita Pancasila, maka Pemerintah dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 111/KOTI/Tahun 1965, tanggal 5 Oktober 1965 telah memberikan penghargaan dengan kenaikan pangkat satu tingkat, yakni dari Brigjen menjadi Mayor Jenderal Anumerta. Penghargaan tertinggi diberikan pemerintah kepadanya berupa gelar "Pahlawan Revolusi"[1].

Dengan gugurnya D.I. Panjaitan sebagai Pahlawan bangsa, maka benarlah apa yang beliau katakan kepada Bapak Hasan Basri ketika beliau bertugas di Pekanbaru pada tahun 1946. Pada waktu itu D.I. Panjaitan mengatakan dia masuk menjadi prajurit hingga menjadi Jenderal dan ingin mati sebagai jenderal.

Sebagai penghormatan terhadap D.I. Panjaitan, maka akan ditampilkan kesan-kesan dari teman-teman seperjuangannya di Pekanbaru yang berhasil diwawancarai. Di antara teman-temannya itu adalah:

1. **Hasan Basri**

Bapak Hasan Basri mulai kenal dengan D.I. Panjaitan pada tahun 1943, di mana keduanya bekerja pada perusahaan Jepang yang bernama *"Ataka Sangyo Kabushiki Kaisha"*. Perusahaan ini merupakan suatu industri besar dengan pengambilan kayu dari hutan-hutan dan juga membuat kapal-kapal kayu yang berkekuatan 200 ton di Panglong XI dekat Buatan. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang mereka berdua memasuki pendidikan *Giyugun*, dan sesudah Indonesia merdeka Hasan Basri dan D.I. Panjaitan merupakan tokoh-tokoh pejuang di daerah Riau. Sebagai tokoh pejuang hubungan antara mereka bukan hanya dalam bidang tugas saja, tetapi juga dalam soal-soal pribadi dan kekeluargaan.

Sebagai salah seorang tokoh pejuang, D.I. Panjaitan mempunyai keberanian dan kemampuan dalam memimpin pasukan. D.I. Panjaitan mempunyai daya pikir yang kuat dan mempunyai jiwa kesatuan yang besar, dari semua hal ini ikut menjadi pertimbangan untuk diangkatnya D.I. Panjaitan menjadi Komandan.

1. *Album Pahlawan Bangsa*, Mutiara, Jakarta, 1977, hal. 68.

Mereka berpisah dalam tugas pada tahun 1948, karena Hasan Basri dipindahkan ke Bukittinggi. Sesudah pengakuan kedaulatan D.I. Panjaitan terus bertugas dalam bidang militer, sedangkan Hasan Basri bergerak dalam bidang lain sebagai pengusaha. Walaupun tidak bertugas dalam bidang militer lagi, D.I. Panjaitan tetap menganggap Hasan Basri sebagai bekas komandan dan sebagai teman. Pada hari-hari penting seperti Hari Lebaran D.I. Panjaitan tetap mengunjungi Hasan Basri untuk mengucapkan selamat hari raya dan bersilaturahmi. Begitupun pada Hari Natal Hasan Basri juga mengunjungi D.I. Panjaitan untuk mengucapkan selamat Hari Natal. Bahkan sewaktu D.I. Panjaitan bertugas di Jerman Barat, ia juga mengirim surat kepada Hasan Basri mengenai berbagai masalah termasuk masalah politik. Sewaktu timbul pergolakan di daerah-daerah yang memuncak dalam peristiwa PRRI/PERMESTA, maka D.I. Panjaitan meminta pendapat Hasan Basri mengenai alternatif mana yang akan dipilih. Hasan Basri menganjurkan kepada D.I. Panjaitan untuk memilih alternatif dengan memilih KSAD A.H. Nasution dalam kemelut pada waktu itu. Ternyata D.I. Panjaitan mengikuti anjuran Hasan Basri, dan karirnya dalam bidang militer makin lama makin meningkat.

Sewaktu D.I. Panjaitan diangkat menjadi Brigadir Jenderal ia segera memberi tahu Hasan Basri mengenai kenaikan pangkatnya. Dengan bersikap sebagai seorang militer, pada suatu pagi sebelum melaporkan kenaikan pangkatnya kepada KSAD D.I. Panjaitan terlebih dahulu melapor kepada Hasan Basri bahwa ia sekarang telah diangkat menjadi Jenderal. Hasan Basri sangat terkesan dengan peristiwa ini, karena ternyata hubungan batin antara mereka berdua tidak pernah putus walaupun hubungan pekerjaan telah lama putus[2].

2. Wan Ghalib

Wan Ghalib adalah seorang tokoh pejuang dan tokoh masyarakat di daerah Riau semenjak zaman revolusi. Beliau kenal dengan D.I. Panjaitan pada permulaan revolusi di daerah Riau dan sama-sama berjuang di daerah itu. menurut Wan Ghalib D.I. Panjaitan adalah seorang tokoh militer tulen yang penuh dengan disiplin dan tingkah lakunya benar-benar mencerminkan tingkah laku seorang militer. D.I. Panjaitan mempunyai fisik yang tegap yang memang dikehendaki untuk menjadi seorang tentara. Walaupun D.I. Panjaitan seorang militer tulen tetapi dalam pergaulan sehari-hari ia tetap supel dan ramah tamah. Dalam pertemuan dan rapat-rapat perjuangan yang diadakan pada waktu itu, D.I. Panjaitan juga termasuk salah seorang tokoh yang selalu ikut menyumbangkan buah pikirannya dalam memecahkan masalah[3].

2. Wawancara dengan Bapak Hasan Basri di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 1979

3. Wawancara dengan Bapak *Wan Ghalib* di Pekanbaru, tanggal 8 Oktober 1979

3 Subrantas Siswanto

Subrantas Siswanto kenal dengan D.I. Panjaitan pada permulaan zaman revolusi di daerah Riau. Pada waktu itu D.I. Panjaitan menjabat sebagai komandan batalyon di Pekanbaru, sedangkan Subrantas menjadi komandan kompi di daerah Bengkalis. Sebagai sama-sama pejuang di daerah Riau Subrantas Siswanto sering mendapat bantuan dari D.I. Panjaitan untuk melanjutkan perjuangan. D.I. Panjaitan pernah memberikan candu kepada Subrantas untuk dijual guna membiayai perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Mengenai pribadi D.I. Panjaitan diceriterakan oleh Subrantas bahwa ia seorang yang sifatnya keras dan penuh disiplin dan tidak pernah mendendam. Pada suatu hari kompi Subrantas mengadakan latihan di Pekanbaru yang termasuk daerah kekuasaan D.I. Panjaitan sebagai komandan Batalyon I Pekanbaru. Waktu mengadakan latihan itu Subrantas belum mendapat ijin D.I. Panjaitan, dan itulah sebabnya Subrantas akhirnya dipanggil oleh D.I. Panjaitan. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya sesuatu karena Subrantas dan D.I. Panjaitan sama-sama mempunyai sifat keras, maka komandan Resimen Riau Letnan Kolonel Hasan Basri turun tangan untuk menyelesaikannya. Sesudah peristiwa itu D.I. Panjaitan tidak mendendam kepada Subrantas, dan ia kembali baik seperti tidak terjadi apa-apa.

Sewaktu Subrantas bertugas sebagai piket, ia terpaksa mengambil tindakan dengan menempeleng seorang anggota yang tidak disiplin. Anggota ini kemudian mengadu kepada D.I. Panjaitan, tetapi D.I. Panjaitan tidak memarahi Subrantas dan hanya memberi nasehat saja.

Sesudah pengakuan kedaulatan D.I. Panjaitan pindah ke Jakarta, sedang Subrantas tetap bertugas di daerah Riau. Walaupun keduanya jarang berhubungan lagi dalam tugas tetapi dalam masalah pribadi dan keluarga mereka tetap berhubungan. Sebelum Subrantas berkeluarga (berumah tangga) ia dianggap oleh keluarga D.I. Panjaitan sebagai anggota keluarga sendiri. Kalau Subrantas datang ke Jakarta ia selalu singgah di rumah D.I. Panjaitan dan kadang-kadang juga Subrantas menginap di rumah D.I. Panjaitan, karena telah dianggap keluarga sendiri. Sebaliknya kalau D.I. Panjaitan berkunjung ke Pekanbaru ia pasti menyempatkan diri singgah di rumah Subrantas[4].

Sebagai bahagian terakhir dari uraian ini baiklah ditampilkan dari hasil wawancara antara wartawan majalah *Ragi Buana* dengan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, 10 hari sebelum beliau gugur. Menurut penilaian D.I. Panjaitan kemajuan yang dicapai oleh TNI selama 20 tahun terakhir ini sangat luar biasa baik dalam bidang teknis militer, organisatoris maupun dalam bidang mental. Dengan

adanya kemajuan itu maka TNI tidak kalah dengan tentara maupun di dunia baik mengenai kualitas maupun kemahirannya. Pengetahuan militer Indonesia pada tahun 1945 praktis tidak ada, tetapi pada saat itu yaitu tahun 1965 kemampuan TNI dapat dibanggakan dan sangat membesarkan hati sehingga mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri. *Academie report* dari perwira TNI yang mengikuti pendidikan tinggi di luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, India, Pakistan, Inggris, Jerman Barat dan Rusia selalu baik. Perwira TNI tidak kalah dengan perwira-perwira senior negara lain dalam mengikuti pendidikan di luar negeri, walaupun mereka yang berpengalaman dalam perang dunia sekalipun perwira TNI tidak kalah, malahan sering lebih unggul dan lebih pintar dalam berbagai bidang ilmu militer. Semua prestasi ini sudah tentu adalah hasil dari pada jiwa dinamika di dalam tubuh TNI yang tidak mandek dan belajar terus dengan giat pada waktu masing-masing yang terluang.

Pada dewasa ini yaitu tahun 1965 Indonesia telah berdikari sepenuhnya di dalam bidang pendidikan militer untuk tamtama, bintara baik akademi militer maupun hingga sekolah yang tertinggi yakni SESKOAD telah kita punyai dan di dalamnya tidak pernah kita mempergunakan instrukturnya orang-orang asing. Dalam waktu yang sangat singkat TNI akan berdikari sepenuhnya dalam pembuatan segala jenis senjata baik yang ringan maupun yang berat dari hasil industri militer di Bandung.

Selain dari pada itu TNI telah berdikari penuh dalam bidang ideologi dan mental karena pimpinan dan asuhan dari Bapak kita yang tercinta PYM Presiden Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang menjadikan TNI serta kesatuan laksana benteng-benteng Pancasila dan ajaran Bung Karno yang tidak dapat dipengaruhi oleh ideologi manapun dari luar.

TNI pasti lebih jaya dan akan tetapi sebagai kusuma bangsa apabila tetap berpegang teguh kepada sumbernya bahwa dia adalah anak rakyat, dari ajaran Bung Karno di tangan kanan dan panji-panji Bhinneka Tunggal Ika dan Kartika Eka Paksi disertai doktrin Tri Ubaya Sakti di tangan kiri, maka dengan semangat maju terus dan pantang mundur sesuai dengan Sapta Marga, kita sangat optimis melihat ke masa depan yang gilang gemilang hingga 20 × 20 tahun yang akan datang dan selama-lamanya[5].

5. Pahlawan Revolusi Donald Isak Panjaitan, *Wawancara Terakhir Sebelum Gugur*, Ragi Buana No. 21 Oktober 1965, hal. 12.

DAFTAR SUMBER

A. DAFTAR BACAAN

1. Ariwiadi, *Ikhtisar Sejarah Nasional Indonesia*, Departemen HANKAM, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.
2. A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1960.
3. *Album Pahlawan Bangsa*, Mutiara, Jakarta, 1977.
4. Alamanak Umum Nasional, Endang, Jakarta, 1955.
5. A.H. Nasution, *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*, Mega Bookstore, Jakarta, 1964.
6. _____, *Tentara Nasional Indonesia II*, Seruling Masa, Jakarta, 1968.
7. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, *Komando Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban*, Jakarta, 20 Mei 1978.
8. Iwa Kusuma Sumantri, *Sejarah Revolusi Indonesia Masa Revolusi Bersenjata*, Grafika, Jakarta.
9. Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Kramat Raya 106 dalam Melahirkan Sumpah Pemuda*, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1973.
10. _____, Peranan Gedung Menteng Raya 31 Dalam Perjuangan Kemerdekaan, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1973.
11. Mohammad Basari, "Peristiwa Mounbatten Hotel Pekanbaru", Harian *Berita Buana*, 9 Desember 1976, Jakarta.
12. _____, "Pekanbaru sebagai Pangkalan Transit Tentara Jepang untuk kembali ke Tokyo via Rempang pada tahun 1945 — 1946," Harian *Berita Buana*, 10 Desember 1976, Jakarta.
13. M.D. Mansoer et al, *Sejarah Minangkabau*, Bhratara Jakarta 1970.
14. Nugroho Notosusanto, *Sejarah dan Hankam*, Lembaga Sejarah HANKAM, Jakarta, 1968.
15. _____, *Pemberontakan Tentara PETA Blitar melawan Jepang 14 Pebruari 1945*, Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta, 1968.
16. Pahlawan Revolusi Mayjen Anumerta D.I. Panjaitan, *Sejarah Pahlawan Kemerdekaan Indonesia*, Pemerintah Daerah Jember.
17. Pramono et al, *Biografi Pahlawan Nasional Dan Lingkungan ABRI*, Departemen Hankam Pusat Sejarah ABRI, 1979.
18. Pusat Penerangan Angkatan Darat, *Fakta-fakta Persoalan Sekitar Gerakan 30 September*, Penerbitan No. 1, 2, 3, Oktober 1965.

19. Majalah *Ragi Buana* No. 21 Th. II Oktober 1965 dengan Dr. W. Sejabat sebagai Ketua Penanggung Jawab, *"Pahlawan Revolusi Donal Isak Panjaitan"*.
20. _____, *Pembunuhan Keji menjelang Subuh,*
21. _____, *Ikhtisar dari 17 ke 17.*
22. _____, *Kisah Terjadinya Kudeta Berdarah.*
23. _____, Men Pangad baru Mayjen Suharto.
24. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto (ed umum), *Sejarah Nasional Indonesia V,* Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
25. _____, *Sejarah Nasional Indonesia VI,* Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
26. S.J. Rutger's, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia,* Hayam Wuruk Surabaya, 1951.
27. *Sejarah Daerah Riau,* Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) Departemen P dan K Jakarta, 1978.
28. Zuhdi, "Sejarah Perjuangan Bersenjata di Riau," Majalah *Canang* No. 10 PKH/1977, Pekanbaru, 1977.
29. _____, "Sejarah Perjuangan Bersenjata di Riau," Majalah *Canang* No. 11 PKH/1977, Pekanbaru, 1977.

B. WAWANCARA

30. Hasan Basri : a. Jakarta, 15 April 1979
b. Jakarta, 1 Nopember 1979
31. Subrantas : Pekanbaru, 10 Oktober 1979
32. Wan Ghalib : Pekanbaru, 8 Oktober 1979

MAYOR JENDERAL Anumerta D.I. PANJAITAN